

**ANALISIS KETIDAKPATUHAN KOLOMBIA TERHADAP CANADA
COLOMBIA FREE TRADE AGREEMENT (CCOFTA) DALAM HAL
PENGAMBILALIHAN PROYEK TAMBANG ANGOSTURA DI
DEPARTEMEN SANTANDER TAHUN 2010 - 2016**

SKRIPSI

**Disusun Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hubungan
Internasional Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Dengan Minat Utama
*Global Political Economy***



Disusun Oleh :

Devi Puspitasari

135120407111053

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG

2018

LEMBAR PERSETUJUAN

ANALISIS KETIDAKPATUHAN KOLOMBIA TERHADAP CANADA COLOMBIA FREE TRADE AGREEMENT (CCOFTA) DALAM HAL PENGAMBILALIHAN PROYEK TAMBANG ANGOSTURA DI DEPARTEMEN SANTANDER TAHUN 2010-2016

Disusun Oleh:

Devi Puspitasari

NIM. 135120407111053

Telah disetujui oleh dosen pembimbing:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Henny Rosalinda, S.IP., MA.
NIP. 197908082014042001

Irza Khurun'in, S.IP., MA.
NIK. 201709105132001

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hubungan Internasional

Aswin Ariyanto Aziz, S.IP., M.DevSt
NIP. 19780220201121001

LEMBAR PENGESAHAN

ANALISIS KETIDAKPATUHAN KOLOMBIA TERHADAP CANADA COLOMBIA FREE TRADE AGREEMENT (CCOFTA) DALAM HAL PENGAMBILALIHAN PROYEK TAMBANG ANGOSTURA DI DEPARTEMEN SANTANDER TAHUN 2010-2016

Disusun Oleh:

Devi Puspitasari

NIM. 135120407111053

Telah diuji dan dinyatakan **LULUS** dalam ujian Sarjana
pada tanggal 17 Oktober 2018

Tim Penguji:

Ketua Majelis Penguji

Sekretaris Majelis Penguji

Achmad Fathoni Kurniawan, S.IP., MA.

NIK. 2009068201231001

Reza Triarda, S.Sos., MA.

NIK. 2016078902131001

Anggota Majelis Penguji 1

Anggota Majelis Penguji 2

Henny Rosalinda, S.IP., MA.

NIP. 197908082014042001

Irza Khurun'in, S.IP., MA.

NIK. 201709105132001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Prof. Dr. Unti Ludigdo, SE, M.Si., Ak

NIP. 196908141994021001

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Devi Puspitasari

NIM : 135120407111053

Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

Peminatan : *Global Political Economy*

Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas : Universitas Brawijaya

Judul : Analisis Ketidapatuhan Kolombia terhadap *Canada Colombia Free Trade Agreement* (CCOFTA): Studi Kasus Pengambilalihan Proyek Tambang Angostura di Departemen Santander Tahun 2010-2016

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya buat ini adalah karya saya pribadi. Setelah melakukan berbagai pengecekan melalui perpustakaan, internet, dan media-media lainnya, saya tidak menemukan skripsi yang seluruhnya serupa dengan skripsi “ Analisis Ketidapatuhan Kolombia terhadap *Canada Colombia Free Trade Agreement* (CCOFTA): Studi Kasus Pengambilalihan Proyek Tambang Angostura di Departemen Santander Tahun 2010-2016 ” yang saya buat. Sumber-sumber yang dijadikan sebagai acuan dalam skripsi ini juga telah dikutip sesuai dengan standar penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Malang, 07 November 2018

Devi Puspitasari

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir perkuliahan dengan skripsi yang berjudul **“ANALISIS KETIDAKPATUHAN KOLOMBIA TERHADAP CANADA COLOMBIA FREE TRADE AGREEMENT (CCOFTA) DALAM HAL PENGAMBILALIHAN PROYEK TAMBANG ANGOSTURA DI DEPARTEMEN SANTANDER TAHUN 2010-2016”**. Selain sebagai persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik di Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Brawijaya, skripsi ini disusun oleh penulis berdasarkan ketertarikan penulis terhadap topik sengketa investasi, khususnya sengketa investasi yang berada di negara-negara berkembang.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah mendukung dalam proses penyusunan skripsi sehingga penulis bersemangat dan berjuang dalam menyelesaikannya. Untuk itu, ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kesempatan, jalan dan kekuatan kepada penulis selama proses pengerjaan skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Gris Sintya Berlian, S. Hub. Int., MA selaku dosen pembimbing pertama yang telah membimbing penulis dari awal penulisan proposal skripsi hingga menjelang seminar proposal. Terima kasih atas kritik dan saran yang membangun selama ini. Terima kasih juga telah mengajarkan kepada penulis untuk selalu berpikir kritis dan selalu bersikap profesional dalam segala hal.

3. Henny Rosalinda, S.IP., MA selaku dosen pembimbing pertama yang telah membimbing penulis dari setelah seminar proposal hingga menjelang ujian komprehensif. Terima kasih telah meluangkan waktu ibu di tengah jadwal padat ibu untuk membimbing saya skripsi dan mengajarkan saya untuk terus mau belajar.
4. Irza Khurun'in, S.IP., MA selaku dosen pembimbing kedua yang telah membimbing penulis setelah melalui ujian komprehensif. Terima kasih atas kritik dan sarannya selama ini yang kemudian membuat penulis mampu merevisi draft penulis dengan memuaskan.
5. Para majelis penguji, Achmad Fathoni Kurniawan, S.IP., MA selaku ketua majelis penguji dan Reza Triarda, S.IP., MA selaku sekretaris majelis penguji yang telah memberikan kritik dan saran atas penelitian yang akan penulis gunakan untuk memperbaiki skripsi penulis untuk jenjang selanjutnya.
6. Kedua orang tua penulis, Drs Djoko Haryono dan Dra. Evi Dwikorawati, terima kasih atas support materi dan finansial serta doa yang mengiringi penulis di setiap langkah yang penulis ambil. Ma, pa devi lulus. Semoga ini bisa menjadi kado terindah untuk mama dan papa.
7. Adik penulis, Dian Anggraeni yang selalu memberikan jokes dan segala tingkah kebodohnya yang berhasil membuat penulis tertawa. Neng kakak lulus neng. Semoga neng bisa segera nyusul.
8. Alm Joespandi dan Moersijah, terima kasih atas doa dan support yang diberikan selama ini terhadap devi, membantu membiayai kuliah devi dengan uang pensiun yangkung. Yangkung yangti devi lulus. I see you smile from heaven yangkung.
9. Tante Win dan Om Agus, terima kasih atas doa dan supportnya selama ini baik finansial maupun moral. Terima kasih telah membantu membiayai kuliah devi dengan hasil beternak lele dan bertanam di ladang.
10. R. Djoko Soewarno, Hj. Rafiah dan Om Willy, terima kasih atas doa dan supportnya selama ini baik materi maupun finansial. Akhirnya devi bisa mempersembahkan kado untuk yangti yangkung dan om willy. Terima kasih untuk yangkung, the one who always be my first professor, segala diskusi, perdebatan

- dan masukan yang telah diberikan. Terima kasih untuk yangti yang selalu memnyebutkan nama devi dalam setiap doanya. Finally I did it.
11. Om Hery, Tante Lolon dan Oky. Terima kasih atas support materi maupun moral serta doa yang diberikan kepada penulis. Terima kasih atas saran yang selalu mencerahkan, berbagai pandangan dan kritik yang tidak pernah penulis pikirkan serta selalu mengingatkan penulis untuk tetap rajin beribadah. Om, tante, ky devi lulus.
 12. Gengs, yang menemani penulis dari awal kuliah. Terima kasih untuk Rara yang selalu mengingatkan penulis untuk segera menyelesaikan skripsi dan memberikan kritik dan saran yang tidak penulis pikirkan serta berbagai bantuan, Zara yang selalu mau mejadi pendengar setia mendengarkan serta membantu penulis dalam berbagai hal, Tata, Karin dan Inez yang selalu meanyakan dan memberikan semangat saat penulis mengerjakan skripsi, Marwa, Fanacha dan Mala yang selalu memberikan support saat penulisan skripsi ini.
 13. IMG Models World Wide, thank you for these 5 years, Rara the one who always make me laugh, cry and know better about this world. The one who changed my life. Malinda the one who always tell me that we have to positive thinking, husnudzan, Siska for her support, and the last one Ratih and Lulu, one package always make me smile with their craziness, jokes and comments. Thank you for always make me smile and cry rek, for the pintu berkah movie series and another thing that you do for me. Unforgettable moment.
 14. Pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Malang, 08 November 2018

Devi Puspitasari

**ANALISIS KETIDAKPATUHAN KOLOMBIA TERHADAP CANADA
COLOMBIA FREE TRADE AGREEMENT (CCOFTA): STUDI KASUS
PENGAMBILALIHAN PROYEK TAMBANG ANGOSTURA DI
DEPARTEMEN SANTANDER TAHUN 2010-2016**

Devi Puspitasari

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketidakpatuhan Kolombia terhadap CCOFTA dengan studi kasus pengambilalihan Proyek Angostura di Departemen Santander pada tahun 2010-2016. Penelitian ini berusaha menjelaskan apa yang menjadi penyebab ketidakpatuhan Kolombia terhadap CCOFTA yang telah disepakati. Kasus ini merupakan kasus sengketa investasi pertama yang dihadapi oleh Negara Kolombia. Kasus ini melibatkan antara perusahaan Tambang asal Kanada *Eco Oro Minerals (Eco Oro)*.

Dalam menganalisa kasus tersebut, penelitian ini menggunakan konsep ketidakpatuhan yang dijelaskan oleh Chayes dan Chayes yang terdiri dari tiga variabel yaitu *ambiguity*, *limitations on capacity* dan *temporal dimensions*. Hipotesis dari penelitian ini adalah penyebab ketidakpatuhan Kolombia terhadap CCOFTA adalah dikarenakan adanya bahasa perjanjian yang bersifat umum dan ketidaksesuaian konteks dari klausa dalam perjanjian, kemudian adanya keterbatasan kapasitas dari sisi birokrasi dan finansial serta adanya perubahan-perubahan kondisi politik, ekonomi dan sosial. Di akhir penelitian, akan disimpulkan apakah hipotesis ini sesuai atau berkontradiksi dengan data serta hasil analisis yang ada.

Kata Kunci : Ketidakpatuhan, CCOFTA, Kolombia, *Eco Oro Minerals*.

**ANALISIS KETIDAKPATUHAN KOLOMBIA TERHADAP CANADA
COLOMBIA FREE TRADE AGREEMENT (CCOFTA): STUDI KASUS
PENGAMBILALIHAN PROYEK TAMBANG ANGOSTURA DI
DEPARTEMEN SANTANDER TAHUN 2010-2016**

Devi Puspitasari

ABSTRACT

This research aims to analyze non-compliance of Colombia to Canada Colombia Free Trade Agreement (CCOFTA) with case study expropriation of Angostura project in Santander Department in 2010-2016. This research will explain the cause of non compliance of Colombia to CCOFTA that has been agreed. This case is the first investment dispute case that Colombia has. This case involve an investor from Canada, Mining Company Eco Oro Minerals (Eco Oro).

This research uses concept non compliance from Chayes and Chayes which has three variables, there are ambiguity, limitations on capacity and temporal dimensions. The hypotheses from this research is the causes of non compliance of Colombia to CCOFTA because of the language of the treaty and incompatibility of the context from the treaty, and then the limitations on bureaucratic and financial capacity and the last is changes from politic, economy and social condition. In the end of this research the conclusion will be based on whether these hypotheses will be fit or contradict with the data that have been gathered and analyzed.

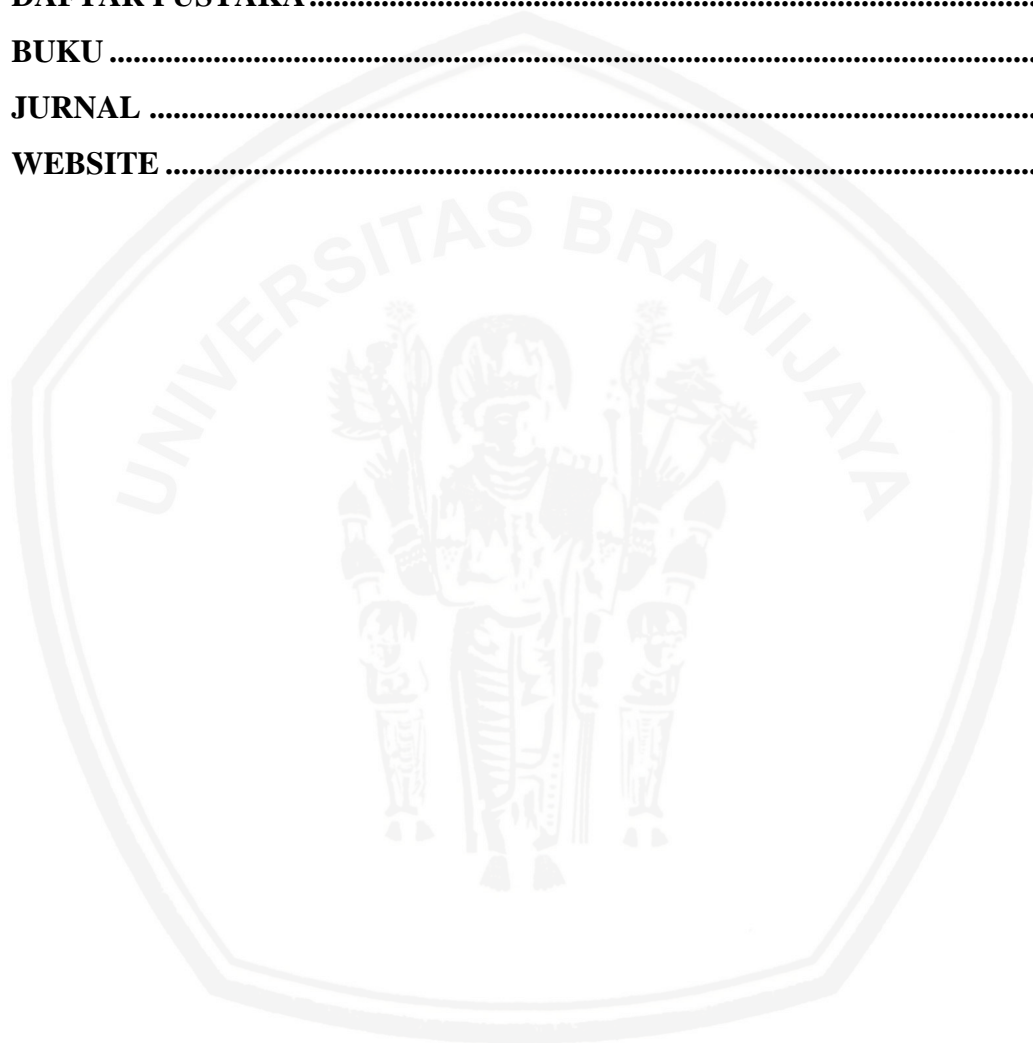
Keywords: Non-compliance, CCOFTA, Colombia, Eco Oro Minerals.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR GRAFIK	xiv
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR SINGKATAN.....	xvi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Tujuan Penelitian.....	12
1.4 Manfaat Penelitian.....	13
BAB II	14
KAJIAN PUSTAKA	14
2.1 Studi Terdahulu	14
2.2 Kerangka Teoritis.....	20
2.2.1 Teori <i>Compliance</i> dan <i>non Compliance</i>	20
2.3 Operasionalisasi Teori.....	28
2.3.1 <i>Ambiguity</i>	28
2.3.2 <i>Limitations on Capacity</i>	29

2.3.3 <i>Temporal Dimensions</i>	30
2.4 Alur Pemikiran	33
2.5 Hipotesis.....	34
BAB III.....	35
METODE PENELITIAN.....	35
3.1 Jenis Penelitian.....	35
3.2 Ruang Lingkup Penelitian.....	35
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	36
3.4 Teknik Analisis Data.....	37
3.5 Sistematika Penulisan	38
BAB IV	41
GAMBARAN UMUM TENTANG CCOFTA DAN PERKEMBANGAN INDUSTRI TAMBANG EMAS DI KOLOMBIA	41
4.1 Gambaran Umum CCOFTA Sebagai Perjanjian Kerjasama antara Kanada dan Kolombia.....	41
4.2 Gambaran Umum Perkembangan Industri Tambang Emas di Kolombia.....	51
BAB V.....	59
ANALISIS KETIDAKPATUHAN KOLOMBIA TERHADAP CANADA COLOMBIA FREE TRADE AGREEMENT (ccofta): STUDI KASUS PENGAMBILALIHAN PROYEK ANGOSTURA DI DEPARTEMEN SANTANDER TAHUN 2010-2016	59
5.1 <i>Ambiguity</i>	59
5.1.1 Bahasa dalam Perjanjian yang Bersifat Umum.....	60
5.1.2 Ketidakesesuaian Konteks dari Klausa dalam Perjanjian.....	66
5.2 <i>Limitations on Capacity</i>	70
5.2.1 Keterbatasan Birokrasi	70
5.2.2 Keterbatasan Finansial	74
5.3 <i>Temporal Dimensions</i>	76
5.3.1 Perubahan Kondisi Politik	77
5.3.2 Perubahan Kondisi Ekonomi	92
5.3.3 Perubahan Kondisi Sosial	96

5.4 Hasil Analisis	102
BAB VI	110
KESIMPULAN.....	110
6.1 Kesimpulan	110
6.2 Saran.....	112
DAFTAR PUSTAKA	113
BUKU	113
JURNAL	113
WEBSITE	114



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Lokasi Tambang Emas dan Kelompok Bersenjata.	55
---	----



DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 Ekspor-Import Kanada-Kolombia 2010-2016.....	46
Grafik 2 Perdagangan Jasa Kanada Kolombia 1995-2015.	49
Grafik 3 FDI Kanada-Kolombia 1996-2016.....	50
Grafik 4 FDI Industri Ekstraktif (1994-2008).....	81
Grafik 5 FDI Kolombia 2003-2013.....	93
Grafik 6 Ekspor Mineral Kolombia Tahun 2009-2016.....	94



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Operasionalisasi Konsep <i>non Compliance</i> Chayes dan Chayes	31
Tabel 2 Ekspor-Import Kanada dan Kolombia 2000-2011.....	45
Tabel 3 Eliminasi Tarif CCOFTA.	48



DAFTAR SINGKATAN

ANLA	: <i>Autoridad Nacional de Licencias Ambientales</i>
CCOFTA	: <i>Canada Colombia Free Trade Agreement</i>
DSDP	: <i>Democratic Security and Defense Policy</i>
ELN	: <i>Ejército de Liberación Nacional</i> (National Liberation Army)
FARC	: <i>Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia</i>
FDI	: <i>Foreign Direct Investment</i>
FTA	: <i>Free Trade Agreement</i>
ICSID	: <i>International Centre for Settlement of Investment Disputes</i>
INGEOMINAS	: <i>Servicio Geológico Colombiano</i>
OECD	: <i>Organisation for Economic Co-operation and Development</i>
POT	: <i>Plan de Ordenamiento Territorial</i> (Organizational Territorial Plan)
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
TICA	: <i>Trade Investment Cooperation Agreement</i>
UNCTAD	: <i>United Nations Conference on Trade and Development</i>
UU	: Undang-undang

LEMBAR PENGESAHAN

**ANALISIS KETIDAKPATUHAN KOLOMBIA TERHADAP *CANADA*
COLOMBIA FREE TRADE AGREEMENT (CCOFTA) DALAM HAL
PENGAMBILALIHAN PROYEK TAMBANG ANGOSTURA DI
DEPARTEMEN SANTANDER TAHUN 2010-2016**

Disusun Oleh:

Devi Puspitasari

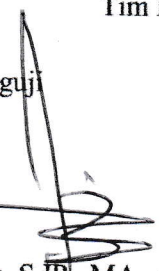
NIM. 135120407111053

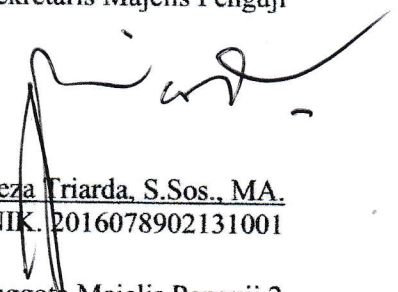
Telah diuji dan dinyatakan **LULUS** dalam ujian Sarjana
pada tanggal 17 Oktober 2018

Tim Penguji:

Ketua Majelis Penguji


Sekretaris Majelis Penguji



Achmad Fathoni Kurniawan, S.IP., MA.
NIK. 2009068201231001


Reza Triarda, S.Sos., MA.
NIK. 2016078902131001

Anggota Majelis Penguji 1

Anggota Majelis Penguji 2


Henny Rosalinda, S.IP., MA.
NIP. 197908082014042001


Irza Khurun'in, S.IP., MA.
NIK. 201709105132001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Prof. Dr. Unti Ludigdo, SE, M.Si., Ak.
NIP. 196908141994021001

LEMBAR PERSETUJUAN

ANALISIS KETIDAKPATUHAN KOLOMBIA TERHADAP *CANADA* *COLOMBIA FREE TRADE AGREEMENT* (CCOFTA) DALAM HAL PENGAMBILALIHAN PROYEK TAMBANG ANGOSTURA DI DEPARTEMEN SANTANDER TAHUN 2010-2016

Disusun Oleh:

Devi Puspitasari

NIM. 135120407111053

Telah disetujui oleh dosen pembimbing:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Henny Rosalinda, S.IP., MA.
NIP. 197908082014042001



Irza Khurun'in, S.IP., MA.
NIK. 201709105132001

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hubungan Internasional



Aswin Ariyanto Aziz, S.IP., M.DevSt
NIP. 19780220201121001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Foreign Direct Investment atau yang lebih dikenal dengan sebutan FDI merupakan salah satu cara bagi Negara untuk bisa berkembang dalam berbagai aspek mulai dari ekonomi, infrastuktur hingga teknologi. Berbicara mengenai investasi maka tidak terlepas dari adanya sengketa investasi. Berdasarkan data dari ICSID menyebutkan bahwa dalam 8 tahun terakhir (2009-2016) kawasan Amerika Selatan masuk ke dalam 3 teratas sengketa investasi.¹ Salah satu Negara yang cukup menarik perhatian adalah Kolombia, yang untuk pertama kali di tahun 2016 Kolombia mendapatkan kasus sengketa investasi berkaitan dengan pelanggaran CCOFTA (*Canada Colombia Free Trade Agreement*).²

Kasus ini melibatkan antara perusahaan tambang asal Kanada yaitu *Greystar Resources* atau yang dikenal dengan *Eco Oro Minerals* (Eco Oro) dengan pemerintah Kolombia.³ Eco Oro mulai berinvestasi di Kolombia pada tahun 1994 melalui izin tambang 3452 untuk melakukan aktivitas eksplorasi dan eksploitasi dengan luas area

¹ ICSID, *ICSID Caseload Statistics*, <https://icsid.worldbank.org/en/Pages/resources/ICSID-Caseload-Statistics.aspx>, Diakses Pada 19 Desember 2017 Pada Pukul 23.46 WIB.

² UNCTAD, *Cases-Advanced Search Results*, <http://investmentpolicyhub.unctad.org/ISDS/AdvancedSearchResults>, Diakses Pada 17 Januari 2018 Pada Pukul 11.54 WIB.

³ *Ibid.*

250 H yang terletak di Departemen Santander.⁴ Nama dari proyek ini dikenal dengan Proyek Angostura yang memiliki fokus penambangan emas dan perak.⁵

Di tahun 2001, tepatnya dibawah kepemimpinan Presiden Andres Pastrana Arango Kolombia melakukan modernisasi *mining code* melalui UU 685.⁶ Dengan adanya *mining code* tahun 2001 maka menggantikan *mining code* tahun 1988 yang juga disebut sebagai titik balik dari sektor pertambangan di Kolombia.⁷ Hal ini dikarenakan *mining code* tahun 2001 merupakan sebuah instrumen yang bertujuan untuk menarik investasi di bidang pertambangan.⁸

Dengan diberlakukannya UU 685 tahun 2001, maka berdampak pada perubahan beberapa ketentuan berkaitan dengan investasi tambang seperti perusahaan yang memiliki konsesi dapat memperpanjang kontrak dengan jangka waktu 30 tahun.⁹ Kemudian ketentuan yang lainnya adalah izin untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi tambang menjadi satu kesatuan.¹⁰ Hal ini berbeda jika dibandingkan dengan *mining code* tahun 1988, yaitu izin untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi terpisah dan tidak ada jaminan jika investor dapat melakukan eksploitasi setelah melakukan eksplorasi.¹¹

⁴ ICSID, *Eco Oro Minerals Corp (Claimant) v The Republic of Colombia (Respondent)*, Page 4-8, <https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/italaw9443.pdf>, Diakses Pada 31 Januari 2018 Pada Pukul 09.26 WIB. Page 4-8.

⁵ *Ibid.*

⁶ Luis Ernesto Rodriguez A, "Are the Characteristics of the New Colombian Mining Code Sufficiently Competitive in Attracting Investment to the Mineral Sector?", *Minerals & Energy - Raw Materials Report Vol 19 Issue 1*, 2004, Page 2.

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

⁹ ICSID, *Op.Cit.*, Page 8-9.

¹⁰ Luis Ernesto Rodriguez A, *Op.Cit* Page 6.

¹¹ *Ibid.*

Dengan diberlakukannya *mining code* tahun 2001 maka juga berdampak pada izin tambang yang dimiliki oleh Eco Oro yang tadinya hanya mendapatkan izin tambang 3452 berubah menjadi kontrak konsesi 3452.¹² Kontrak ini berlaku selama 20 tahun (hingga tahun 2027) dan Eco Oro dapat memperpanjang kontrak dengan jangka waktu 30 tahun.¹³ Kontrak konsesi 3452 diberikan oleh Badan Pertambangan Nasional pada 09 Februari 2007 yang kemudian secara formal terdaftar dalam catatan pertambangan nasional pada 09 Agustus 2007 dengan judul konsesi 3452.¹⁴

Hal yang berbeda terjadi pada Februari 2010, dimana Pemerintah Kolombia memberlakukan UU 1382 sebagai amandemen dari *mining code* tahun 2001 yang berisi larangan adanya aktivitas penambangan di area ekosistem Paramo.¹⁵ Perlu diketahui bahwa lokasi Proyek Angostura dengan lokasi ekosistem Paramo saling tumpang tindih.¹⁶ Lokasi ekosistem Paramo terletak di cordillera timur Pegunungan Andes dengan ketinggian sekitar 3000 m di atas permukaan laut, sedangkan Proyek Angostura terletak pada ketinggian 2400-3500 m diatas permukaan laut.¹⁷ Namun pada akhirnya Pengadilan Konstitusional mengumumkan bahwa tidak akan mengimplementasikan UU 1382 dikarenakan UU 1382 disetujui tanpa adanya proses formal dan memberikan kesempatan bagi pemerintah untuk membuat UU baru dengan batas waktu maksimal 2

¹² ICSID, *Op.Cit* Page 10.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid* Page 15.

¹⁶ *Ibid* Page 14.

¹⁷ *Ibid* .

tahun.¹⁸ Kemudian hal ini tidak dapat dipenuhi oleh pemerintah, sehingga pada akhirnya Mei 2013 *mining code* tahun 2001 kembali diberlakukan.¹⁹

Di bulan Juni 2011 pemerintah mengeluarkan RPJMN tahun 2010-2014 melalui UU 1450 yang memuat materi dari UU 1382 sebelumnya yang tidak diimplementasikan.²⁰ Isi dari UU 1450 adalah adanya larangan aktivitas tambang di ekosistem Paramo dan ditambahkan ketentuan baru yang mewajibkan penggambaran peta ekosistem Paramo dengan skala 1:25.000 berdasarkan kriteria ekonomi, sosial dan lingkungan.²¹ Dengan dikeluarkannya UU 1450 maka seharusnya aktivitas tambang di kawasan ekosistem Paramo berhenti.²²

Namun kenyataannya berbeda, Eco Oro masih tetap melakukan aktivitas tambang secara normal dan tidak mendapatkan teguran ataupun sanksi.²³ Bahkan disaat yang bersamaan untuk pertama kalinya Badan Pertambangan Nasional mendeklarasikan bahwa Proyek Angostura menjadi proyek kepentingan nasional yang memiliki dampak pada ekonomi, sosial dan lingkungan.²⁴ Dengan adanya pernyataan tersebut maka secara tidak langsung menunjukkan bahwa pemerintah memberikan dukungan terhadap Proyek Angostura. Hal ini kemudian berlanjut pada Februari 2012 di saat Eco Oro mengembangkan proyek tambang bawah tanah, Eco Oro mendapatkan kerangka acuan untuk melakukan analisis dampak lingkungan oleh ANLA (*Autoridad*

¹⁸ Natural Resource Governance Institute, *Country Strategy Note June 2015 Colombia*, https://resourcegovernance.org/sites/default/files/documents/nrgi_colombia-strategy_20160629.pdf, Page 4, Diakses Pada 10 Februari 2018 Pada Pukul 22.36 WIB

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ ICSID, *Op. Cit.*, Page 16.

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

²³ *Ibid* Page 5.

²⁴ *Ibid.*

Nacional de Licencias Ambientales) yang merupakan otoritas perizinan lingkungan nasional.²⁵

Permasalahan mulai muncul ketika Badan Pertambangan Nasional pada bulan September 2012 memerintahkan perusahaan Eco Oro untuk menghentikan aktivitas tambang hingga penggambaran wilayah ekosistem Paramo selesai.²⁶ Dasar dari penghentian aktivitas adalah UU 1450 yang telah diterbitkan sebelumnya.²⁷ Di tahun berikutnya, di tengah berhentinya aktivitas tambang, Badan Pertambangan Nasional kembali mengeluarkan pernyataan bahwa Proyek Angostura merupakan proyek kepentingan nasional yang berdasarkan kriteria sosial, ekonomi dan lingkungan.²⁸ Tentunya apa yang dilakukan oleh Badan Pertambangan Nasional sangat berkontradiksi mengingat pernyataan yang dikeluarkan sebelum penghentian aktivitas tambang dan di saat penghentian aktivitas tambang. Di satu sisi pernyataan yang dikeluarkan oleh Badan Pertambangan Nasional menunjukkan dukungan yang diberikan oleh pemerintah untuk Proyek Angostura. Namun di sisi lain, dengan menghentikan aktivitas tambang menunjukkan bahwa tidak mendukung dari Proyek Angostura.

Tiga tahun setelah dikeluarkannya UU 1450 yaitu pada 1 April 2014, Kementerian Lingkungan Hidup mengumumkan peta dari ekosistem Paramo namun peta tersebut tidak dapat digunakan untuk menilai dampak dari penambangan di kawasan ekosistem Paramo sehingga baru pada 19 Desember 2014 Kementerian

²⁵ *Ibid* Page 16.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid* Page 17.

Lingkungan Hidup mempublikasi penggambaran ekosistem Paramo melalui Resolusi no. 2090.²⁹ Resolusi tersebut berisi beberapa ketentuan, seperti ekosistem terbagi menjadi 3 bagian yaitu area yang dilindungi, area restorasi dan area bebas digunakan.³⁰ Kemudian ketentuan yang lainnya adalah tidak akan ada konsesi kontrak baru yang akan ditandatangani serta tidak akan ada izin lingkungan baru untuk aktivitas tambang di area ekosistem Paramo yang akan dikeluarkan.³¹ Namun bagi para pemegang konsesi kontrak dan izin lingkungan yang telah dikeluarkan sebelum tanggal 9 Februari 2010 mereka tetap dapat beraktivitas normal atau dengan kata lain mereka mendapatkan pengecualian, termasuk Eco Oro.³²

Walaupun Eco Oro mendapatkan pengecualian, Resolusi no. 2090 juga memiliki ketentuan yang merugikan bagi pihak Eco Oro yaitu dengan adanya pembatasan hak yang dimiliki oleh Eco Oro.³³ Pembatasan hak yaitu dengan tidak dapat memperpanjang kontrak, yang mana sebelumnya jika mengacu pada *mining code* tahun 2001 menyebutkan bahwa Eco Oro dapat memperpanjang kontrak hingga 30 tahun.³⁴ Dengan diberlakukannya pembatasan hak tersebut maka Pemerintah Kolombia bisa dikatakan tidak konsisten dengan janji yang telah dibuat diawal.

Hal ini kemudian berlanjut pada Juni 2015, dimana Kongres Kolombia memberlakukan RPJMN tahun 2014-2018 melalui UU 1753.³⁵ Dengan diberlakukannya UU 1753 maka mencabut UU 1450 sebelumnya (RPJMN tahun

²⁹ *Ibid* Page 18.

³⁰ *Ibid* Page 19.

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*

³³ *Ibid* Page 20.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid* Page 22.

2010-2014).³⁶ Isi dari UU 1753 sama dengan Resolusi no. 2090.³⁷ Beberapa bulan setelah diterapkannya UU 1753, tepatnya pada 8 Februari 2016 Konstitusi Kolombia mengeluarkan keputusan bahwa beberapa bagian dalam UU 1753 inkonstitusional.³⁸ Puncak permasalahan terjadi pada 18 Februari 2016 dimana pada akhirnya Konstitusi Kolombia mengumumkan bahwa menghapus pengecualian pelarangan aktivitas tambang yang sebelumnya masih diperbolehkan (sesuai dengan Resolusi no. 2090 dan UU 1753).³⁹

Dengan dikeluarkannya keputusan tersebut, maka tentu berdampak pada Eco Oro yang pada akhirnya tidak dapat melakukan aktivitas tambang. Hal ini kemudian mendorong Eco Oro untuk menyampaikan kepada Presiden Kolombia melalui surat resmi untuk membawa permasalahan ke arbitasi dan juga meminta adanya konsultasi damai dengan Pemerintah Kolombia pada 7 Maret 2016.⁴⁰ Namun hingga 9 bulan lamanya tidak ada kesepakatan yang dicapai dan akhirnya pada 8 Desember 2016 secara resmi Eco Oro mengajukan arbitasi ke ICSID terhadap Pemerintah Kolombia.⁴¹ Hingga saat ini status kasus ini masih *pending* yang mana pada 30 November 2017 kemarin dilaksanakan *procedural order* oleh ICSID.⁴²

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid* Page 24-26.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Eco Oro Minerals Corp, *Management's Discussion and Analysis*, Page 4, March 31, 2017, <http://thecse.com/sites/default/files/investorx/EOM/1705151710164995.pdf>, Diakses Pada 06 Februari 2018 Pada Pukul 16.59 WIB.

⁴¹ *Ibid.*

⁴² ICSID, *Procedural Order No. 1*, Page 1, <https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/italaw9380.pdf>, Diakses Pada 07 Februari 2018 Pada Pukul 16.25 WIB.

Tentunya apa yang dilakukan oleh Pemerintah Kolombia merupakan suatu hal yang merugikan mengingat dalam kurun waktu 23 tahun setidaknya Eco Oro sudah berinvestasi lebih dari \$250 juta.⁴³ Hal ini mencakup mulai dari pengeboran, studi lingkungan, pajak hingga gaji pegawai.⁴⁴ Dengan apa yang dilakukan oleh Pemerintah Kolombia menunjukkan bahwa Pemerintah Kolombia tidak dapat melindungi investasi yang dilakukan oleh Eco Oro. Berdasarkan dengan ketentuan yang telah diatur oleh UNCTAD dalam *International Investment Agreement* atau Perjanjian Investasi Internasional, Negara diwajibkan untuk melindungi investasi asing yang ada.⁴⁵ UNCTAD menjelaskan bahwa adanya prinsip dan peraturan internasional bagi investasi asing ditujukan agar pemerintah *host countries* tidak merugikan investor serta tidak melakukan tindakan-tindakan seperti pengambilalihan dan nasionalisasi dari investasi yang ada.⁴⁶

Hal ini tentunya bertentangan dan telah melanggar CCOFTA yang menjadi dasar dari investasi yang ada, tepatnya pada bagian investasi pasal 805 dan pasal 811.⁴⁷ FTA ini sendiri ditandatangani pada 21 November 2008 dan mulai berlaku pada 15 Agustus 2011.⁴⁸

⁴³ TLC, *Pleitos a la vista con los Tratados de Libre Comercio*, <http://www.semana.com/economia/articulo/tlc-empresas-extranjeras-demandan-al-estado-colombiano-por-incumplimiento/496194>, Diakses Pada 04 Maret 2018 Pada Pukul 22.19 WIB.

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ UNCTAD, *International Investment Agreements: Key Issues Volume I*, https://unctad.org/en/Docs/iteiit200410_en.pdf, Page 26-27 Diakses Pada 23 Oktober 2018 Pada Pukul 16.58 WIB/

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ World Bank, *Free Trade Agreement between Canada and The Republic of Colombia*, <https://wits.worldbank.org/GPTAD/PDF/archive/canada-columbia.pdf>, Diakses Pada 19 Februari 2018 Pada Pukul 12.45 WIB.

⁴⁸ ICSID, *Eco Oro Minerals Corp (Claimant) v The Republic of Colombia (Respondent)*, *Op.Cit* Page 3.

Pasal 805 berkaitan dengan perlakuan standar minimum, dimana pasal ini menjelaskan bahwa masing-masing pihak harus memberi perlakuan terhadap investasi sesuai dengan perlakuan standar minimum dari hukum kebiasaan internasional termasuk didalamnya perlakuan yang adil serta adanya perlindungan dan jaminan keamanan dalam menjalankan investasi.⁴⁹ Kewajiban untuk memberikan perlakuan yang adil disini juga mencakup perihal untuk tidak menolak keadilan dalam pidana, perdata atau proses pengadilan administratif sesuai dengan prinsip yang berlaku.⁵⁰ Jika kita kaitkan dengan kasus diatas dengan dikeluarkannya serangkaian UU mulai dari UU 1382 yang dikeluarkan pada tahun 2010, kemudian UU 1450, Resolusi no. 2090 hingga yang terakhir UU 1753 yang kemudian menghambat Eco Oro dalam beraktivitas maka dapat dikatakan Pemerintah Kolombia tidak dapat memberikan perlindungan dan jaminan keamanan bagi Eco Oro yang merupakan investor dalam menjalankan investasi.

Kemudian hal ini berlanjut dengan tidak konsistennya dari Pemerintah Kolombia dalam memberikan izin untuk melakukan tambang yang pada akhirnya Konstitusi Kolombia mengeluarkan keputusan bahwa semua aktivitas tambang harus dihentikan dan hal ini sangat berkontradiksi dengan keputusan sebelumnya yang dikeluarkan melalui Resolusi no. 2090 bahwa perusahaan yang telah menandatangani kontrak sebelum 9 Februari 2010 mendapatkan pengecualian. Dengan apa yang dilakukan oleh Pemerintah Kolombia, maka dapat dikatakan bahwa Pemerintah

⁴⁹ *Ibid* Page 126.

⁵⁰ *Ibid*.

Kolombia tidak dapat melindungi dan menjaga keamanan investasi sesuai dengan hukum kebiasaan internasional.

Kemudian pasal kedua yang dilanggar adalah pasal 811 yaitu pengambilalihan.⁵¹ Dalam pasal ini menjelaskan bahwa tidak ada pihak manapun yang boleh menasionalisasi atau mengambilalih investasi baik secara langsung maupun tidak langsung melalui berbagai tindakan yang memiliki efek setara dengan nasionalisasi atau pengambilalihan kecuali untuk tujuan umum, dengan cara yang tidak diskriminatif, memberikan ganti rugi yang tepat dan sesuai dengan proses hukum yang berlaku.⁵² Kemudian kompensasi dari adanya pengambilalihan harus sesuai dengan harga pasar sebelum pengambilalihan terjadi dan harus dibayarkan tanpa adanya penundaan.⁵³ Yang dimaksud dengan pengambilalihan tidak langsung disini adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dimana dengan dikeluarkannya peraturan atau kebijakan berdampak secara tidak langsung terhadap investasi yang ada.⁵⁴

Jika kita kaitkan dengan kasus di atas, pada 8 Februari 2016 Konstitusi Kolombia mengeluarkan keputusan untuk menghapus pengecualian pelarangan aktivitas tambang atau dengan kata lain melarang aktivitas tambang di area ekosistem Paramo.⁵⁵ Hal ini berdampak pada setidaknya 350 proyek tambang yang pada akhirnya

⁵¹ *Ibid* Page 133.

⁵² *Ibid* .

⁵³ *Ibid* Page 134..

⁵⁴ Suzy H. Nikièma, *Best Practices Indirect Expropriation*, https://www.iisd.org/sites/default/files/publications/best_practice_indirect_expropriation.pdf, Page 4, Diakses Pada 04 Maret 2018 Pada Pukul 12.46 WIB.

⁵⁵ TeleSUR, *Constitutional Court Bans Mining in Colombian Andes*, <https://www.telesurtv.net/english/news/Mining-in-Colombian-Paramo-Banned-by-Constitutional-Court-20160209-0002.html>, Diakses Pada 17 Maret 2018 Pada Pukul 08.38 WIB.

harus berhenti beraktivitas.⁵⁶ Dengan dikeluarkannya keputusan tersebut maka Pemerintah Kolombia terbukti telah melakukan pengambilalihan secara tidak langsung terhadap Proyek Angostura yang tentunya hal ini merugikan bagi Eco Oro yang telah memiliki kontrak konsesi.

Maka dapat kita lihat bahwa pada dasarnya terjadi pertentangan antara hukum nasional dengan hukum internasional. Hal ini dapat dibuktikan dengan dikeluarkannya serangkaian peraturan, mulai dari UU 1382, kemudian UU 1450, Resolusi no.2090 hingga UU 1753 yang merupakan hukum nasional yang kemudian berimplikasi terhadap kelangsungan investasi yang ada yaitu aktivitas tambang. Tentunya hal ini bertentangan dengan perjanjian CCOFTA yang merupakan kesepakatan dari kedua Negara (hukum internasional) yang menjadi kerangka besar perlindungan investasi Negara Kanada di Kolombia yang mana dalam bagian investasi pasal 805 dan 811 khususnya, Negara Kolombia memiliki kewajiban untuk melindungi segala bentuk investasi yang dilakukan oleh Kanada, termasuk dalam konteks peraturan pengambilalihan.

Dari kasus di atas terdapat beberapa hal yang menarik untuk diteliti. Yang pertama adalah investasi yang dilakukan oleh Eco Oro merupakan investasi pertama di bidang tambang yang masuk ke Kolombia.⁵⁷ Kemudian hal yang menarik selanjutnya adalah kasus sengketa ini merupakan kasus pertama Kolombia yang masuk ke dalam ICSID berkaitan dengan pelanggaran FTA dan kasus pertama dengan Negara

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ ICSID, *Op.Cit* Page 4.

Kanada.⁵⁸ Kemudian yang terakhir adalah menarik jika kita melihat bahwa kontribusi yang dilakukan oleh Kanada terhadap Kolombia tidak sedikit namun Kolombia membalas kebaikan Kanada dengan tidak mematuhi kesepakatan yang ada (FTA). Berdasarkan hal-hal yang menarik tersebut mendorong penulis untuk mencari tahu lebih lanjut penyebab ketidakpatuhan Kolombia terhadap CCOFTA.

1.2 Rumusan Masalah

Mengapa Kolombia tidak patuh terhadap CCOFTA dalam hal pengambilalihan tidak langsung Proyek Angostura di Departemen Santander tahun 2010-2016?

1.3 Tujuan Penelitian

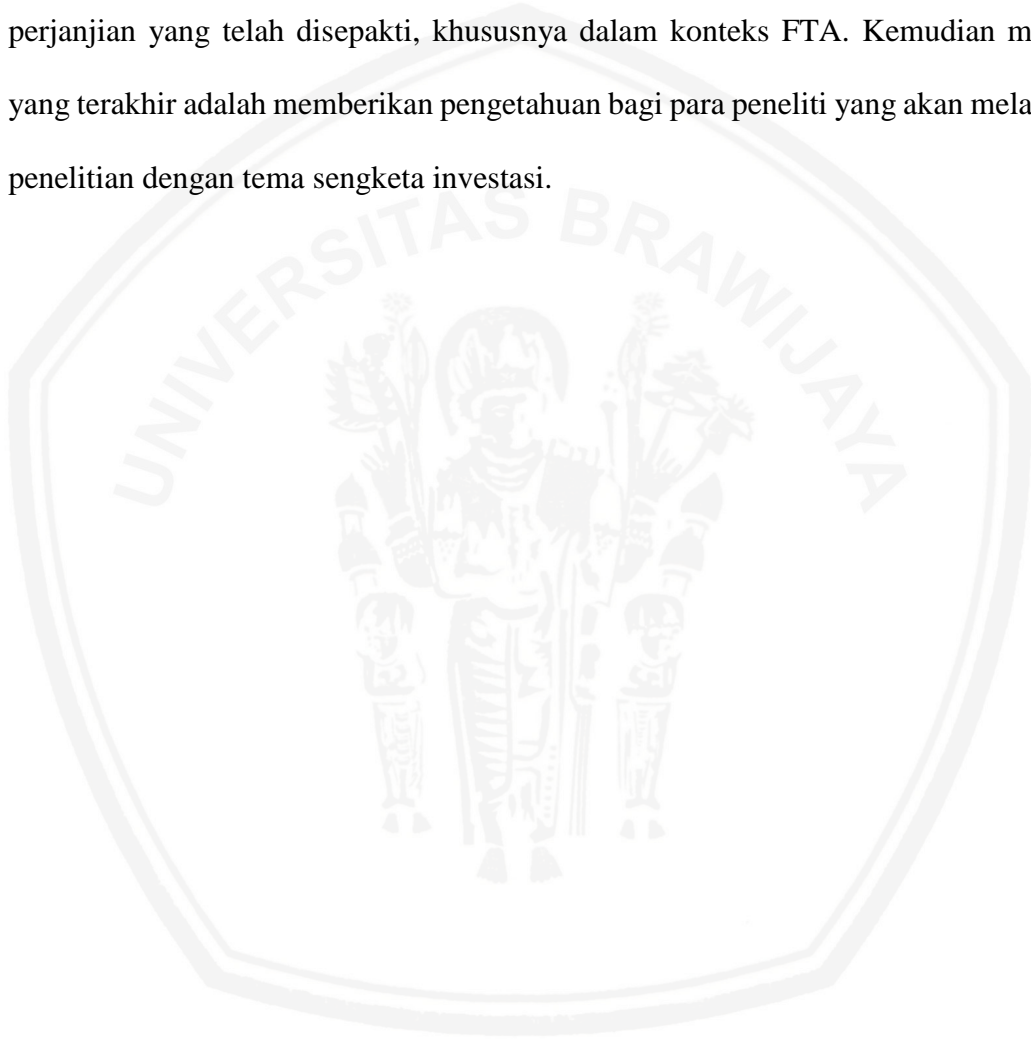
Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui ambiguitas bahasa dari perjanjian FTA antara Kolombia dengan Kanada, khususnya bagian investasi pasal 805 dan 811.
2. Mengetahui keterbatasan birokrasi maupun finansial yang dialami oleh Negara Kolombia.
3. Mengetahui bahwa adanya perubahan-perubahan pada aspek politik, ekonomi dan sosial di Negara Kolombia yang kemudian mendorong Negara Kolombia melakukan tindakan ketidakpatuhan terhadap FTA yang telah disepakati dengan Kanada.

⁵⁸ UNCTAD, *Loc.Cit.*

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang dilakukan oleh penulis yang pertama adalah menambah wawasan terkait alasan mengapa suatu Negara tidak patuh terhadap perjanjian yang telah disepakti, khususnya dalam konteks FTA. Kemudian manfaat yang terakhir adalah memberikan pengetahuan bagi para peneliti yang akan melakukan penelitian dengan tema sengketa investasi.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Studi Terdahulu

Dalam penelitian kali ini penulis menggunakan 2 studi terdahulu yaitu berupa tesis yang memiliki kesamaan kasus dan teori yang mana hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran bagi penulis dalam penelitian. Studi terdahulu pertama adalah tesis yang ditulis oleh Aída Sofía Rivera Sotelo yang berjudul *Interogating Sustainable Development: A Case Study of Large-Scale Mining in Colombia*. Secara umum tesis ini melihat adanya tambang dalam skala besar di Kolombia yang difokuskan pada Proyek Angostura milik Perusahaan Eco Oro (*Greystar Resources*) dengan sudut pandang *sustainable development*.¹

Di dalam tesis ini menjelaskan bagaimana prinsip dari *sustainable development* memiliki batasan dalam melindungi ekosistem yang sensitif dan para penghuninya.² Batasan disini berkaitan dengan adanya ekosistem sebagai komoditas dan representasi dari masyarakat seperti petani kecil, penambang kecil sebagai subyek dari manajemen.³

¹ Aída Sofía Rivera Sotelo, *Interogating Sustainable Development: A Case Study of Large-Scale Mining in Colombia*, Page 2, https://qspace.library.queensu.ca/bitstream/handle/1974/7494/riverasotelo_aidasofia_201211_ma.docx.pdf?sequence=1, Diakses Pada 17 Januari 2018 Pada Pukul 12.06 WIB.

² *Ibid* Page 98.

³ *Ibid*.

Dan hal ini yang menjadi fokus dari penulis tesis yaitu memfokuskan pada petani kecil, penambang kecil dan kota yang menjadi lokasi tambang dikarenakan ketiga hal tersebut terkena dampak dari Proyek Angostura.⁴

Kemudian dalam tesis ini juga menjelaskan bagaimana hubungan dari prinsip *sustainable development* dan tambang dalam skala besar bersifat ambigu mengingat bahwa tambang digambarkan sebagai aktivitas untuk kebaikan bersama menurut PBB (*sustainable development*) dan Pemerintah Kolombia.⁵ Selain itu, tesis ini juga menjelaskan mengenai resolusi 1015 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kolombia pada tahun 2011 dimana secara garis besar resolusi ini menolak izin lingkungan dari Perusahaan Eco Oro untuk melakukan ekstraksi dikarenakan dalam proses tersebut menggunakan setidaknya 230 ton bahan peledak setiap harinya yang tentunya hal ini akan berdampak pada tanah, udara dan air.⁶

Dalam resolusi 1015, Kementerian Lingkungan Hidup juga meratifikasi komitmen dari pasal 13 UU 685 tahun 2001 tentang industri tambang untuk kebaikan bersama.⁷ Hal ini merupakan suatu hal yang saling berkontradiksi mengingat di satu sisi Pemerintah Kolombia melindungi ekosistem Paramo dari tambang tapi di sisi lain Pemerintah Kolombia meratifikasi industri tambang untuk kebaikan bersama dan mengkomoditisasi pendekatan terhadap lingkungan sebagai jasa lingkungan.⁸ Penulis tesis berpendapat bahwa dari resolusi 1015 menggambarkan bahwa tidak ada prinsip

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid* Page 100.

⁶ *Ibid* Page 101.

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid* Page 104-106.

sustainable development yang tegas yang menjamin kelangsungan dari ekosistem paramo tanpa adanya proyek tambang dalam skala besar.⁹

Persamaan antara studi terdahulu pertama dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yang pertama adalah Negara yang menjadi fokus penelitian yaitu Negara Kolombia. Kemudian persamaan yang kedua adalah topik berkaitan dengan tambang di Negara Kolombia khususnya tambang milik Perusahaan Eco Oro yang fokus pada Proyek Angostura. Sehingga dari studi terdahulu pertama sedikit banyak berkontribusi bagi penulis dalam memberikan gambaran mengenai kasus yang akan diteliti serta menjadi referensi dalam penelitian yang akan dilakukan oleh penulis.

Sedangkan perbedaan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan studi terdahulu pertama adalah fokus penelitian, yang mana penulis lebih memfokuskan pada ketidakpatuhan dari Kolombia terhadap *Free Trade Agreement* dengan Kanada yaitu dengan pengambilalihan secara tidak langsung Proyek Angostura. Sedangkan studi terdahulu pertama memfokuskan pada *sustainable development* dari tambang skala besar khususnya Proyek Angostura yang mana lebih menitikberatkan pada dari prinsip *sustainable development* tidak dapat menjamin kelangsungan dari ekosistem paramo.

Studi terdahulu kedua yang digunakan oleh penulis adalah tesis yang ditulis oleh Danika Grandkoski yang berjudul *Defiance and Compliance: Australia and the United Nations Convention Relating to the Status of Refugees*. Secara umum tesis ini membahas mengenai sejauh mana tingkat kepatuhan dari Australia terhadap Konvensi

⁹ *Ibid* Page 106.

Pengungsi milik PBB dengan menggunakan beberapa teori kepatuhan.¹⁰ Beberapa teori yang digunakan adalah teori realis, teori liberalis, teori reputasi, teori konstruktivis dan yang terakhir teori manajerial.¹¹ Dari kelima teori tersebut, tidak ada satu teori yang menjelaskan secara maksimal mengenai tingkat kepatuhan Australia terhadap kewajiban dan tanggung jawab mereka terhadap Konvensi Pengungsi.¹² Sebaliknya, masing-masing komponen dari kelima teori yang telah disebutkan dapat memberikan pemahaman faktor mana yang memberikan pengaruh terbesar dalam menentukan tingkat kepatuhan Australia terhadap Konvensi Pengungsi.¹³

Dalam tesis ini juga disebutkan bahwa terdapat 2 faktor pendorong mengapa Australia tidak patuh terhadap Konvensi Pengungsi.¹⁴ Faktor pertama adalah berkaitan dengan masyarakat sipil, sedangkan faktor kedua adalah berkaitan dengan konstruksi ideologi dari identitas nasional.¹⁵ Kemudian dalam tesis ini juga dijelaskan mengenai kritik terhadap Pemerintah Australia mengenai kebijakan domestik Australia terhadap pengungsi berkaitan dengan lepas pantai Australia.¹⁶ Tiga alasan yang menjadi justifikasi Australia untuk menerapkan lepas pantai adalah untuk mengontrol perbatasan, identitas nasional dan keamanan nasional.¹⁷

¹⁰ Danika Grandkoski, *Defiance and Compliance: Australia and the United Nations Convention Relating to the Status of Refugees*, Page 7
<http://researcharchive.vuw.ac.nz/xmlui/bitstream/handle/10063/2325/thesis.pdf?sequence=2>,
Diakses Pada 14 Maret 2018 Pada Pukul 21.59 WIB.

¹¹ *Ibid* Page 16-24.

¹² *Ibid* Page 8.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

Ketidakpatuhan Australia terhadap Konvensi Pengungsi terjadi di masa kepemimpinan PM Howard di tahun 2001 yaitu dengan mengeluarkan *Pasific Solution* yang merupakan sekumpulan RUU yang telah diloloskan oleh parlemen dan berdampak pada pengungsi.¹⁸ Isi dari *Pasific Solution* diantaranya adalah adanya penggolongan subkelas visa yaitu dengan memberikan *temporary protection visa* (TPV) bagi para pengungsi serta mengembalikan kapal pengungsi ke tengah laut.¹⁹ Dengan adanya penggolongan visa maka sudah melanggar ketentuan dalam Konvensi Pengungsi yang tidak memperbolehkan adanya diskriminasi dan menyatakan bahwa setiap orang berhak memiliki hak dasar dari HAM dan kebebasan.²⁰

Kemudian di tahun 2011 di masa pemerintahan PM Julia Gillard, Australia kembali melakukan ketidakpatuhan terhadap Konvensi Pengungsi yaitu dengan mengeluarkan kebijakan *Malaysia Solution* yang isinya Australia dan Malaysia bekerja sama menangani masalah pengungsi.²¹ Australia akan mengirimkan 800 para pencari suaka yang berada di lepas pantai Australia ke Malaysia dan sebagai gantinya Australia akan menerima hingga 1000 pengungsi UNHCR setiap tahunnya.²² Dengan adanya pengiriman pengungsi ke Malaysia maka sudah melanggar pasal 33 dari Konvensi pengungsi yang melarang Negara untuk mengembalikan pengungsi ke tempat yang mungkin pengungsi akan mendapatkan persekusi dan ancaman.²³

¹⁸ *Ibid* Page 27.

¹⁹ *Ibid* Page 28.

²⁰ *Ibid* Page 32.

²¹ *Ibid* Page 21.

²² *Ibid*.

²³ *Ibid* Page 32.

Salah satu teori yang digunakan oleh penulis tesis yaitu manajerial berdasarkan Chayes dan Chayes melihat bahwa ketidakpatuhan yang dilakukan oleh Australia adalah hasil dari adanya ambiguitas bahasa perjanjian.²⁴ Di satu sisi perjanjian merupakan instrumen untuk memberikan perlindungan namun di sisi lain, ia tidak memberikan penjelasan yang detail mengenai keadaan setiap pihak yang terlibat.²⁵ Dan hal ini terjadi pada kasus Australia yang mana melihat bahwa definisi dari pengungsi masih bersifat terbatas dan tidak berkembang mengikuti dinamika perkembangan zaman.²⁶

Persamaan antara studi terdahulu kedua dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah sama-sama memiliki topik yang sama yaitu berkaitan dengan ketidakpatuhan Negara terhadap suatu perjanjian internasional. Kemudian persamaan yang kedua adalah menggunakan teori manajerial milik Chayes dan Chayes dalam melihat ketidakpatuhan Negara terhadap perjanjian internasional yang ada. Sehingga dari studi terdahulu kedua berkontribusi bagi penulis dalam memberikan gambaran mengenai teori kepatuhan dan ketidakpatuhan milik Chayes dan Chayes. Hal ini akan membantu penulis dalam mengoperasionisasikan teori pada penelitian ini.

Sedangkan perbedaan antara studi terdahulu kedua dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah fokus penelitian yang mana penulis lebih memfokuskan pada penyebab ketidakpatuhan Kolombia terhadap *Free Trade Agreement* dengan

²⁴ *Ibid* Page 54.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid* Page 55.

Kanada sedangkan studi terdahulu kedua memfokuskan untuk melihat sejauh mana tingkat kepatuhan Australia terhadap Konvensi Pengungsi.

2.2 Kerangka Teoritis

2.2.1 Teori *Compliance* dan *non Compliance*

Ketika suatu Negara setuju untuk ikut dalam suatu perjanjian, maka secara tidak langsung saat itu juga ia memiliki kewajiban untuk menjalankan dan mematuhi perjanjian yang telah disepakati. Jika Negara tidak patuh terhadap suatu perjanjian maka bisa dipastikan ada dua kemungkinan penyebabnya yaitu sengaja dan tidak sengaja. Ada berbagai hal cara untuk mengatasi ketidakpatuhan Negara. Pendekatan *enforcement* misal yang menitikberatkan pada elemen *monitoring* dan sanksi agar Negara patuh.²⁷

Sebaliknya Chayes dan Chayes berpendapat bahwa dalam mengatasi ketidakpatuhan dengan memberikan sanksi seperti yang dilakukan oleh pendekatan *enforcement* bukanlah hal yang efektif.²⁸ Chayes dan Chayes memiliki anggapan bahwa menyelesaikan ketidakpatuhan adalah dengan melalui *capacity building*, interpretasi terhadap peraturan dan transparansi.²⁹ Dalam buku yang ditulis oleh Chayes dan Chayes yang berjudul “*The New Sovereignty: Compliance with International Regulatory Agreements*” menjelaskan teori *compliance* dan *non*

²⁷ Jonas Tallberg, “*Paths to Compliance: Enforcement, Management, and the European Union*”, *International Organization Volume*, Vol 56 Issue 3 Summer 2002, Page 6.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

compliance.³⁰ Melalui teori ini, Chayes dan Chayes menjelaskan beberapa alasan penyebab mengapa Negara patuh dan tidak patuh terhadap suatu Perjanjian.³¹ Dalam penelitian kali ini, penulis akan menggunakan Teori *Compliance and non Compliance* dari Chayes dan Chayes hal ini dikarenakan penulis merasa teori ini cocok dalam menjelaskan kasus yang diangkat oleh penulis.

A. Teori *Compliance*

Menurut Chayes dan Chayes ada beberapa alasan yang menyebabkan suatu Negara patuh terhadap Perjanjian Internasional.³² Yang pertama adalah dari sisi efisiensi yaitu dengan mempertimbangkan keuntungan dan kerugian jika patuh terhadap suatu peraturan.³³ Hal ini dikarenakan dengan patuh terhadap suatu peraturan maka dapat menghemat biaya.³⁴ Kemudian alasan yang kedua adalah adanya keuntungan yang didapat dari mengikuti suatu perjanjian.³⁵ Hal ini mengingat bahwa proses dari pembuatan Perjanjian Internasional diformulasikan dan dibuat dengan tujuan hasil akhir dapat merepresentasikan akomodasi dari kepentingan negara-negara yang terlibat dalam negosiasi pembuatan perjanjian tersebut.³⁶ Sehingga pada akhirnya kepentingan dari masing-masing setidaknya masuk dalam perjanjian yang telah disepakati.

³⁰ Abram Chayes dan Antonia Handler Chayes, *The New Sovereignty: Compliance with International Regulatory Agreements*, Harvard University Press, London, 1995.

³¹ *Ibid* Page 4.

³² *Ibid*.

³³ *Ibid*.

³⁴ *Ibid*.

³⁵ *Ibid*.

³⁶ *Ibid*.

Kemudian alasan terakhir yang menyebabkan Negara patuh adalah norma.³⁷ Bagi suatu Negara yang mematuhi sebuah peraturan merupakan sebuah norma dasar dari hukum internasional atau yang dikenal dengan asas *pacta sunt servanda*.³⁸ Oleh karena itu jika dalam suatu perjanjian terdapat ketentuan-ketentuan dimana Negara secara formal telah menyetujuinya maka hal ini juga menjadi suatu keharusan bagi Negara untuk patuh terhadap perjanjian itu dan menjadikannya pedoman dalam bertindak.³⁹

B. Teori *Non Compliance*

Suatu Negara memutuskan untuk patuh dan tidak patuh terhadap suatu perjanjian tentunya berdasarkan penghitungan keuntungan dan kerugian yang didapatkan, sehingga tindakan ketidakpatuhan dinilai merupakan hal yang direncanakan.⁴⁰ Terkadang alasan suatu Negara ikut dalam suatu perjanjian adalah hanya ingin memenuhi tuntutan dari dunia internasional atau domestik dari Negara itu sendiri dengan sedikit keinginan untuk menjalankannya.⁴¹ Dengan kata lain hanya untuk menyenangkan hati pihak-pihak yang terlibat dan sekedar formalitas saja.

Selain menjelaskan penyebab mengapa Negara patuh terhadap Perjanjian Internasional, Chayes dan Chayes dalam bukunya juga menjelaskan penyebab Negara tidak sengaja untuk tidak patuh terhadap Perjanjian Internasional.⁴² Chayes dan Chayes

³⁷ *Ibid* Page 8.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid* Page 9.

⁴¹ *Ibid.*

⁴² *Ibid* Page 10.

menyebutkan bahwa ada tiga hal yang menyebabkan Negara tidak patuh yaitu dikarenakan *ambiguity and indeteterminacy of treaty language, limitations on the capacity* dan *temporal dimension*.⁴³ Ketiga hal ini akan dijabarkan dalam penjelasan dibawah ini.

- ***Ambiguity***

Ambiguity adalah suatu keadaan dimana bahasa dalam suatu perjanjian tidak menjelaskan suatu hal dengan jelas.⁴⁴ Suatu perjanjian sama halnya seperti peraturan hukum lainnya yang tidak memberikan jawaban yang pasti dan spesifik terhadap kasus sengketa yang ada.⁴⁵ Bahasa seringkali dinilai tidak dapat menggambarkan suatu makna dengan tepat dan akurat.⁴⁶ Hal ini dikarenakan dalam proses pembuatannya sendiri yang tidak jarang jauh dari kata sempurna.

Para konseptor dari Perjanjian Internasional tidak memprediksikan banyaknya kemungkinan dalam mengaplikasikan Perjanjian Internasional dan hanya membiarkannya.⁴⁷ Beberapa masalah yang diprediksi akan muncul terkadang tidak dapat diselesaikan pada saat proses negosiasi perjanjian yang kemudian mendorong untuk diselesaikan dengan cara membuat formula yang bisa diterima oleh masing-masing pihak yang menginginkannya.⁴⁸ Selain itu mereka juga tidak mempertimbangkan bahwa di kedepannya ketika suatu perjanjian telah

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ *Ibid.*

diimplementasikan akan adanya perubahan kondisi ekonomi, teknologi, ilmiah dan tak terkecuali politik.⁴⁹ Hal inilah yang kemudian menghasilkan suatu keadaan dimana bahasa dalam perjanjian ambigu yang tentunya menimbulkan kesulitan dalam memutuskan secara tepat mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak diperbolehkan.⁵⁰

Bahasa yang digunakan dalam merumuskan suatu perjanjian cenderung menggunakan bahasa yang umum yang kemudian menimbulkan interpretasi terhadap isi dari perjanjian semakin luas.⁵¹ Terkadang alasan dipilihnya bahasa yang bersifat umum dalam membuat suatu perjanjian dikarenakan suara yang tidak konsensus.⁵² Atau bisa juga dengan bahasa yang bersifat umum dikarenakan ingin menjelaskan mengenai proses dan bukan menjelaskan secara detail kondisi yang mungkin terjadi di masa yang akan datang.⁵³ Penggunaan bahasa yang bersifat umum pada perjanjian seringkali dinilai lebih efektif dalam memahami peraturan atau klausa yang ada dibandingkan dengan menggunakan bahasa yang bersifat detail.⁵⁴

Di sisi lain, penggunaan bahasa yang detail juga tergolong sulit karena ketika mengungkapkan suatu hal secara detail maka akan tidak mengikutsertakan yang lainnya dan hal ini sering dikenal dengan sebutan *expression unius est exclusion alterius*.⁵⁵ Namun penggunaan bahasa yang detail dalam arti penjelasan peraturan yang

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ *Ibid* Page 10-11.

⁵² *Ibid* Page 11.

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ *Ibid.*

kompleks ketika diterapkan akan mengurangi inefisiensi dengan catatan jika dalam pengimplementasiannya semua berjalan dengan baik dan tidak ada masalah.⁵⁶ Namun jika kondisi politik suatu Negara sedang tidak baik maka hal ini akan menyebabkan masalah dikemudian hari.⁵⁷

Dalam mengimplementasikan suatu perjanjian yang telah disepakati, negara-negara yang terlibat dalam perjanjian tentunya akan menyesuaikan dengan kondisi masing-masing mereka yang berbeda, termasuk di dalamnya dalam memahami makna dari bahasa suatu perjanjian.⁵⁸ Pada sistem hukum domestik, pengadilan atau institusi yang berwenang lainnya diberikan kekuasaan untuk menyelesaikan sengketa mengenai makna dari suatu perjanjian dari masing-masing pihak yang terlibat.⁵⁹ Sedangkan pada sistem hukum internasional dapat memberikan pelayanan untuk memproses kasus di pengadilan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada tentunya dengan persetujuan dari pihak yang terlibat, namun penyelesaian sengketa bersifat otoritatif dengan menggunakan adjudikasi sehingga bukan suatu hal yang sangat dihormati pada level internasional.⁶⁰ Dan seperti halnya aktor legal lainnya, Negara juga memperoleh keuntungan dengan adanya ambiguitas dari bahasa perjanjian untuk menjustifikasi tindakan yang dilakukannya.⁶¹

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ *Ibid* Page 11-12.

⁶¹ *Ibid.*

- *Limitations on Capacity*

Limitations on capacity seringkali menjadi salah satu alasan mengapa Negara tidak patuh terhadap suatu perjanjian. Adanya keterbatasan kapasitas baik dalam hal birokrasi maupun finansial menjadi hambatan yang dihadapi oleh negara-negara tak terkecuali Negara yang maju sekalipun.⁶² Dengan adanya keterbatasan kapasitas kemudian mendorong negara-negara maju khususnya menempatkan adanya keterbatasan sebagai prioritas bagi mereka untuk dimasukkan ke dalam daftar agenda dengan alasan sistem yang mereka miliki masih belum mencapai tujuan atau memenuhi ekspektasi mereka.⁶³ Masalah ini juga dihadapi Negara berkembang yang memiliki keterbatasan dalam berbagai hal mulai dari pengetahuan, teknis, birokrasi hingga keuangan yang mana hal ini penting dan diperlukan dalam mengimplementasikan perjanjian yang telah disepakati dan menerapkannya dalam domestik Negara tersebut.⁶⁴

Dalam mengimplementasikan suatu perjanjian, tentunya negara-negara membawa hal ini kedalam peraturan domestik mereka atau dengan kata lain mengadopsinya kedalam UU mereka yang mana untuk menjalankan hal ini diperlukan pula regulasi administratif yang detail dan upaya untuk penegakkan yang kuat.⁶⁵ Dengan kata lain memerlukan birokrasi yang memadai dalam menjalankannya.⁶⁶ Selain diperlukan birokrasi adanya kondisi finansial yang mencukupi juga ikut

⁶² *Ibid* Page 14.

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ *Ibid.*

berperan penting yang kemudian tidak jarang negara-negara berkembang khususnya yang memiliki keterbatasan finansial mendapatkan bantuan baik finansial maupun teknis dari negara-negara maju setelah menandatangani suatu perjanjian agar nantinya mereka dapat mengejar keterbatasan mereka dalam mengimplementasikan suatu perjanjian.⁶⁷

- ***The Temporal Dimensions***

Dalam menjalankan suatu perjanjian tidak dapat dipungkiri bahwa nantinya akan ada perubahan-perubahan yang mana hal ini berpengaruh pada ketidakpatuhan Negara terhadap perjanjian tersebut.⁶⁸ Perubahan-perubahan ini dari berbagai aspek mulai dari adanya perubahan politik, perubahan ekonomi dan perubahan sosial yang mana hal ini dikenal dengan sebutan *the temporal dimensions*.⁶⁹ Seringkali ketiga elemen tersebut menjadi hambatan bagi Negara untuk patuh terhadap perjanjian.⁷⁰

Jika pada proses menjalankan suatu perjanjian menghadapi adanya perubahan-perubahan politik, ekonomi dan sosial maka berbeda dengan awal perumusan perjanjian. Seringkali awal mula proses pembuatan suatu perjanjian, khususnya pada sesi negosiasi para konseptor memahami diperlukan adanya jeda waktu setelah perjanjian disepakati.⁷¹ Hal ini bertujuan agar masing-masing pihak bisa beradaptasi dengan perjanjian yang telah disepakati.⁷² Hal ini bisa dibilang masa transisi setelah perjanjian dibuat dengan alasan agar nantinya semua pihak yang terlibat dalam

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ *Ibid* Page 15

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ *Ibid.*

⁷¹ *Ibid.*

⁷² *Ibid.*

pembuatan perjanjian dapat patuh.⁷³ Terkadang dalam suatu perjanjian dipersiapkan adanya peraturan transisi serta adanya tunjangan khusus untuk beberapa keadaan tertentu.⁷⁴ Namun terlepas disediakannya atau tidak peraturan transisi dan tunjangan khusus, masa transisi selalu diperlukan yang mana hal ini menunjang agar kedepannya Negara dapat menjalankan isi dari perjanjian dengan baik.⁷⁵

2.3 Operasionalisasi Teori

2.3.1 *Ambiguity*

Didasarkan pada penjelasan diatas, variabel *ambiguity* memiliki dua indikator. Indikator yang pertama adalah bahasa dalam perjanjian yang bersifat umum, dimana hal ini bisa dilihat bahwa dalam perjanjian yang tidak menjelaskan suatu hal dengan jelas dan detail. Jika kita kaitkan dengan kasus ini, penulis akan melihat sejauh mana bahasa dalam CCOFTA pada bagian investasi khususnya dari pasal 805 yang berkaitan dengan perlakuan standar minimum dan pasal 811 yang berkaitan dengan pengambilalihan untuk kepentingan masyarakat. Kedua pasal tersebut merupakan pasal yang dilanggar oleh Pemerintah Kolombia.

Kemudian indikator yang kedua adalah berkaitan dengan adanya ketidaksesuaian konteks dari klausa pada pasal perjanjian yang dilanggar yaitu pasal 805 dan 811. Tidak dapat dipungkiri bahwa adanya perubahan kondisi baik ekonomi, sosial dan politik yang kemudian mendorong konteks dari klausa pada pasal 805 dan

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ *Ibid.*

pasal 811 tidak sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Dengan adanya bahasa dalam perjanjian yang bersifat umum serta adanya ketidaksesuaian konteks klausa dalam perjanjian dengan kondisi yang ada mengakibatkan adanya perbedaan interpretasi yaitu dimana kedua belah pihak baik Negara Kolombia maupun Eco Oro selaku investor memiliki perbedaan pandangan dalam memaknai arti dari pasal-pasal perjanjian FTA Kanada dengan Kolombia, khususnya bagian investasi pasal 805 dan 811 yang ada. Ketika hal ini terjadi maka akan mendorong Negara untuk tidak patuh yang mana hal ini dilakukan oleh Negara Kolombia dengan melakukan pengambilalihan secara tidak langsung.

2.3.2 Limitations on Capacity

Berdasarkan pada penjelasan diatas, jika kita kaitkan dengan kasus yang akan diteliti oleh penulis maka penulis akan menggunakan dua indikator yaitu adanya keterbatasan dari segi birokrasi dan finansial untuk menjelaskan penyebab Negara Kolombia melakukan pengambilalihan tidak langsung yang mana hal ini tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Untuk indikator pertama yaitu keterbatasan birokrasi, penulis akan melihat adanya ketidaksinambungan dari kedua institusi yang ada berkaitan dengan regulasi penentuan zona untuk melakukan aktivitas tambang yang melibatkan Kementerian Pertambangan dan Energi serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan. Kemudian pada indikator keterbatasan finansial penulis akan melihat ada tidaknya dari Pemerintah Kolombia dalam mengalokasikan dana untuk mengimplementasikan pasal-pasal FTA Kanada dan Kolombia yang telah disepakati, khususnya bagian investasi.

2.3.3 Temporal Dimensions

Dari penjelasan diatas jika kita kaitkan dengan kasus yang akan diteliti makan pada variabel yang terakhir ini, penulis akan menggunakan tiga indikator yaitu adanya perubahan politik, ekonomi dan sosial yang terjadi di Negara Kolombia sehingga hal ini menyebabkan Pemerintah Kolombia melakukan pengambilalihan tidak langsung terhadap Proyek Angostura. Indikator pertama yaitu adanya perubahan politik yaitu dengan adanya pergantian rezim kepemimpinan dari Negara Kolombia yang kemudian berakibat pada perubahan kebijakan terkait pertambangan dan lingkungan.

Kemudian indikator yang kedua adalah adanya perubahan ekonomi dari Negara Kolombia yaitu dengan adanya penurunan ekspor komoditas tambang seperti emas dan perak di Negara Kolombia serta kondisi FDI di bidang tambang. Selanjutnya indikator yang terakhir yaitu adanya perubahan sosial yang terjadi di Negara Kolombia dimana masyarakat Kolombia melakukan tuntutan terhadap Pemerintah Kolombia untuk menghentikan aktivitas aktivitas tambang Proyek Angostura dikarenakan proyek tersebut terletak di kawasan ekosistem Paramo, yang mana ekosistem tersebut termasuk dalam kawasan yang dilindungi.

Tabel 1 Operasionalisasi Konsep *non Compliance* Chayes dan Chayes

Variabel	Indikator	Operasionalisasi
<i>Ambiguity</i>	Bahasa dalam perjanjian yang bersifat umum	Bahasa yang digunakan dalam CCOFTA khususnya bagian investasi pasal 805 & 811 tidak

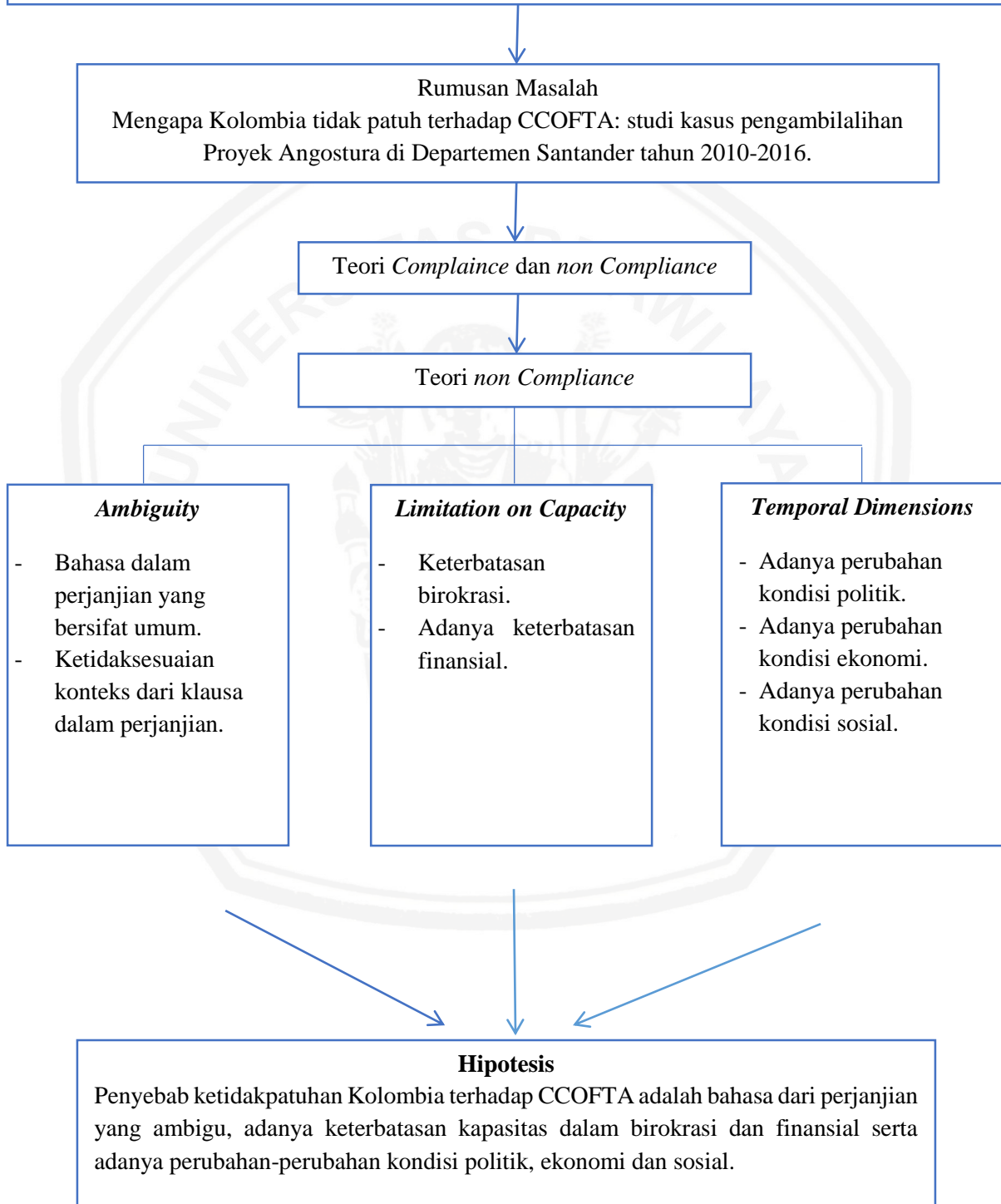
		menjelaskan suatu hal dengan jelas dan detail.
	Ketidaksesuaian konteks dari klausa dalam perjanjian	Ketidaksesuaian konteks dari klausa dalam perjanjian, khususnya pasal 805 & 811 dalam CCOFTA dengan kondisi yang ada.
<i>Limitation on Capacity</i>	Keterbatasan birokrasi	Adanya ketidaksinambungan antara Kementerian Pertambangan dan Energi serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan berkaitan dengan regulasi zonasi untuk pelaksanaan aktivitas tambang.
	Keterbatasan finansial	Ada tidaknya alokasi dana dari Negara Kolombia untuk mengimplementasikan pasal-pasal FTA yang telah disepakati dengan

		Negara Kanada, khususnya bagian investasi.
<i>Temporal Dimensions</i>	Perubahan kondisi politik	Adanya pergantian rezim kepemimpinan di Kolombia.
	Perubahan kondisi ekonomi <ul style="list-style-type: none"> • FDI • Perdagangan (ekspor) 	Penurunan ekspor komoditas tambang (emas dan perak) Negara Kolombia.
	Perubahan kondisi sosial	Adanya tuntutan dari masyarakat untuk menghentikan aktivitas tambang Proyek Angostura dikarenakan proyek tersebut terletak di kawasan yang dilindungi.

Sumber: Abram Chayes & Antonia Handler Chayes, *"The New Sovereignty Compliance with International Regulatory Agreements"*.

2.4 Alur Pemikiran

Konstitusi Kolombia mengeluarkan keputusan untuk menghapus pengecualian pelarangan aktivitas tambang yang sebelumnya jika berdasarkan Resolusi no 2090 & UU 1753 Eco Oro dapat beraktivitas. Hal ini kemudian mendorong Eco Oro membawa masalah ini ke ICSID dikarenakan tidak ada kesepakatan yang dicapai dengan pihak Kolombia.



2.5 Hipotesis

Penyebab ketidakpatuhan Kolombia terhadap CCOFTA adalah bahasa dari perjanjian yang ambigu, kemudian adanya keterbatasan kapasitas dalam birokrasi dan finansial serta adanya perubahan-perubahan kondisi politik, ekonomi dan sosial. Sehingga hal ini mendorong Kolombia melanggar dari perjanjian FTA yang sudah disepakati.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian yang berjudul “Analisis Ketidakpatuhan Kolombia terhadap *Canada Colombia Free Trade Agreement* (CCOFTA): Studi Kasus Pengambilalihan Proyek Tambang Angostura di Departemen Santander tahun 2010-2016” ini merupakan sebuah penelitian kualitatif eksplanatif. Hal ini dikarenakan pada penelitian ini berusaha untuk mencari penyebab fenomena yang ada menjawab pertanyaan “mengapa”.¹ Dengan metode eksplanatif, penulis akan mencoba menjelaskan penyebab ketidakpatuhan Kolombia CCOFTA dengan studi kasus pengambilalihan Proyek Angostura di Departemen Santander tahun 2010-2016.

3.2 Ruang Lingkup Penelitian

Untuk membatasi agar tidak terlalu luas ruang lingkup penelitiannya, maka diperlukan adanya ruang lingkup penelitian untuk membatasi jangka waktu dari penelitian. Ruang lingkup dalam penelitian ini dibatasi dari tahun 2010 hingga 2016, namun kemungkinan besar akan menggunakan data dari periode sebelumnya sebagai pembanding dan memperkuat analisis yang ada. Penulis memilih ruang lingkup

¹ Mohtar Mas' oed, *Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi*, LP3ES, Jakarta, 1994, Page 264.

dimulai dari tahun 2010 dikarenakan di tahun tersebut Kolombia mulai mengeluarkan UU 1382 yang melarang adanya aktivitas penambangan di ekosistem Paramo yang berdampak pada investasi yaitu aktivitas tambang yang dilakukan oleh Eco Oro. Namun UU 1382 tidak berhasil diimplementasikan yang kemudian diimplementasikan pada UU berikutnya yaitu UU 1450 yang memuat materi yang sama dengan UU 1382 dan dikeluarkan pada tahun 2011.

Sedangkan tahun 2016 menjadi batasan penelitian dikarenakan di tahun tersebut merupakan puncak permasalahan, ketika Kolombia pada akhirnya melarang aktivitas penambangan di ekosistem Paramo dan hal ini berlaku universal tanpa ada pengecualian. Kemudian hal ini berlanjut ketika proses negosiasi yang tidak menemui titik terang sehingga di tahun yang sama, tepatnya pada bulan Desember Eco Oro membawa permasalahan ini ICSID.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kali ini, penulis akan menggunakan teknik pengumpulan data studi pustaka. Penulis menggunakan jenis data sekunder yang bersumber dari buku, tesis, berita, internet dan laporan yang berhubungan dengan topik dan kasus pada penelitian.

3.4 Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif untuk menganalisis data yang ada. Teknik analisis data kualitatif terdiri dari beberapa tahap, diantaranya adalah:

1. Tahap yang pertama adalah kondensasi data, dimana pada tahap ini penulis meringkas dan memilih dari seluruh data yang ada.² Mulai dari dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kolombia, kemudian laporan sengketa investasi, tesis, jurnal hingga berita maupun artikel internet yang berkaitan dengan pengambilalihan Proyek Tambang Angostura yang dilakukan oleh Pemerintah Kolombia.
2. Tahap yang kedua adalah penyajian data, dimana pada tahap ini menyajikan data yang berhubungan dengan kasus penelitian yang disajikan secara terorganisir baik dalam bentuk grafik dan tabel yang nantinya bermanfaat dalam proses pembuatan kesimpulan.³ Pada penelitian kali ini, penulis menyajikan data sesuai dengan rumusan masalah yang nantinya dengan penyajian data tersebut ditujukan untuk mampu menjawab dari rumusan masalah yang ada.
3. Tahap yang ketiga adalah interpretasi dari data yang ada yang kemudian menjelaskannya dalam penjelasan yang padat dan jelas.⁴ Dalam penelitian ini, penulis melakukan interpretasi terhadap data yang ada yaitu berupa grafik serta

² Mathew B. Miles, A. Michael Huberman, Johnny Saldana, *Qualitative Data Analysis A Method Sourcebook Third Edition*, Sage Publications, USA, 2014, Page 7

³ *Ibid* Page 7-8.

⁴ *Ibid*.

tabel yang kemudian penulis korelasikan dengan analisis yang ada yang kemudian dijelaskan dalam penjelasan yang padat dan jelas.

4. Tahap yang terakhir adalah menarik kesimpulan dan verifikasi, dimana setelah melakukan ketiga tahap di atas pada akhir penelitian dapat ditarik kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah yang ada.⁵ Pada penelitian ini penulis menuliskan kesimpulan yang mana dari kesimpulan itu menjawab dari rumusan masalah yang ada.

3.5 Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini akan terdiri dari 6 bab. Berikut ini adalah sistematika penulisan dari penelitian:

BAB I PENDAHULUAN

Bab pertama dalam penelitian ini berisi latar belakang dari penelitian yang meliputi perjalanan awal investasi Eco Oro di Kolombia hingga dikeluarkannya beberapa aturan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kolombia, kemudian pasal-pasal dalam CCOFTA yang dilanggar oleh pemerintah Kolombia dan kontribusi yang telah dilakukan oleh Eco Oro terhadap pemerintah Kolombia, khususnya Departemen Santander yang menjadi lokasi Proyek Angostura. Selain itu Bab pertama juga berisi rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

⁵ *Ibid.*

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab kedua dalam penelitian ini terdiri dari beberapa sub bab yaitu studi terdahulu yang memiliki kesamaan kasus dan teori yang digunakan dalam penelitian, kemudian teori yang digunakan dalam penelitian, kemudian pengoperasionalisasian teori pada penelitian, kemudian dilanjutkan dengan alur pemikiran terhadap penelitian dan yang terakhir adalah hipotesis dari penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ketiga dalam penelitian menjelaskan tentang jenis penelitian, ruang lingkup penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data serta sistematika penulisan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis.

BAB IV GAMBARAN UMUM

Bab keempat dalam penelitian berisi gambaran umum mengenai CCOFTA mulai dari awal pembentukan hingga diimplementasikannya, kemudian gambaran mengenai perusahaan Eco Oro serta penjelasan mengenai aktivitas tambang di Kolombia.

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab kelima dalam penelitian berisikan penjelasan secara menyeluruh penyebab ketidakpatuhan Kolombia terhadap *Free Trade Agreement* (FTA) dengan Kanada dengan mengambilalih Proyek Angostura pada periode 2010-2016

BAB IV

GAMBARAN UMUM TENTANG CCOFTA DAN PERKEMBANGAN INDUSTRI TAMBANG EMAS DI KOLOMBIA

Pada bab ini, penulis akan menjelaskan beberapa gambaran umum berkaitan dengan studi kasus yang akan dibahas oleh penulis. Hal ini ditujukan agar memberi kemudahan bagi para pembaca untuk memahami isi tulisan penulis. Gambaran umum tersebut yaitu: 1.) gambaran umum CCOFTA sebagai perjanjian kerjasama antara Kanada dan Kolombia; 2.) gambaran umum perkembangan industri tambang emas di Kolombia.

4.1 Gambaran Umum CCOFTA Sebagai Perjanjian Kerjasama antara Kanada dan Kolombia

Canada-Colombia Free Trade Agreement (CCOFTA) atau perjanjian kerja sama perdagangan bebas antara Kanada dengan Kolombia dibentuk dengan tujuan sama halnya dengan kerja sama perdagangan bebas lainnya yaitu untuk mempermudah aktivitas perdagangan barang jasa serta investasi. Kerja sama ini berawal dari adanya penandatanganan perjanjian kerja sama perdagangan dan investasi atau *Trade Investment Cooperation Agreement* (TICA) yang melibatkan antara Negara Kanada

dengan negara-negara yang tergabung dalam *Andean Community*, yaitu Bolivia, Kolombia, Ekuador, Peru dan Venezuela.¹

Penandatanganan TICA dilaksanakan pada 31 Mei 1999 yang berlangsung di Ottawa, Kanada.² Kemudian dari TICA berlanjut di tahun 2002 tepatnya pada 07 Agustus, pemerintah Kanada menyatakan keinginannya untuk melakukan pembicaraan awal berkaitan dengan kerja sama perdagangan bebas dengan negara-negara anggota Komunitas Andean.³ Hal ini kemudian disambut baik dengan negara-negara anggota Komunitas Andean, khususnya Negara Kolombia dan Peru yang menyatakan akan memulai negosiasi perjanjian perdagangan bebas pada 07 Juni 2007.⁴ Setelah melewati 5 putaran negosiasi (20 Juli 2007, 10 September 2007, 05 Oktober 2007, 04 Desember 2007, 07 Maret 2008), akhirnya tepat pada 06 Juni 2008 Negara Kanada dan Kolombia menyelesaikan negosiasi perjanjian kerja sama perdagangan bebas.⁵

Hal ini kemudian berlanjut pada 21 November 2008 kedua Negara melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama perdagangan bebas yang diikuti dengan perjanjian kerja sama lainnya seperti kerja sama lingkungan dan buruh.⁶ Penandatanganan dilakukan oleh PM Stephen Harper yang mewakili Negara Kanada

¹ SICE Foreign Trade Information System, *Canada-Colombia*, http://www.sice.oas.org/TPD/AND_CAN/CAN_COL_e.ASP, Diakses Pada 26 Mei 2018 Pada Pukul 11.29 WIB.

² *Ibid.*

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

dan Presiden Alvaro Uribe yang mewakili Negara Kolombia.⁷ Penandatanganan sendiri dilakukan ditengah pertemuan APEC yang dilaksanakan di kota Lima, Peru.⁸

Kemudian setelah penandatanganan, proses ini berlanjut pada fase implementasi yaitu mengesahkan CCOFTA pada level domestik dari kedua Negara yang dimulai dengan Pemerintah Kanada melakukan proses legislasi di *House of Common* pada Maret 2009.⁹ Sedangkan Negara Kolombia, tepat pada Agustus 2009 CCOFTA telah disetujui oleh Senat dan *chamber of representative* atau dikenal dengan *lower house* dari Kolombia yang kemudian dikirimkan ke Presiden.¹⁰ Kemudian hal ini berlanjut pada 10 Maret 2010, Pemerintah Kanada yang mengajukan UU untuk mengimplementasikan CCOFTA yang kemudian pada akhirnya Pemerintah Kanada mengumumkan bahwa legislasi untuk mengimplementasikan CCOFTA telah menerima *Royal Assent* atau dengan kata lain mendapatkan persetujuan dari kedua majelis.¹¹

Hal ini berlanjut hingga 15 Agustus 2011 CCOFTA mulai resmi diberlakukan.¹² Pengumuman resmi diberlakukannya CCOFTA sendiri dikeluarkan bertepatan dengan kunjungan dari PM Harper ke negara-negara Amerika Latin.¹³

⁷ CTV News, *Canada Signs Free-Trade Agreement with Colombia*, <https://www.ctvnews.ca/canada-signs-free-trade-agreement-with-colombia-1.344878>, Diakses Pada 02 Juni 2018 Pada Pukul 19.28 WIB.

⁸ *Ibid.*

⁹ SICE Foreign Trade Information System, *Loc.Cit.*

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

¹³ Cox & Palmer, *International Trade Update: Canada-Colombia Free Trade Agreement Implementation*, https://www.coxandpalmerlaw.com/site/media/coxandpalmer/Trade_Newsletter.pdf, Diakses Pada 30 Mei 2018 Pada Pukul 16.33 WIB.

Setelah resmi diberlakukan, kedua Negara melakukan pertemuan pertama *Joint Commission* perdagangan bebas pada 28 Februari 2014 yang mana hal ini merupakan salah satu bentuk implementasi dari CCOFTA yang telah disepakati.¹⁴

Secara garis besar pasal dalam CCOFTA terdiri dari 23 bagian yang membahas mulai dari masalah pengurangan tarif, pajak, investasi, lingkungan, *e-commerce*, jasa telekomunikasi, *government procurement* hingga perihal penyelesaian sengketa.¹⁵ Dengan adanya CCOFTA sedikit banyak memberikan dampak yang signifikan bagi kelancaran perdagangan barang dan jasa serta investasi dari kedua Negara. Berdasarkan data menyebutkan bahwa perdagangan barang (ekspor dan impor) dari Kanada dan Kolombia dari tahun 2000-2011 mengalami peningkatan yang signifikan dan tergolong stabil.¹⁶

¹⁴ SICE Foreign Trade Information System, *Loc.Cit.*

¹⁵ World Bank, *Loc.Cit.*

¹⁶ Embassy of Canada to Colombia, *Annual Report Pursuant to the Agreement concerning Annual Reports on Human Rights and Free Trade between Canada and the Republic of Canada for the Period January 1, 2012 - December 31 2012*, http://www.canadainternational.gc.ca/colombia-colombie/bilateral_relations_bilaterales/rep-hrft-co_2012-dple-rapp.aspx?lang=eng Diakses Pada 26 Mei 2018 Pada Pukul 11.53 WIB.

Tabel 1 Ekspor-Impor Kanada dan Kolombia 2000-2011.¹⁷

Canada's Merchandise Trade with Colombia, 2000-2011
(C\$ million)

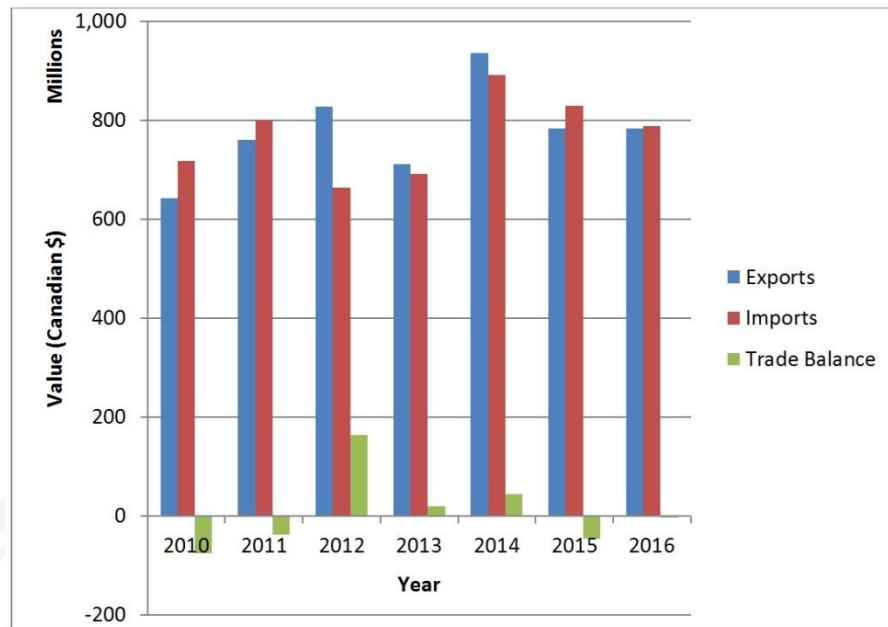
Year	Exports	Imports	Total Trade	Trade Balance
2000	309.6	331.8	641.4	-22.3
2001	365.9	415.5	781.3	-49.6
2002	343.5	393.0	736.5	-49.5
2003	307.6	373.9	681.5	-66.2
2004	387.1	418.6	805.7	-31.5
2005	448.2	583.6	1,031.8	-135.4
2006	513.2	640.4	1,153.6	-127.2
2007	662.3	468.6	1,130.8	193.7
2008	708.8	638.8	1,347.6	70.1
2009	592.0	733.6	1,325.6	-141.6
2010	642.3	717.3	1,359.5	-74.9
2011	760.9	799.7	1,560.6	-38.8

Sumber: *Embassy of Canada to Colombia.*

Dari tabel di atas bisa dilihat bahwa dalam kurun waktu 11 tahun, yaitu masa dimana sebelum CCOFTA diimplementasikan, aktivitas perdagangan barang dari kedua Negara mengalami peningkatan dan tergolong stabil yang mana jika terjadi penurunan tidak secara signifikan.

¹⁷ *Ibid.*

Grafik 1 Ekspor-Import Kanada-Kolombia 2010-2016.¹⁸



Sumber: *Embassy of Canada to Colombia.*

Kemudian di tahun 2012 perdagangan barang kedua Negara mengalami perubahan, yaitu kenaikan yang tergolong stabil dimana tahun ini merupakan *pasca* diimplementasikannya CCOFTA tahun 2011.¹⁹ Hal ini bisa dilihat pada grafik di atas. Di tahun 2016 terjadi penurunan impor dari Negara Kanada sebesar 5% khususnya dalam komoditi BBM.²⁰ Namun, jika kita lihat di tahun 2016 terjadi peningkatan perdagangan barang sebesar 16% atau mencapai C\$ 1,57 M jika dibandingkan dengan tahun 2010, yaitu tahun sebelum diimplementasikannya CCOFTA.²¹

¹⁸ Embassy of Canada to Colombia, *Annual Report Pursuant to the Agreement concerning Annual Reports on Human Rights and Free Trade between Canada and the Republic of Colombia for the Period January 1, 2016 - December 31, 2016*, http://www.canadainternational.gc.ca/colombia-colombie/bilateral_relations_bilaterales/rep-hrft-co_2016-dple-rapp.aspx?lang=eng, Diakses Pada 26 Mei 2018 Pada Pukul 11.47 WIB.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

Kolombia sendiri merupakan salah satu mitra perdagangan penting bagi Kanada yang berada di urutan ke lima terbesar di antara negara-negara kawasan Amerika Latin dan Karibia (tidak termasuk Meksiko).²² Pada dasarnya, komoditas ekspor utama Kanada adalah gandum, mesin kendaraan, kertas, kacang-kacangan dan pupuk.²³ Sedangkan komoditas ekspor utama Kolombia adalah BBM dan minyak (batu bara dan minyak mentah), kopi, teh, rempah-rempah, tanaman, bunga potong, pisang dan plastik.²⁴ Secara keseluruhan mayoritas ekspor Kolombia ke Kanada lebih mengarah pada komoditas pertanian. Sedangkan mayoritas ekspor Kanada ke Kolombia lebih ke arah komoditas mesin.

Dengan diimplementasikannya CCOFTA di tahun 2011, tentunya akan berdampak pada sektor perdagangan khususnya yaitu dengan penurunan tarif pajak yang ekspor dan impor. Yang tentunya memang dasar dari dibentuknya CCOFTA adalah perdagangan bebas antara Negara Kanada dan Kolombia yang mana untuk mencapai efisiensi dan kemudahan dalam melakukan perdagangan, khususnya ekspor dan impor.

²²The Canadian Trade Commissioner Service, *Trade Commissioner Service - Colombia*, <http://tradecommissioner.gc.ca/colombia-colombie/index.aspx?lang=eng>, Diakses Pada 26 Mei 2018 Pada Pukul 11.25 WIB.

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

Tabel 2 Eliminasi Tarif CCOFTA.²⁵

Staging Category	# Lines	% Lines	2008 Canadian Imports from Colombia (US\$, Mil)	2016 Canadian Imports from Colombia (US\$, Mil)	% 2008 Canadian Imports from Colombia	% 2016 Canadian Imports from Colombia	Product Examples
A (Immediate duty-free)	8138	96.6%	605.043	784.50	99.8%	99.6%	Fresh cut flowers, most textiles, apparel, furniture, industrial and electrical machinery
B (3-year linear)	19	0.2%	0.201	0.418	0.0%	0.5%	Spent fowl, some footwear (e.g., waterproof, sport, work boots, footwear with metal toe cap)
C (7-year linear)	156	1.9%	0.179	1.9	0.0%	0.2%	Within-access supply management tariff lines; rubber gloves, all other textiles (that are not in A), ships, furnishings made of textiles
D17 (17-year linear)	1	0.0%	0.655	0.843	0.1%	0.11%	Refined sugar (tariff line 1701.99.00: refined, not containing added flavouring/colouring matter)
E (Excluded)	110	1.3%	0.061	00	0.0%	0.0%	Over-access supply management tariff lines (dairy, poultry and eggs) from tariff reduction; other refined sugar tariff items
Total	8424	100.0%	606.141		100.0%		

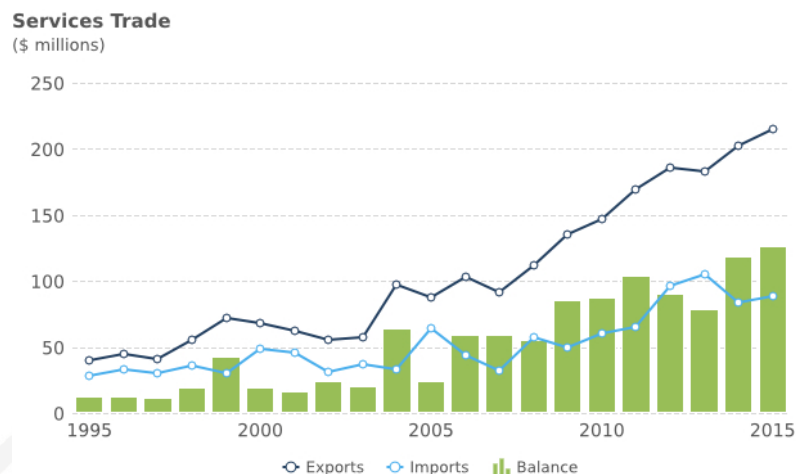
Sumber: *Embassy of Canada to Colombia.*

Dari tabel di atas bisa dilihat bahwa setidaknya sekitar 45,2% *tariff lines* (jumlah produk) yang masuk ke kedua Negara menjadi bebas pajak, yang kemudian disusul dengan sekitar 2,1% *tariff lines* akan bebas pajak yang akan diberlakukan secara bertahap mulai dari 3, 7 hingga 17 tahun.²⁶ Sehingga total ada sekitar 96,6% produk yang bebas pajak (51,4% produk telah bebas pajak sesuai dengan ketentuan WTO *most favoured Nations*) dan 1,3% produk yang terkena pajak.²⁷

²⁵ Embassy of Canada to Colombia, *Loc.Cit.*

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

Grafik 2 Perdagangan Jasa Kanada Kolombia 1995-2015.²⁸

Sumber: *Parliament of Canada*.

Peningkatan perdagangan juga berlaku juga pada sektor jasa, hal ini dibuktikan dengan data dari Parlemen Kanada yang menunjukkan bahwa *pasca* diimplementasikannya CCOFTA di tahun 2011, terjadi peningkatan perdagangan jasa dari kedua Negara.²⁹ Hal ini dapat dilihat pada grafik di atas. Perdagangan jasa dari kedua Negara meliputi pariwisata, transportasi dan komersial.³⁰ Ekspor perdagangan jasa dari Kanada ke Kolombia mengalami peningkatan yang cukup stabil.³¹ Sedangkan ekspor perdagangan jasa dari Kolombia ke Kanada sempat mengalami penurunan dari tahun 2013 ke 2014, namun kembali meningkat di tahun selanjutnya.³²

²⁸ Florian Richard, *Trade and Investments Series 2016-Canadian Trade and Investment Activity: Canada-Colombia*, <https://lop.parl.ca/Content/LOP/ResearchPublications/2017-574-e.html#show/hide>, Diakses Pada 05 Juni 2018 Pada Pukul 07.48 WIB.

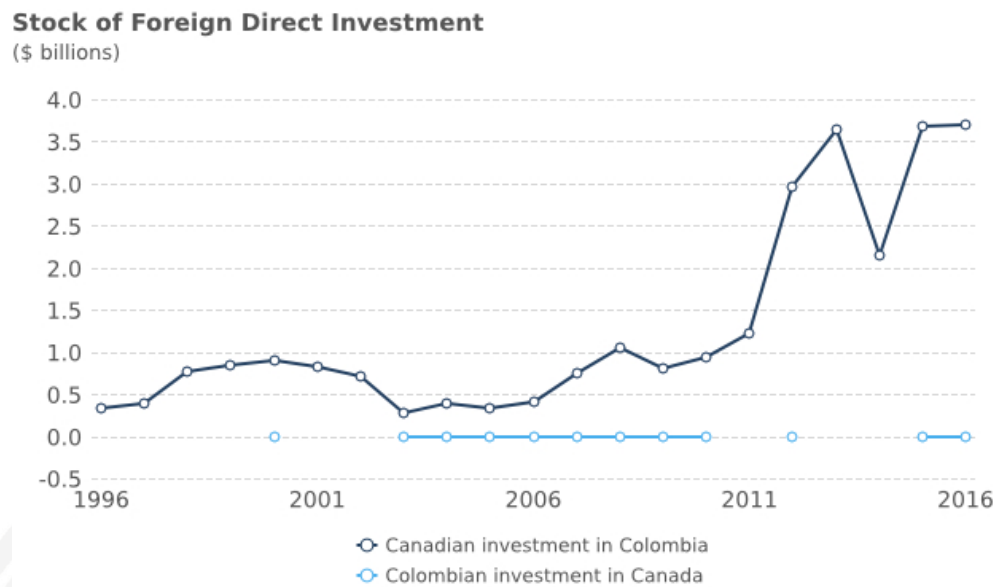
²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*

Grafik 3 FDI Kanada-Kolombia 1996-2016.³³



Sumber: *Parliament of Canada*.

Kemudian yang terakhir selain dari adanya perdagangan barang dan jasa, CCOFTA juga menyangkut perihal FDI di kedua Negara (investasi dari Kanada ke Kolombia dan sebaliknya). Jika kita lihat pada grafik di atas, pada tahun 2011 pasca diimplementasikannya CCOFTA FDI dari Kanada ke Kolombia meningkat drastis, dimana di tahun 2011 FDI Kanada ke Kolombia sebesar \$1,2 M meningkat menjadi \$3 M pada tahun 2012 atau hampir 2 kali lipat.³⁴ Pada dasarnya FDI dari kedua Negara jika dibandingkan dengan awal masuk FDI, yaitu di tahun 1987 jumlah FDI masih sebesar \$20 juta, sedangkan di tahun 2016 FDI mencapai \$3,7 M.³⁵ FDI di kedua

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*

Negara sendiri lebih di dominasi oleh FDI Kanada ke Kolombia, sedangkan FDI Kolombia ke Kanada tidak terlalu signifikan.³⁶

4.2 Gambaran Umum Perkembangan Industri Tambang Emas di Kolombia

Sektor pertambangan seringkali menjadi salah satu elemen penting yang berkontribusi terhadap perekonomian suatu Negara, khususnya bagi Negara berkembang dan Negara kurang berkembang. Afrika dan Amerika Latin misal yang mulai menganggap bahwa sektor pertambangan merupakan hal yang penting dan sedikit banyak berkontribusi terhadap perekonomian mereka.³⁷ Hal ini juga berlaku bagi Kolombia, dimana sektor pertambangan berkontribusi sekitar 2,1% dari GDP Kolombia di tahun 2016.³⁸ Kemudian sektor tambang menyumbang sekitar 22% atau sebesar \$6,8 M dari total ekspor Kolombia.³⁹ Untuk komoditas emas dan logam mineral menyumbang sekitar 18% dari total GDP kontribusi sektor pertambangan.⁴⁰

Aktivitas tambang emas sendiri bukanlah suatu hal yang baru bagi Negara Kolombia. Sejarah mencatat sekitar tahun 1600 Kolombia dijajah oleh Spanyol dengan tujuan mencari kebenaran mitos El Dorado.⁴¹ Mitos El Dorado sendiri bercerita tentang

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Juan Diego Alvarez, *Big Industry Small Rules. The Mining Industry in Colombia*, Volume 5, Issue I, 2013, Page 2.

³⁸ Agencia Nacional de Minería, *Colombia "the Answer" for Mining Investment Opportunities*, Page 5, <https://www.anm.gov.co/sites/default/files/DocumentosAnm/ladu2017presentation.pdf>, Diakses Pada 11 Juni 2018 Pada Pukul 22.38 WIB.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Diego Ibarra Sanchez, *Illegal Gold Mining Fuels Violence in Colombia*, <https://www.aljazeera.com/indepth/inpictures/2016/10/illegal-gold-mining-fuels-violence-colombia-161005063014208.html>, Diakses Pada 06 Juni 2018 Pada Pukul 11.42 WIB.

kota yang hilang yang semuanya berisikan emas.⁴² Dan pada masa pencarian itu lah Bangsa Spanyol juga menambang emas di Kolombia dengan menjadikan masyarakat lokal Kolombia sebagai budak penambang emas.⁴³ Dengan adanya penjajahan yang dilakukan Bangsa Spanyol setidaknya mewariskan dan mengajarkan teknik menambang emas secara sederhana yang kemudian hal ini digunakan oleh masyarakat Kolombia secara turun temurun.⁴⁴

Jika kita lihat maka Kolombia memiliki latar belakang historis yang kuat terhadap aktivitas tambang khususnya tambang emas. Namun *pasca* penjajahan, Kolombia masih belum terlalu fokus terhadap sektor pertambangan.⁴⁵ Investasi asing pada sektor tambang sendiri dimulai sejak pertengahan tahun 1950, dimana pada masa ini untuk pertama kalinya Kolombia tidak hanya mengeksplorasi minyak tetapi juga mineral.⁴⁶ Berawal dari adanya penemuan tambang nikel di tahun 1940 oleh perusahaan minyak Shell yang terletak di daerah sungai San Jorge hal ini kemudian mendorong adanya investor asing yang mulai masuk untuk melakukan aktivitas tambang nikel.⁴⁷ Namun jika dibandingkan dengan investasi asing yang saat ini tentunya hal ini sangat berbeda dari segi jumlah dan total kontrak yang ada.

⁴² Dr Jago Cooper, *El Dorado: the Truth Behind the Myth*, <https://www.bbc.com/news/magazine-20964114>, Diakses Pada 11 Juni 2018 Pada Pukul 23.14 WIB.

⁴³ Diego Ibarra Sanchez, *Loc.Cit*.

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Luis Ernesto Rodriguez A, *Loc.Cit*, Page 2

⁴⁶ Eduardo Alexander Duque Grisales, et al, *Mining in Colombia: A Review of the Calculation of Government Take*, <http://www.revistaespacios.com/a15v36n16/15361610.html>, Diakses Pada 28 Oktober 2018 Pada Pukul 11.05 WIB.

⁴⁷ *Ibid.*

Pertengahan tahun 1970 menjadi titik awal dari Kolombia untuk lebih fokus terhadap sektor pertambangan yang mana hal ini ditunjukkan dengan adanya kebijakan pertambangan yang dikeluarkan dari Pemerintah Kolombia yang tidak hanya fokus terhadap mengontrol sumber daya yang ada, tetapi juga mulai memikirkan bagaimana cara untuk menarik investor asing.⁴⁸ Tidak hanya itu saja, Pemerintah Kolombia juga mulai menganggap bahwa sektor pertambangan juga bisa berkontribusi terhadap perekonomian Kolombia.⁴⁹ Perlahan tapi pasti Kolombia mulai mengikuti trend dunia berkaitan dengan regulasi aktivitas tambang.⁵⁰

Hal ini kemudian berlanjut ketika di tahun 1980, Kolombia mulai mengatur sektor tambang melalui *mining code* tahun 1988 dimana melalui *mining code* ini menjelaskan ketentuan-ketentuan bagi para investor untuk melakukan tambang, termasuk salah satunya izin eksplorasi dan eksploitasi. Hal inilah yang kemudian mendorong investor untuk mau berinvestasi di sektor tambang dimana kemudian di tahun 1990 untuk pertama kali Eco Oro melakukan investasi di sektor tambang emas. Yang kemudian di tahun 2001 terjadi modernisasi *mining code* menggantikan *mining code* sebelumnya, yang tentunya semakin memberikan banyak kemudahan bagi investor untuk berinvestasi pada sektor tambang. Hal ini kemudian dapat dibuktikan

⁴⁸ Luis Ernesto Rodriguez A, *Loc.Cit*, Page 2

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ *Ibid.*

repository.ub.ac.id

dengan *pasca* diberlakukannya *ming code* tahun 2001, FDI bidang tambang semakin meningkat signifikan.⁵¹

Dalam perkembangan sektor pertambangan di Kolombia, tidak sedikit hambatan yang harus dilalui. Dimulai dari adanya keterbatasan infrastuktur yang dihadapi oleh Kolombia.⁵² Pendapatan yang didapatkan dari sektor pertambangan tidak dimanfaatkan secara maksimal untuk memperbaiki infrastuktur.⁵³ Padahal jika kita lihat seharusnya pendapatan yang diperoleh dari sektor pertambangan dapat dimanfaatkan dengan diinvestasikan oleh pemerintah pada pembangunan sektor infrastuktur yang tentunya akan berdampak besar pada perekonomian. Keterbatasan infrastuktur disini tidak hanya mencakup masalah pembangunan jalan, rel kereta api, pelabuhan maupun bandara tetapi juga pada poin adanya ketersediaan pasokan listrik.⁵⁴ Hal ini diperkuat dengan berdasarkan data dari Bank Dunia dalam *Doing Business*, Kolombia berada di peringkat ke 134 berkaitan dengan sarana listrik.⁵⁵ Tidak dapat dipungkiri bahwa hal ini menjadi hambatan dalam sektor pertambangan.

Kemudian hambatan yang kedua adalah adanya aktivitas penambang ilegal yang ada di Kolombia. Hasil dari aktivitas penambang ilegal ini kemudian pada

⁵¹ Dermot O' Connor dan Juan Pablo Bohorquez Montoya, "*Neoliberal Transformation in Colombia's Goldfields: Development Strategy or Capitalist Imperialism?*", *LABOUR, Capital and Society*, January, 2010, Page 8.

⁵² Villar D, Perez-Montes JE dan Schaeffer DJ, *Mining as the "Locomotive of the Colombian Economy: it's Real Cost*, Volume 5, Issue 3, 2017, Page 1.

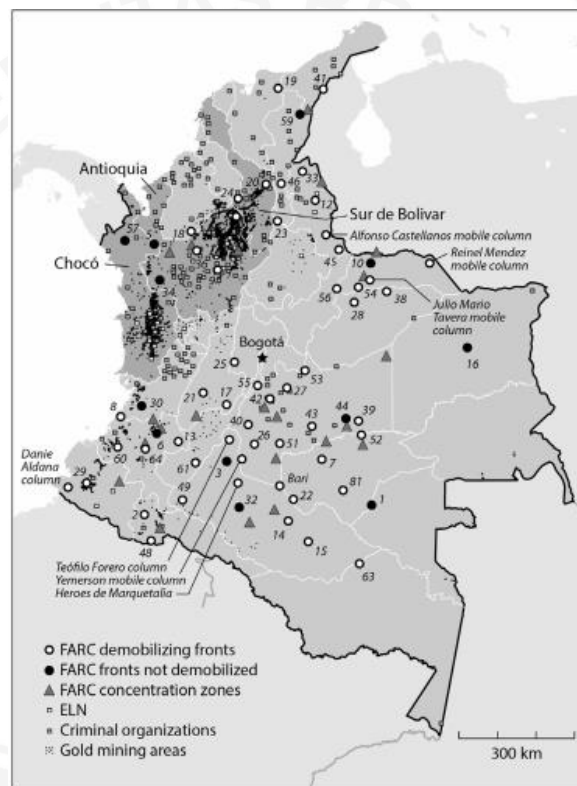
⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ Andrew Krentz, *Mining in Colombia*, Page 4, <https://preserve.lehigh.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1004&context=perspectives-v31>, Diakses Pada 10 Juni 2018 Pada Pukul 20.26 WIB.

⁵⁵ *Ibid.*

akhirnya membiayai kelompok-kelompok bersenjata yang ada di Kolombia.⁵⁶ Sekitar 20% dari wilayah Kolombia memiliki potensi sebagai lokasi tambang yang mana hal ini terletak pada 12 dari total 32 departemen yang ada di Kolombia.⁵⁷ Pada umumnya lokasi dari tambang berada pada Departemen Antioquia, Chocó dan Bolivar dimana ketiga Departemen itu merupakan lokasi dari kelompok seperti FARC dan ELN serta adanya kelompok kriminal seperti Bacrim.⁵⁸

Gambar 1. Lokasi Tambang Emas dan Kelompok Bersenjata.⁵⁹



Sumber: Kejaksaan Agung Kolombia

⁵⁶ Juan Diego Alvarez, Page 9-10, *Op.Cit.*

⁵⁷ Frédéric Massé & Philippe Le Billon, “Gold Mining in Colombia, Post-War Crime and the Peace Agreement with the FARC”, *Third World Thematics: A TWQ Journal*, 2017, Page 4-5.

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ *Ibid.*

Jika kita lihat peta Di halaman sebelumnya, Kejaksaan Agung Kolombia memperkirakan bahwa tahun 2012 setidaknya 489 lokasi penambangan ilegal dari total keseluruhan 1123 yang ada di Kolombia, 40% diantaranya berada di wilayah lokasi keberadaan kelompok FARC, ELN maupun Bacrim.⁶⁰

Kemudian hambatan yang ketiga adalah adanya praktik korupsi pada sektor pertambangan yang dilakukan oleh institusi lingkungan maupun tambang yang berwenang dalam memberikan hak untuk menambang bagi para investor.⁶¹ Seringkali terjadi ketidaksinambungan antara kedua institusi tersebut, dimana di satu sisi institusi lingkungan Kolombia sudah mengeluarkan ketentuan zona yang disebut *Organizational Territorial Plan* (POT dalam bahasa Spanyol) yang kemudian menggolongkan wilayah ke dalam 3 zona.⁶²

Kemudian, selanjutnya institusi tambang mengeluarkan hak untuk menambang bagi para investor hanya berdasarkan penilaian secara geologis, tanpa mempertimbangkan zonasi yang sudah dikeluarkan oleh institusi lingkungan Kolombia.⁶³ Kondisi inilah yang kemudian mendorong untuk terjadinya praktik korupsi.⁶⁴ Dan tercatat bahwa banyak pegawai negeri khususnya pada sektor tambang (INGEOMINAS) berada dibawah investigasi yang kemudian hal ini mendorong Pemerintah Kolombia melakukan reformasi di INGEOMINAS.⁶⁵

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ Juan Diego Alvarez, *Op.Cit*, Page 11-13.

⁶² *Ibid.*

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ *Ibid.*

Selanjutnya, hambatan yang keempat adalah berkaitan dengan kurangnya kontrol dari Pemerintah Kolombia terhadap jumlah pasti mineral yang telah di tambang.⁶⁶ Hal ini dibuktikan dengan penjelasan dari Menteri Pertambangan pada Januari 2011 dimana ia menyebutkan bahwa jumlah pegawai negeri yang bertugas menangani kontrol terhadap sektor pertambangan yaitu INGEOMINAS tidak memiliki kapasitas yang cukup untuk mengerjakan seluruh tugas tersebut.⁶⁷ Perlu diketahui bahwa jumlah pegawai negeri yang ada hanya 16 orang untuk mengontrol sekitar 6000 tambang legal.⁶⁸

Di tahun 2011 tercatat bahwa setiap pegawai diharuskan melakukan kunjungan setidaknya 375 kali setiap tahunnya yang itu berarti 2 kali dalam sehari.⁶⁹ Hal ini juga diluar dari adanya kasus berkaitan dengan penambangan ilegal yang menjadi *job desk* dari INGEOMINAS.⁷⁰ Selain melakukan kontrol secara teknis terhadap tambang legal yang ada, INGEOMINAS juga memiliki tugas untuk mengontrol jumlah royalti yang harus dibayarkan oleh perusahaan tambang.⁷¹ Jika kita lihat bahwa beban pekerjaan dan jumlah kapasitas dari pekerja INGEOMINAS khususnya tidak sebanding. Hal inilah yang kemudian mendorong hasil yang ada tidak maksimal.

Jika keempat hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Kolombia terhadap pengembangan sektor pertambangan tidak segera diatasi, maka dikhawatirkan hal ini

⁶⁶ *Ibid* Page 15-16.

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ *Ibid.*

⁷¹ *Ibid.*

akan semakin sulit untuk ditangani. Hal ini kemudian akan berimplikasi pada kepercayaan investor yang ada terhadap pemerintah. Tentunya ini menjadi tugas dan pekerjaan rumah bagi Pemerintah Kolombia dalam melakukan reformasi dan mengatasi hambatan yang ada agar bisa memberikan kenyamanan bagi para investor serta menarik investor asing untuk bisa menanamkan modalnya.



BAB V

ANALISIS KETIDAKPATUHAN KOLOMBIA TERHADAP CANADA COLOMBIA FREE TRADE AGREEMENT (CCOFTA): STUDI KASUS PENGAMBILALIHAN PROYEK ANGOSTURA DI DEPARTEMEN SANTANDER TAHUN 2010-2016

Pada bab ini, penulis akan menjelaskan secara detail dan rinci penyebab ketidakpatuhan Kolombia terhadap *Canada Colombia Free Trade Agreement* (CCOFTA): studi kasus pengambilalihan Proyek Angostura di Departemen Santander tahun 2010-2016 dengan menggunakan konsep *non compliance* dari Chayes & Chayes. Terdapat 3 variabel, variabel pertama yaitu *ambiguity* yang memiliki dua indikator yaitu bahasa dalam perjanjian yang bersifat umum serta adanya ketidaksesuaian konteks dari klausa dalam perjanjian. Kemudian variabel kedua adalah *limitation on capacity* yang terdiri dari dua indikator yaitu keterbatasan birokrasi dan finansial. Dan variabel yang terakhir adalah *temporal dimensions* yang terdiri dari tiga indikator, yaitu perubahan kondisi politik, ekonomi dan sosial.

5.1 Ambiguity

Ambiguity menjadi salah satu penyebab mengapa Negara tidak patuh terhadap perjanjian yang telah disepakati, dimana hal ini difokuskan pada bahasa dan kalimat dari perjanjian. Bahasa yang digunakan dalam klausa kalimat pada perjanjian seringkali tidak menjelaskan suatu hal dengan jelas dan detail sehingga hal ini

kemudian menimbulkan perbedaan interpretasi terhadap makna sesungguhnya.¹ Selain bahasa, adanya ketidaksesuaian konteks dari klausa dalam perjanjian dengan kondisi yang ada dimana tentunya terjadi perubahan-perubahan kondisi politik, ekonomi dan sosial saat merumuskan perjanjian dengan mengimplementasikan perjanjian yang ada tentunya mengakibatkan Negara memiliki interpretasi yang berbeda dan pada akhirnya mendorong Negara tidak patuh terhadap perjanjian yang ada.²

5.1.1 Bahasa dalam Perjanjian yang Bersifat Umum

Bahasa dalam perjanjian CCOFTA, khususnya pada bagian investasi pasal 805 dan 811 yang dilanggar oleh Negara Kolombia bisa dikatakan bersifat umum dan tidak menjelaskan dengan detail dan jelas. Pada pasal 805, secara umum menjelaskan perihal perlakuan yang diberikan terhadap investasi yang ada, sesuai dengan perlakuan standar minimum berdasarkan dengan hukum kebiasaan internasional.³ Pasal 805 terdiri dari 3 ayat, dimana penulis akan memfokuskan pada ayat pertama dikarenakan ayat pertama berkaitan dengan yang dilanggar oleh Negara Kolombia terhadap investasi yang dilakukan oleh perusahaan Eco Oro.⁴ Hal ini bisa dilihat lebih lanjut pada kutipan pasal 805 di halaman selanjutnya

¹ Abram Chayes dan Antonia Handler Chayes, *Loc.Cit*, Page 10-11.

² *Ibid.*

³ World Bank, *Op.Cit*, Page 126-127.

⁴ *Ibid.*

Article 805

1. *Each Party shall accord to covered investments treatment in accordance with the customary international law minimum standard of treatment of aliens, including fair and equitable treatment and full protection and security. The concepts of “fair and equitable treatment” and “full protection and security” do not require treatment in addition to or beyond that which is required by the customary international law minimum standard of treatment of aliens.*⁵

Jika kita lihat pada ayat 1 pasal 805 di atas, maka bisa dijelaskan bahwa masing-masing pihak yang terlibat dalam perjanjian diwajibkan untuk memberikan perlakuan terhadap investasi yang ada sesuai dengan perlakuan standar minimum hukum kebiasaan internasional, termasuk di dalamnya perlakuan yang adil dan setara serta jaminan perlindungan dan keamanan.⁶ Penjelasan poin perlakuan yang adil dan setara (*fair and equitable treatment*) yang menjadi masalah. Pada pasal 805 tidak dijelaskan dengan detail dan jelas mengenai maksud dari perlakuan yang adil dan setara. Hal inilah yang kemudian mengakibatkan bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian memiliki preferensi dan interpretasi sendiri terhadap makna dari perlakuan yang adil dan setara. Yang mana antara satu pihak dengan pihak lain memiliki preferensi dan interpretasi yang berbeda antara satu dengan yang lainnya.

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

Negara Kolombia menganggap bahwa apa yang mereka lakukan selama ini sebagai *host countries* terhadap kelangsungan aktivitas investasi dari Perusahaan Eco Oro sudah sesuai dengan poin perlakuan yang adil dan setara. Tentunya hal ini berdasarkan dengan interpretasi Negara Kolombia terhadap poin perlakuan adil dan setara. Sebaliknya Perusahaan Eco Oro akan beranggapan bahwa apa yang mereka dapatkan tidak sesuai dengan poin perlakuan yang adil dan setara sesuai dengan interpretasi mereka sendiri terhadap makna dari perlakuan yang adil dan setara. Namun menurut penilaian dari penulis, bahwa apa yang dilakukan oleh Negara Kolombia tidak mencerminkan poin perlakuan adil dan setara sesuai dengan pasal 805 ayat 1, dimana Negara Kolombia terbukti dengan mengeluarkan serangkaian peraturan yang pada dasarnya menghambat aktivitas investasi dari Perusahaan Eco Oro.

Poin perlakuan adil dan setara memang sering digunakan dalam klausa perjanjian BIT (*Bilateral Investment Treaty*) atau perjanjian investasi internasional lainnya, namun poin perlakuan yang adil dan setara juga memberikan masalah di kemudian hari bagi para pihak yang terlibat mengingat bahwa tidak adanya penjelasan yang pasti mengenai makna dari perlakuan yang adil yang kemudian mendorong para pihak yang terlibat memiliki interpretasi sendiri.⁷ UNCTAD menjelaskan bahwa makna dari poin perlakuan yang adil dan setara adalah perlakuan yang tidak bias dan adil yang harus diberikan oleh masing-masing pihak yang terlibat perjanjian.⁸ Poin

⁷ UNCTAD, *Fair and Equitable Treatment UNCTAD Series on Issues in International Investment Agreements II*, http://unctad.org/en/Docs/unctaddiaeia2011d5_en.pdf, Page 25, Diakses Pada 05 Juni 2018 Pada Pukul 23.23 WIB.

⁸ *Ibid.*

penjelasan dari UNCTAD hanya memberikan penjelasan secara umum dan garis besar saja.

Kemudian pasal kedua yang dilanggar oleh Negara Kolombia adalah pasal 811.⁹ Pasal 811 berkaitan dengan pengambilalihan yang terdiri dari 5 ayat. Penulis akan memfokuskan pada ayat pertama dikarenakan ayat pertama berkaitan dengan yang dilanggar oleh Negara Kolombia. Hal ini bisa dilihat lebih lanjut pada kutipan di bawah ini.

Article 811

1. *Neither party may nationalize or expropriate a covered investment either directly, or indirectly through measures having an effect equivalent to nationalization or expropriation (hereinafter referred to as "expropriation"), except:*
 - (a). for a public purpose;*
 - (b). in a non-discriminatory manner;*
 - (c). on prompt, adequate, and effective compensation in accordance with paragraph 2 to 4; and*
 - (d). in accordance with due process of law.¹⁰*

Jika kita lihat pada ayat 1 pasal 811 di atas maka bisa dijelaskan bahwa tidak ada boleh pihak manapun yang melakukan nasionalisasi atau pengambilalihan investasi yang ada baik secara langsung maupun tidak langsung melalui berbagai

⁹ World Bank, *Op.Cit*, Page 133-134.

¹⁰ *Ibid.*

cara apapun yang kemudian setara dengan nasionalisasi atau pengambilalihan.¹¹ Namun pengambilalihan baik langsung maupun tidak langsung diperbolehkan dengan beberapa ketentuan seperti bertujuan untuk kepentingan masyarakat, kemudian dengan tindakan yang tidak diskriminasi serta adanya kompensasi yang diberikan.¹² Penjelasan diperbolehkannya untuk melakukan pengambilalihan investasi baik langsung maupun tidak langsung dengan alasan untuk kepentingan masyarakat yang menjadi masalah.

Ketentuan untuk diperbolehkannya melakukan pengambilalihan investasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan alasan untuk kepentingan masyarakat tidak dijelaskan dengan detail dan jelas. Kepentingan masyarakat seperti apa yang memperbolehkan Negara untuk melakukan tindakan pengambilalihan langsung maupun tidak langsung. Kemudian tidak adanya penjelasan lebih lanjut mengenai indikator maupun parameter untuk kepentingan masyarakat yang mana sebenarnya hal ini diperlukan agar diketahui batas-batas yang jelas.

Akibatnya terjadi perbedaan interpretasi terhadap poin untuk kepentingan masyarakat yang kemudian mendorong Negara Kolombia untuk melakukan pengambilalihan tidak langsung yaitu dengan mengambilah tidak langsung Proyek Angostura. Dengan tidak jelas dan detail dari penjelasan ketentuan untuk kepentingan masyarakat, maka Negara Kolombia tentu menganggap bahwa dengan mengambilah tidak langsung Proyek Angostura merupakan hal yang benar sesuai dengan interpretasi Negara Kolombia terhadap poin tersebut.

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

Tentunya dengan tidak jelas dan detail dari penjelasan dan ketentuan yang ada merugikan banyak pihak. Karena Negara bisa saja mengambil kesempatan hal ini sebagai justifikasi untuk melakukan tindakan yang tidak jarang merugikan para investor yang telah berinvestasi di Negara tersebut. Tindakan yang dilakukan oleh Negara Kolombia yaitu dengan mengambil alih Proyek Angostura yang merupakan bentuk investasi tambang dari Perusahaan Eco Oro salah satunya disebabkan oleh dengan tidak jelas dan detailnya penjelasan ketentuan dari CCOFTA khususnya pasal 805 dan 811 yang mengatur perihal perlakuan yang adil dan pengambilalihan. Oleh karena itu, diperlukan adanya perumusan klausa perjanjian yang jelas dan detail yang tentunya akan meminimalisir terjadinya perbedaan interpretasi yang berujung pada sengketa. Namun di sisi lain hal ini akan memerlukan waktu yang cukup lama dalam merumuskannya.

5.1.2 Ketidaksesuaian Konteks dari Klausa dalam Perjanjian

Seringkali para konseptor dari perjanjian internasional tidak memprediksikan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di kemudian hari, saat menjalankan perjanjian.¹³ Kemudian para konseptor perjanjian hanya membiarkannya saja.¹⁴ Tentunya salah satu penyebabnya adalah adanya keterbatasan waktu dalam perumusan perjanjian yang ada.¹⁵ Padahal kemungkinan-kemungkinan yang ada jika tidak mendapatkan perhatian secara serius bisa menjadi masalah di kemudian hari.

¹³ Abram Chayes dan Antonia Handler Chayes, *Loc.Cit*, Page 10-11.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam perjalanan mengimplementasikan suatu perjanjian, besar kemungkinan terjadi berbagai perubahan mulai dari ekonomi, politik, hingga ilmiah dan teknologi yang tentunya hal ini tidak dapat dihindari.¹⁶ Dengan adanya perubahan inilah yang kemudian pada akhirnya mengakibatkan konteks dari klausa dalam perjanjian tidak sesuai dengan keadaan dan kondisi yang ada. Hal ini pula yang terjadi pada Negara Kolombia, dimana konteks dari klausa dalam perjanjian tidak sesuai dengan keadaan dan kondisi yang ada sehingga mendorong Negara Kolombia untuk melanggar kedua pasal CCOFTA, yaitu pasal 805 dan 811.

Pada pasal 805 yang mengatur perihal perlakuan standar minimum, yaitu perlakuan yang adil (*fair and equitable treatment*).¹⁷ Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa penjelasan dari poin perlakuan yang adil tidak dijelaskan dengan detail dan jelas.¹⁸ Konteks dari klausa perjanjian yang tidak detail dan jelas pada pasal 805 bisa dikatakan sesuai dengan kondisi kedua belah pihak yaitu Negara Kanada dan Kolombia saat itu, dimana pada akhirnya sepakat dan bisa menerima mengenai penjelasan poin tersebut saat perancangan dari perjanjian.

Namun seiring dengan berjalannya waktu, dengan berbagai perubahan yang ada, konteks dari klausa perjanjian yang tidak detail dan jelas pada pasal 805 tidak sesuai dengan kondisi dari kedua belah pihak, khususnya Negara Kolombia saat ini. Diperlukan adanya penjelasan-penjelasan tambahan seperti perlakuan yang adil

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ World Bank, *Loc. Cit*, Page 126-127.

¹⁸ *Ibid.*

seperti apa yang harus diberikan oleh negara-negara yang terlibat dalam perjanjian yang tentunya disesuaikan dengan perubahan kondisi baik domestik maupun internasional yang ada.

Selain itu, lebih baik jika dalam penambahan ketentuan dimasukkan pula prediksi kemungkinan-kemungkinan perubahan yang ada di kemudian hari. Sehingga hal ini mampu membuat konteks dari klausa perjanjian pada pasal 805 bisa sesuai dengan kondisi kedua belah pihak, khususnya Negara Kolombia saat ini dan di masa yang akan datang. Hal ini juga bisa dikatakan sebagai antisipasi untuk meminimalisir terjadinya sengketa investasi di kemudian hari, mengingat bahwa tidak sedikit dana yang dikeluarkan untuk membawa kasus sengketa investasi ke meja peradilan serta lamanya proses dari peradilan.

Begitu pula dengan pasal 811 yang mengatur perihal pengambilalihan.¹⁹ Pada pasal 811 tidak menjelaskan dengan detail dan jelas mengenai ketentuan-ketentuan dari pengambilalihan itu sendiri.²⁰ Konteks dari klausa dalam perjanjian, khususnya pasal 811 yang tidak detail dan jelas bisa dikatakan sesuai dengan kondisi dari kedua belah pihak, khususnya Negara Kolombia saat itu, yaitu pada saat perancangan perjanjian CCOFTA, dimana kemudian pada akhirnya setuju dan bisa menerima ketentuan dari poin pasal 805.

Namun seiring berkembangnya zaman, konteks dari klausa dalam perjanjian pasal 811 CCOFTA yang tidak detail dan jelas tidak sesuai dengan kondisi dari

¹⁹ World Bank, *Loc. Cit*, Page 133-134.

²⁰ *Ibid.*

kedua belah pihak, khususnya Negara Kolombia yang ada sekarang. Diperlukan adanya penjelasan tambahan dari ketentuan-ketentuan yang ada untuk melakukan pengambilalihan yang tentunya disesuaikan dengan kondisi kedua belah pihak dan adanya perubahan-perubahan internasional. Sehingga nantinya klausa dari perjanjian pasal 811 bisa sesuai dengan kondisi kedua belah pihak, khususnya Negara Kolombia. Selain itu, untuk mengantisipasi sengketa investasi di kemudian hari, akan lebih baik jika dalam penjelasan tambahan tersebut juga tidak hanya mencakup perubahan kondisi baik domestik kedua belah pihak maupun internasional, tetapi juga memasukkan prediksi kemungkinan-kemungkinan yang ada di kemudian hari saat mengimplementasikan perjanjian.

Kasus sengketa investasi berkaitan dengan pelanggaran terhadap pasal pengambilalihan baik itu langsung dan tidak langsung serta perlakuan yang adil (*fair and equitable treatment*) cukup sering terjadi. Berdasarkan data dari UNCTAD menyatakan bahwa pelanggaran terhadap perjanjian investasi internasional (bisa berupa BIT atau perjanjian investasi internasional lainnya) terbesar yang pertama adalah berkaitan dengan pengambilalihan, baik langsung maupun tidak langsung.²¹

Kemudian posisi kedua diikuti dengan kasus berkaitan dengan perlakuan yang adil (*fair and equitable treatment*) yang menduduki peringkat kedua.²² Tentunya dengan data tersebut dapat menjadi gambaran bagi para konseptor dari

²¹ UNCTAD, *Breaches of IIA Provisions Alleged and Found*, <http://investmentpolicyhub.unctad.org/ISDS/FilterByBreaches>, Diakses Pada 14 Agustus 2018 Pada Pukul 11.16 WIB.

²² *Ibid.*

perjanjian untuk menaruh perhatian yang lebih terhadap dua poin di atas, yang kemudian dalam perancangan perjanjian khususnya pada dua poin di atas juga mempertimbangkan adanya kemungkinan-kemungkinan perubahan yang akan terjadi. Sehingga nantinya klausa-klausa yang ada dalam perjanjian internasional bisa sesuai dengan konteks keadaan yang ada saat itu yang kemudian tentunya akan meminimalisir terjadinya sengketa investasi.

5.2 *Limitations on Capacity*

Limitations on capacity menjadi salah satu penyebab mengapa Negara Kolombia tidak patuh terhadap CCOFTA yang telah disepakati. Keterbatasan ini meliputi dua hal, yaitu keterbatasan birokrasi dan finansial yang dihadapi oleh Negara Kolombia.

5.2.1 Keterbatasan Birokrasi

Sifat Negara bukan menjadi satu-satunya penyebab mengapa Negara tidak patuh terhadap suatu perjanjian.²³ Elemen lainnya adalah berkaitan dengan kapasitas Negara itu sendiri yang kemudian pada akhirnya mendorong Negara melakukan tindakan ketidakpatuhan terhadap suatu perjanjian.²⁴ Kapasitas Negara tidak hanya ditunjukkan dari sisi kemampuan finansial tetapi juga pada poin kemampuan birokrasinya sendiri.²⁵ Hal inilah yang kemudian masih menjadi masalah bagi negara-negara khususnya Negara berkembang yaitu adanya keterbatasan birokrasi.²⁶ Negara

²³ Abram Chayes dan Antonia Handler Chayes, *Loc.Cit*, Page 28-29.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

Kolombia juga menjadi salah Negara berkembang yang juga menghadapi permasalahan yang sama, yaitu keterbatasan birokrasi yang kemudian menjadi salah satu penyebab mengapa Negara Kolombia tidak patuh terhadap CCOFTA yang telah disepakati yang pada akhirnya berimplikasi pada pengambilalihan proyek Angostura.

Keterbatasan birokrasi yang dihadapi oleh Negara Kolombia ditunjukkan dengan adanya ketidaksinambungannya regulasi mengenai zona tambang antar institusi pemerintah yaitu institusi yang memiliki otoritas terhadap pertambangan dan institusi yang memiliki otoritas terhadap lingkungan.²⁷ Institusi pemerintah yang memiliki otoritas terhadap lingkungan yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan telah mengeluarkan regulasi bagi sektor tambang berkaitan dengan zonasi wilayah.²⁸ Melalui zonasi maka terbentuklah penggolongan 3 wilayah, yaitu *forbidden* yang merupakan wilayah yang terlarang, kemudian *restricted* yang merupakan wilayah yang terbatas dalam beraktivitas dan yang terakhir *completely allowed* yaitu wilayah yang diperbolehkan untuk melakukan aktivitas yang produktif (pertanian hingga tambang).²⁹

Dengan dikeluarkannya zonasi lingkungan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan tentunya hal ini bisa menjadi pedoman bagi Kementerian-Kementerian lainnya seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Perumahan, Kementerian Pertambangan dan Energi dalam beraktivitas atau mengeluarkan izin penggunaan lahan tidak salah menggunakan wilayah lahan yang

²⁷ Juan Diego Alvarez, *Loc.Cit*, Page 11-12.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

dilindungi. Sehingga secara logika ketika Kementerian Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan mengeluarkan regulasi zonasi, secara otomatis bisa menjadi dasar pertimbangan bagi Kementerian Pertambangan dan Energi dalam mengeluarkan izin tambang dan konsesi kontrak.

Namun pada kenyataannya hal yang terjadi tidak sesuai. Masalah muncul ketika Kementerian Pertambangan dan Energi yang memiliki otoritas dalam memberikan konsesi kontrak tambang memberikan konsesi kontrak tanpa mempertimbangkan aspek lingkungan, yaitu zonasi wilayah yang sudah dikeluarkan sebelumnya oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan.³⁰ Kementerian Pertambangan dan Energi memberikan konsesi kontrak kepada para investor hanya dengan berdasarkan penilaian geologi saja.³¹ Kementerian Pertambangan dan Energi tetap bersikukuh untuk tidak menggunakan regulasi zonasi sebagai dasar dalam memberikan konsesi kontrak tambang kepada investor dengan alasan bahwa dalam *mining code* tahun 2001 tidak secara spesifik untuk membatasi dalam menentukan wilayah mana yang boleh untuk melakukan aktivitas tambang.³²

Pada dasarnya apa yang dilakukan oleh Kementerian Pertambangan dan Energi salah, karena sudah seharusnya ketika Kementerian Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan mengeluarkan regulasi tersebut maka secara otomatis bisa menjadi dasar pertimbangan bagi Kementerian Pertambangan dan Energi dalam mengeluarkan konsesi kontrak maupun izin tambang bagi investor. Karena tujuan awal

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*

dikeluarkannya regulasi zonasi lingkungan adalah agar nanti di kemudian hari Kementerian-Kementerian lainnya termasuk Kementerian Pertambangan dan Energi dalam mengeluarkan izin tambang dan konsesi kontrak tidak *overlapping* dalam penggunaan lahan, dimana wilayah yang harusnya dilindungi tidak menjadi tempat untuk beraktivitas.

Menanggapi hal ini kemudian Mahkamah Konstitusi Kolombia mengeluarkan pernyataan yang menyebutkan bahwa peraturan lainnya seperti peraturan mengenai lingkungan yang melakukan zonasi untuk melaksanakan aktivitas tambang dapat berlaku bagi aktivitas tambang, walaupun hal ini tidak disebutkan dalam *mining code* tahun 2001.³³ Hal ini berarti bahwa regulasi zonasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup juga seharusnya berlaku bagi Kementerian Pertambangan dan Energi dalam mengeluarkan konsesi kontrak.³⁴

Masalah mulai muncul kembali setelah dikeluarkan pernyataan dari Mahkamah Konstitusi Kolombia tentang regulasi zonasi berlaku juga bagi Kementerian Pertambangan dan Energi yang kemudian mendorong Kementerian Pertambangan dan Energi untuk mengikuti sistem zonasi.³⁵ Namun regulasi ini baru diterapkan pada fase eksploitasi yang notabene merupakan tahap kedua, tidak dimulai dari fase awal yaitu eksplorasi yang hanya berdasarkan penilaian letak geologi saja.³⁶ Idealnya Kementerian Pertambangan dan Energi mengikuti sistem zonasi lingkungan yang telah

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*

dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan dimulai dari fase awal yaitu fase eksplorasi dimana sebenarnya pada fase ini aktivitas yang dilakukan menggunakan lahan namun dalam tahap yang sudah merusak lingkungan yaitu dengan melakukan pengeboran menggunakan alat berat. Oleh sebab itu karena fase eksplorasi konteksnya sudah merusak lingkungan maka sudah sewajarnya Kementerian Pertambangan dan Energi mengeluarkan izin konsesi kontrak dimulai pada fase eksplorasi mengikuti regulasi zonasi yang sudah ada. Dengan adanya ketidaksinambungan regulasi yang ada inilah yang kemudian menjadi salah satu penyebab mengapa Negara Kolombia tidak patuh terhadap CCOFTA yang telah disepakati dengan Negara Kanada yang pada akhirnya melakukan pengambilalihan Proyek Angostura.

5.2.2 Keterbatasan Finansial

Keterbatasan finansial seringkali menjadi salah satu penyebab mengapa suatu Negara tidak patuh terhadap suatu perjanjian yang telah disepakati. Chayes dan Chayes dalam bukunya yang berjudul *“The New Sovereignty: Compliance with International Regulatory Agreements”* menjelaskan bahwa ketika suatu perjanjian telah disepakati kemudian hal ini berlanjut pada tahap membawa perjanjian ke dalam domestik masing-masing Negara atau bisa dikatakan tahap implementasi maka diperlukan adanya finansial yang memadai.³⁷ Tidak jarang Negara berkembang mengalami kendala dimana mereka tidak memiliki alokasi dana untuk mengimplementasikan suatu

³⁷ Abram Chayes dan Antonia Handler Chayes, *Loc.Cit*, Page 14.

perjanjian.³⁸ Oleh sebab itu seringkali Negara maju memberikan bantuan finansial bagi Negara berkembang agar mereka dapat mengimplementasikan suatu perjanjian dengan baik.³⁹

Hal ini pula yang dialami oleh Negara Kolombia, dimana dalam mengimplementasikan CCOFTA Negara Kolombia mengalami hambatan dikarenakan adanya keterbatasan finansial. Dalam penelitian kali ini penulis tidak dapat menemukan adanya penjelasan berkaitan dengan alokasi dana dari Negara Kolombia dalam mengimplementasikan CCOFTA pada draft CCOFTA.⁴⁰ Kemudian pada laporan tahunan berkaitan dengan implementasi dari CCOFTA, juga tidak disebutkan maupun dijelaskan berkaitan dengan alokasi dana yang dikeluarkan oleh Negara Kolombia berkaitan dengan implementasi dari CCOFTA.⁴¹

Selain tidak ditemukannya adanya penjelasan berkaitan dengan alokasi dana yang dikeluarkan oleh Negara Kolombia berkaitan dengan implementasi CCOFTA, penulis juga tidak dapat menemukan adanya penjelasan ada atau tidak bantuan finansial yang diberikan oleh Negara Kanada kepada Negara Kolombia pada draft CCOFTA.⁴² Begitu juga pada laporan tahunan implementasi dari CCOFTA juga tidak ditemukan adanya penjelasan mengenai bantuan finansial dari Negara Kanada kepada Negara Kolombia berkaitan dengan implementasi dari CCOFTA.⁴³

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ World Bank, *Loc.Cit.*

⁴¹ Embassy of Canada to Colombia, *Loc.Cit.*

⁴² World Bank, *Loc.Cit.*

⁴³ Embassy of Canada, *Loc.Cit.*

Padahal, seperti yang dijelaskan oleh Chayes dan Chayes, untuk mengejar ketertinggalan implementasi dari suatu perjanjian seringkali mitra perjanjian, khususnya Negara maju memberikan bantuan finansial yang tentunya tujuan dari bantuan ini adalah agar perjanjian dapat terimplementasi dengan baik serta Negara bisa patuh terhadap perjanjian yang telah disepakati.⁴⁴ Oleh sebab itu keterbatasan finansial yang dihadapi oleh Negara Kolombia menjadi salah satu alasan penyebab Negara Kolombia tidak patuh terhadap CCOFTA yang telah disepakati.

5.3 Temporal Dimensions

Temporal dimensions merupakan salah satu alasan mengapa Negara tidak patuh terhadap suatu perjanjian, dimana tidak dapat dipungkiri bahwa dalam menjalankan suatu perjanjian yang telah disepakati terdapat perubahan-perubahan dalam domestik suatu Negara yang kemudian hal ini berimplikasi pada kepatuhan terhadap kesepakatan tersebut. Perubahan-perubahan tersebut terdiri dari adanya perubahan kondisi politik, ekonomi dan sosial.

5.3.1 Perubahan Kondisi Politik

Pada dasarnya perubahan kondisi politik yang ada di Negara Kolombia bisa dilihat dengan adanya pergantian kepemimpinan yang kemudian diikuti dengan perubahan dari kebijakan yang ada, khususnya dalam bidang tambang. Negara Kolombia menghadapi perubahan kebijakan dalam bidang tambang, dimana era kepemimpinan dua Presiden sebelum Presiden Juan Manuel Santos membuat kebijakan

⁴⁴ Abram Chayes dan Antonia Handler Chayes, *Loc.Cit*, Page 14.

tambang yang kemudian berfokus untuk mengembangkan sektor tambang yang berbeda dengan kepemimpinan Presiden Juan Manuel Santos yang lebih berfokus pada sektor lingkungan.

Di mulai dari kepemimpinan Presiden Andrés Pastrana Arango (1998-2002), Kolombia mulai menunjukkan keseriusan terhadap sektor pertambangan. Hal ini terlihat dengan langkah yang dilakukan oleh Presiden Andrés Pastrana Arango yaitu dengan memodernisasi *mining code*, dari yang awalnya Negara Kolombia menggunakan *mining code* tahun 1988 kemudian menjadi *mining code* tahun 2001 sebagai UU yang mengatur aktivitas tambang.⁴⁵ Dengan dikeluarkannya *mining code* di tahun 2001 yang bisa dikatakan sebagai titik balik dari sektor pertambangan Negara Kolombia. Hal ini dikarenakan *mining code* tahun 2001 memberikan banyak peraturan-peraturan yang mempermudah aktivitas tambang yang memang hal ini sesuai dengan tujuan awal dibentuknya *mining code* tahun 2001 yaitu menarik para investor di bidang tambang untuk mau berinvestasi di sektor tambang di Negara Kolombia.⁴⁶

Mining code tahun 2001 memberikan berbagai peraturan yang cukup menguntungkan bagi para investor, mulai dari adanya efisiensi pengurusan izin eksplorasi dimana pada *mining code* tahun 2001 izin eksplorasi dan eksploitasi menjadi satu kesatuan.⁴⁷ Hal ini berbeda jika dibandingkan dengan *mining code* sebelumnya, yaitu *mining code* tahun 1988 yang mengatur bahwa izin eksplorasi dan eksploitasi

⁴⁵ Luis Ernesto Rodriguez A, *Op.Cit*, Page 6

⁴⁶ ICSID, *Loc.Cit*, Page 8.

⁴⁷ Luis Ernesto Rodriguez A, *Loc.Cit*, Page 6.

terpisah (tidak otomatis) dan diperlukan adanya evaluasi dari pemerintah untuk melakukan eksplorasi setelah eksploitasi.⁴⁸

Kemudian peraturan lainnya adalah ketentuan bahwa para investor dapat memiliki kontrak tambang dengan jangka waktu hingga 20 tahun dan dapat memperpanjang hingga 30 tahun.⁴⁹ Selain itu melalui *mining code* tahun 2001, para investor dapat melakukan transfer hak eksplorasi dengan catatan hal ini dibawah pengawasan dan diketahui oleh pemerintah.⁵⁰ Kemudian dalam *mining code* tahun 2001 juga dijelaskan bahwa para investor asing memiliki hak dan kewajiban yang sama seperti investor asal Kolombia.⁵¹

Selain dari adanya beberapa peraturan yang cukup menguntungkan dan menarik bagi investor, *mining code* tahun 2001 juga mulai mengatur masalah larangan aktivitas tambang di beberapa lokasi seperti pinggiran perkotaan, situs bersejarah, pantai serta wilayah tempat tinggal dari *indigenous people* atau masyarakat adat Kolombia dan Afro-Kolombia.⁵² Isu masyarakat adat Kolombia dan Afro-Kolombia merupakan tergolong baru, dimana hal ini tidak ditemukan pada *mining code* sebelumnya.⁵³ Dengan dikeluarkannya *mining code* tahun 2001 di era kepemimpinan Andrés Pastrana Arango menunjukkan keseriusan Kolombia untuk mengembangkan sektor pertambangan yaitu dengan membuat serangkaian peraturan yang bertujuan

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ *Ibid* Page 7.

⁵¹ *Ibid* Page 8.

⁵² *Ibid.*

⁵³ *Ibid* Page 9.

untuk menarik investor namun tidak melupakan keberadaan dari masyarakat adat Kolombia dan Afro-Kolombia, yang mana jangan sampai aktivitas tambang mengganggu tempat tinggal mereka.

Hal ini kemudian berlanjut di era kepemimpinan Presiden Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) yang memiliki fokus untuk menciptakan keamanan pada domestik Kolombia yaitu melalui kebijakan keamanan dan pertahanan demokratis atau yang dikenal dengan sebutan DSDP (*Democratic Security and Defense Policy*) pada bulan Juni tahun 2003.⁵⁴ Melalui kebijakan DSD, Presiden Álvaro Uribe berusaha menciptakan keamanan dalam negeri yang sempat tidak stabil sebagai akibat dari adanya kelompok pemberontak seperti FARC dan ELN yang seringkali melakukan tindak kekerasan kepada masyarakat Kolombia seperti pembunuhan dan penculikan.⁵⁵ Dengan dikeluarkannya Kebijakan DSD, Kolombia meningkatkan alokasi dana terhadap sektor keamanan dari yang tadinya hanya 2,2 % di tahun 1990 menjadi 5,6% di tahun 2005 dari total GDP.⁵⁶ Kebijakan DSD tergolong cukup berhasil dimana hal ini bisa dibuktikan dengan diberlakukannya kebijakan ini tercatat setidaknya angka pembunuhan di Kolombia menurun hingga 70% dan penculikan menurun hingga 84%.⁵⁷

⁵⁴ Thomas A. Marks, "Columbia Military Support for 'Democratic Security', *Small Wars & Insurgencies*", Vol. 17, No. 2, June 2006, Page 8-9.

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ Kyla Sankey, "Extractive Capital, Imperialism, and the Colombian State", *Latin American Perspectives*, 2018, Page 12.

⁵⁷ Knowledge at Wharton, *Former Colombia President Álvaro Uribe on Latin America's Journey to Political and Economic Security*, <http://knowledge.wharton.upenn.edu/article/former-colombia-president-alvaro-uribe-on-latin-americas-journey-to-political-and-economic-security/>, Diakses Pada 03 Juni 2018 Pada Pukul 02.18 WIB.

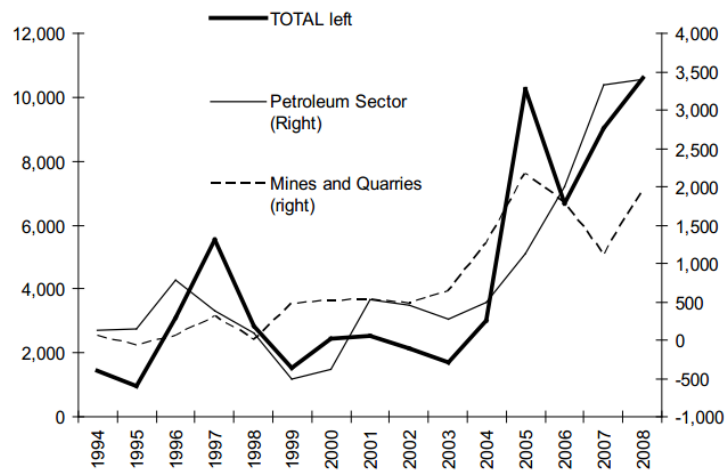
Keamanan menjadi salah satu prioritas utama dari Presiden Álvaro Uribe pada era pemerintahannya. Dalam Konferensi yang berjudul *Latin America: The New Land and Opportunities*, Presiden Álvaro Uribe menjelaskan bahwa keamanan merupakan hal yang paling mendasar dimana dengan suatu Negara aman, maka permasalahan seperti kemiskinan, pendidikan yang buruk dan masalah sosial lainnya dapat teratasi.⁵⁸ Selain itu Presiden Álvaro Uribe juga menjelaskan bahwa dengan kondisi suatu Negara dikatakan aman, maka hal ini dapat berdampak pada investasi yang meningkat.⁵⁹ Ketika suatu Negara memiliki kondisi politik yang stabil dan aman, maka secara tidak langsung akan membuat para investor percaya untuk berinvestasi di Negara tersebut. Seringkali kondisi politik dan keamanan suatu Negara menjadi bahan pertimbangan bagi investor untuk berinvestasi di suatu Negara.

Grafik 1 FDI Industri Ekstraktif (1994-2008).⁶⁰

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ Dermot O' Connor dan Juan Pablo Bohorquez Montoya, *Loc. Cit*, Page 8.



Sumber: *Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)*

Hal ini pula yang terjadi pada Negara Kolombia yang kemudian dengan keberhasilan dari kebijakan DSP kemudian mendorong investor untuk mau berinvestasi di Negara Kolombia. Jika kita lihat pada grafik di atas, dapat dilihat bahwa dalam kurun waktu 14 tahun (1994-2008) terjadi peningkatan investasi di sektor industri ekstraktif yang meliputi minyak dan tambang.⁶¹ Di era kepemimpinan Presiden Álvaro Uribe, FDI di sektor pertambangan khususnya mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2002-2005 yang kemudian mengalami penurunan namun kembali meningkat di tahun 2008.⁶²

Selain terjadi peningkatan FDI di sektor pertambangan, di bawah kepemimpinan Presiden Álvaro Uribe menunjukkan adanya peningkatan jumlah aktivitas tambang di Kolombia.⁶³ Di tahun 2001 misal tercatat bahwa setidaknya terdapat 500.000 H lahan atau setara dengan 0,5% dari total keseluruhan luas Negara

⁶¹ *Ibid.*

⁶² *Ibid.*

⁶³ Juan Diego Alvarez, *Op.Cit*, Page 5.

Kolombia yang menjadi tempat aktivitas tambang di Kolombia.⁶⁴ Hal ini kemudian meningkat di tahun 2008 tercatat bahwa setidaknya terdapat 4,5 juta H lahan yang dijadikan aktivitas tambang atau sekitar 4% dari total keseluruhan luas Negara Kolombia.⁶⁵ Begitu pula pada tahun-tahun selanjutnya yang terus menerus mengalami peningkatan, yaitu di tahun 2009 sekitar 6 juta H setara dengan 5,5% dari luas wilayah Negara Kolombia dan di tahun 2010 sekitar 8,44 juta H atau setara dengan 7,4% dari total luas wilayah Negara Kolombia.⁶⁶

Kemudian, selain dari adanya kebijakan DSD, Presiden Álvaro Uribe menginisiasi dibentuknya Kebijakan Rencana Nasional untuk Pengembangan Sektor Tambang dan Lingkungan untuk Kolombia tahun 2019.⁶⁷ Hal ini dikeluarkan oleh Presiden Álvaro Uribe di tahun 2006 yang secara keseluruhan membahas mengenai rencana pengembangan sektor tambang yang tidak hanya melibatkan pemerintah, tetapi juga melibatkan swasta.⁶⁸ Dalam rencana tersebut secara jelas membahas mulai dari adanya proyeksi produksi tambang hingga tahun 2019 (khusus komoditi emas, batu bara dan platinum), adanya zonasi distrik pertambangan, hingga strategi pengembangan sektor tambang pada tiap-tiap Departemen atau wilayah di Kolombia.⁶⁹

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ PBI Colombia, Colombia, *Colombia*, https://www.peacebrigades.org/fileadmin/user_files/projects/colombia/files/colomPBIa/111203_mining_in_colombia_web.pdf, Page 8, Diakses Pada 02 Juni 2018 Pada Pukul 12.50 WIB.

⁶⁸ UPME, *Colombia País Minero Plan Nacional Para El Desarrollo Minero 2019*, Page 23-60, http://www1.upme.gov.co/simco/PlaneacionSector/Documents/PNDM_2019_Final.pdf, Diakses Pada 01 Agustus 2018 Pada Pukul 05.13 WIB.

⁶⁹ *Ibid.*

Selain itu, dijelaskan pula mengenai tiga peran penting pemerintah dalam industri tambang, yaitu mulai dari fasilitator, promotor dan yang terakhir auditor yang mana pada tiap-tiap peran tersebut dijabarkan kembali apa saja strategi dan rencana yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kolombia.⁷⁰ Dengan dikeluarkannya Kebijakan Rencana Nasional untuk Pengembangan Sektor Tambang dan Lingkungan untuk Kolombia tahun 2019, secara tidak langsung menunjukkan bahwa di tahun 2019, industri tambang di Kolombia ingin menjadi salah satu yang terbesar di Amerika Latin.⁷¹ Setelah Kebijakan Rencana Nasional untuk Pengembangan Sektor Tambang dan Lingkungan untuk Kolombia tahun 2019 dikeluarkan, hal ini kemudian mendorong para investor di bidang tambang tertarik untuk berinvestasi di Negara Kolombia. Salah satunya adalah perusahaan tambang *Barrick Gold* atau *Anglo Gold Ashanti*.⁷²

Hal ini yang kemudian berlanjut di era kepemimpinan Presiden selanjutnya, yaitu Presiden Juan Manuel Santos (2010-2018). Berbeda dengan dua Presiden sebelumnya, Presiden Juan Manuel Santos memiliki karakteristik kepemimpinan yang cenderung *environmentalist* dimana setiap kebijakan yang dibuat lebih mengarahkan kepada aspek lingkungan. Hal ini mulai terlihat dalam pidato kemenangan yang mana dalam pidatonya Presiden Juan Manuel Santos berjanji bahwa akan membentuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan serta Badan Air Nasional Kolombia untuk bisa bekerja secara maksimal memberikan

⁷⁰ *Ibid*, Page 92-111.

⁷¹ Centre Europe-Tiers Monde, *Mining and Human Rights Violations in Colombia: The Case of Anglo Gold Ashanti vs the Afro-descendant Community of La Toma (Cauca)*, http://www.cetim.ch/legacy/en/interventions_details_print.php?iid=387, Diakses Pada 03 Juli 2018 Pada Pukul 22.21 WIB.

⁷² *Ibid*.

perlindungan terhadap air dan sumber daya alam demi kelangsungan generasi penerus bangsa.⁷³ Perlu diketahui bahwa pada era kepemimpinan Presiden Juan Manuel Santos tepatnya pada Juli 2013, Kementerian Lingkungan mengalami restrukturisasi yaitu yang sebelumnya Kementerian Lingkungan, Perumahan dan Pengembangan Wilayah kemudian hal ini dipisahkan menjadi 2 Kementerian yaitu Kementerian Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan dan Kementerian Perumahan, Perkotaan dan Wilayah.⁷⁴ Hal ini bertujuan agar kinerja dari Kementerian tersebut semakin maksimal.

Karakteristik kepemimpinan yang *environmentalist* tercermin dalam RPJMN dua periode kepemimpinan Presiden Juan Manuel Santos yang lebih mengarah pada aspek lingkungan. Dimulai dari RPJMN 2010-2014 yang menggambarkan bahwa isu lingkungan menjadi prioritas utama.⁷⁵ Hal ini ditunjukkan dengan mengeluarkan kebijakan larangan melakukan aktivitas tambang di kawasan ekosistem Paramo yang secara jelas tertulis pada RPJMN 2010-2014 yang dikeluarkan melalui UU 1450.⁷⁶

Dalam RPJMN 2010-2014 yang dikeluarkan pada 16 Juni 2011 pada bagian ke 5 menjelaskan berkaitan dengan adanya kelestarian lingkungan dan resiko pencegahan

⁷³SEMANA, *Discurso Completo de Posesión de Juan Manuel Santos*, <https://www.semana.com/international/print-edition/articulo/climate-change-and-colombia-santos-new-deal/238322-3>, Diakses Pada 24 Mei 2018 Pada Pukul 10.19 WIB.

⁷⁴REDD Desk, *Ministry of Environment and Sustainable Development (Colombia)*, <https://theredddesk.org/countries/actors/ministry-environment-and-sustainable-development-colombia>, Diakses Pada 03 juni 2018 Pada Pukul 23.57 WIB.

⁷⁵Carlos Humberto Salamanca Sarmiento, *Sustainability and Environmental Regional Autonomous Corporations in Boyacá-Colombia*, Page 8, <https://revistas.uptc.edu.co/index.php/cenes/article/download/4147/5084>, Diakses Pada 03 Juli 2018 Pada pukul 20.58 WIB.

⁷⁶Kongres Kolombia, *Ley 1450 De 2011, "Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014."*, Page 84-85, https://www.procuraduria.gov.co/portal/media/file/docs/ddr/CompiladoNormativo_Parte3.pdf, Diakses Pada 21 Juni 2018 Pada Pukul 18.19 WIB.

kerusakan lingkungan.⁷⁷ Dalam bagian ke 5 UU 1450 terdiri dari 26 artikel, dimana artikel pertama yaitu artikel 202 membahas berkaitan dengan penggambaran ekosistem air dan tanah basah.⁷⁸ Pada paragraf pertama menjelaskan adanya larangan aktivitas pertanian dan tambang di kawasan ekosistem Paramo yang kemudian diperjelas pada paragraf kedua dari artikel 202.⁷⁹ Hal ini bisa dilihat pada kutipan di bawah ini.

Paragraf pertama

“PARAGRAPH 1o. In the páramos ecosystems, agricultural activities, exploration or exploitation of hydrocarbons and minerals, and the construction of hydrocarbon refineries can not be carried out. For such effects, the cartography contained in the Páramos Atlas of Colombia of the Alexander von Humboldt Research Institute is considered as a minimum reference, until more detailed cartography is available.”⁸⁰

Paragraf kedua

“PARAGRAPH 2o. Wetland ecosystems may partially or totally restrict agricultural activities, high impact exploration and exploitation of hydrocarbons and minerals based on technical, economic, social and environmental studies adopted by the Ministry of Environment, Housing and Territorial Development or who do your times. The National Government within ninety (90) calendar days following the issuance of this Act shall regulate the criteria and procedures for this purpose. In any case, wetlands designated within the list of international importance of the RAMSAR convention will not be able to advance such activities.”⁸¹

⁷⁷ *Ibid.*

⁷⁸ *Ibid.*

⁷⁹ *Ibid.*

⁸⁰ *Ibid.*

⁸¹ *Ibid.*

Jika kita lihat pada paragraf pertama, secara jelas menginstruksikan bahwa aktivitas pertanian dan tambang tidak dapat dilakukan, yang kemudian diperjelas pada paragraf kedua bahwa aktivitas tersebut dilarang dilakukan di kawasan ekosistem Paramo.⁸² Adanya larangan aktivitas tambang ini kemudian diperkuat dengan alasan dari Pemerintah Kolombia untuk melakukan penggambaran peta kawasan ekosistem Paramo dengan skala 1:25.000 dengan jangka waktu 3 tahun.⁸³ Tentunya hal ini merugikan pihak Eco Oro sebagai investor yang harusnya jika sesuai dengan *mining code* tahun 2001 dapat beraktivitas tanpa adanya hambatan yang mana hal ini juga merupakan hak dari Eco Oro sebagai investor.

Hal ini kemudian berlanjut pada periode kedua kepemimpinan Presiden Juan Manuel Santos, yaitu dengan mengeluarkan kebijakan yang sama berkaitan dengan kawasan ekosistem Paramo yang tertuang pada RPJMN 2014-2018. Dalam RPJMN 2014-2018 yang dikeluarkan melalui UU 1753 pada 9 Juni 2015 pada bagian ke 6 menjelaskan berkaitan dengan *green growth* atau pertumbuhan ekonomi hijau.⁸⁴

Pada bagian ke 6 terdiri dari 10 artikel, dimana artikel 173 membahas perihal perlindungan dan penggambaran terhadap kawasan ekosistem Paramo.⁸⁵ Pada paragraf pertama menjelaskan adanya pengecualian yang diberikan bagi para pemegang kontrak tambang yang mendapatkannya sebelum dilakukan penggambaran peta kawasan

⁸² *Ibid.*

⁸³ *Ibid.*

⁸⁴ Kongres Kolombia, *Por La Cual Se Expide El Plan Nacional De Desarrollo 2014-2018 "Todos Por Un Nuevo Pais"*, Page 100-101, https://www.anm.gov.co/sites/default/files/ley_1753_2015.pdf (UU 1753 - RPJMN 2014-2018), Diakses Pada 21 Juni 2018 Pada Pukul 19.43 WIB.

⁸⁵ *Ibid.*

ekosistem Paramo untuk tetap dapat melakukan aktivitas tambang secara normal sesuai dengan kontrak yang telah ditandatangani yang kemudian diperkuat pada paragraf kedua bahwa pemerintah Kolombia tidak akan mengeluarkan kontrak tambang baru di kawasan ekosistem Paramo.⁸⁶ Hal ini bisa dilihat pada kutipan di halaman selanjutnya.

Paragraf pertama

*“**First Paragraph** As of the entry into force of this law, the Environmental Authorities must review the Environmental Licenses granted before the entry into force of the prohibition, in the delimited páramo areas and they will be subject to control, monitoring and review by part of the mining, hydrocarbon and environmental authorities, within the framework of their competences and applying the guidelines defined by the Ministry of Environment and Sustainable Development.⁸⁷”*

Paragraf kedua

*“**Second Paragraph.** In the area of reference that is not included within the area of the delimited páramo, it will not be allowed to grant new mining titles or sign new contracts for the exploration and exploitation of hydrocarbons, nor the development of new agricultural activities. This area will be the object of ordering and integral management by territorial entities in accordance with the guidelines established by regional autonomous corporations, in order to mitigate and prevent disturbances in the area defined as páramo and contribute to the protection and preservation of these.⁸⁸”*

Jika kita lihat pada paragraf satu secara jelas menyebutkan bahwa Pemerintah Kolombia memberikan pengecualian bagi para investor yang telah mengantongi

⁸⁶ *Ibid.*

⁸⁷ *Ibid.*

⁸⁸ *Ibid.*

kontrak tambang sebelum penggambaran peta kawasan ekosistem Paramo dilakukan untuk tetap melakukan aktivitas tambang dengan syarat adanya pengawasan dan penilaian lebih lanjut dari Kementerian Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan.⁸⁹ Kemudian Pemerintah Kolombia sendiri juga menyatakan bahwa tidak akan menerbitkan kontrak tambang baru bagi para investor di kawasan ekosistem Paramo.⁹⁰

Dari kedua RPJMN yang ada baik periode 2010-2014 dan 2014-2018, pada poin pembahasan masalah tambang lebih menitikberatkan pada perlindungan lingkungan, yaitu melarang aktivitas tambang di kawasan ekosistem Paramo. Dengan dikeluarkannya kebijakan mengenai lingkungan khususnya di kawasan ekosistem Paramo melalui kedua RPJMN tersebut mengakibatkan Perusahaan Eco Oro dan 350 proyek tambang lainnya harus berhenti beraktivitas.

Selain dari kedua RPJMN tersebut, bukti nyata bahwa Presiden Juan Manuel Santos memiliki karakteristik kepemimpinan yang *environmentalist* adalah adanya kebijakan penggambaran kawasan ekosistem Paramo tidak berhenti pada lokasi Proyek Angostura yang terletak di ekosistem Paramo tepatnya di Santurban.⁹¹ Melainkan penggambaran kawasan ekosistem Paramo dilakukan pada seluruh kawasan ekosistem Paramo yang ada di Negara Kolombia.⁹² Tercatat bahwa Negara Kolombia memiliki

⁸⁹ *Ibid.*

⁹⁰ *Ibid.*

⁹¹ TLC, *Loc.Cit.*

⁹² *Semana Sostenible, Colombia Completa 30 Páramos Delimitados, de los 36 Existentes en el País*, <http://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/delimitacion-de-paramos-santos-delimito-siete-ecosistemas-mas-en-cesar/39364>, Diakses Pada 19 Mei 2018 Pada Pukul 14.17 WIB.

36 kawasan ekosistem Paramo yang mana pada Januari 2018, penggambaran kawasan ekosistem Paramo telah dilakukan pada 30 kawasan.⁹³ Presiden Juan Manuel Santos menargetkan bahwa di akhir pemerintahannya seluruh kawasan ekosistem Paramo telah selesai proses penggambarannya.⁹⁴

Dengan apa yang dilakukan oleh Presiden Juan Manuel Santos maka berimplikasi terhadap investasi di sektor tambang. Tercatat di tahun 2016, untuk pertama kalinya Negara Kolombia menghadapi 3 kasus sengketa, dimana ke 3 kasus tersebut diajukan oleh Perusahaan tambang.⁹⁵ 2 dari 3 kasus sengketa yang ada berkaitan dengan isu lingkungan, dimana kasus yang pertama adalah milik Perusahaan Eco Oro.⁹⁶ Kemudian kasus yang kedua melibatkan investor asal Amerika yaitu Perusahaan *Cosigo Resources* yang mana telah mengantongi konsesi kontrak namun tidak dapat melakukan aktivitas tambang emas dikarenakan lokasi yang menjadi tambang emas merupakan kawasan yang dilindungi yang terdapat situs sakral masyarakat asli Kolombia yang kemudian dijadikan sebagai Taman Nasional.⁹⁷

Dalam kepemimpinan masing-masing Presiden memiliki fokus yang berbeda-beda. Dari penjelasan di atas, maka dapat penulis ringkas pada tabel dibawah ini:

⁹³ *Ibid.*

⁹⁴ *Ibid.*

⁹⁵ ITN, *Three Mining Disputes: The First Investment Disputes against Colombia Come to Light*, three-mining-disputes-the-first-investment-disputes-against-colombia-come-to-light/, Diakses Pada 17 Januari 2018 Pada Pukul 13.10 WIB.

⁹⁶ UNCTAD, *Loc.Cit.*

⁹⁷ TLC, *Loc.Cit.*

Tahun	Pemimpin	Kebijakan berkaitan dengan sektor tambang
1998-2002	Andrés Pastrana Arango	Modernisasi <i>mining code</i> tahun 2001 - titik balik sektor pertambangan di Kolombia.
2002-2010	Álvaro Uribe Vélez	<p>1. DSDP (<i>Democratic Security and Defense Policy</i>), berusaha menstabilkan keamanan dalam negeri.</p> <ul style="list-style-type: none"> - DSDP dikategorikan berhasil yang kemudian mampu mendorong investasi masuk ke dalam Negara Kolombia. - Adanya peningkatan jumlah lahan untuk tambang. <p>2. Menginisiasi dibentuknya Kebijakan Rencana Nasional untuk Pengembangan Sektor Tambang dan Lingkungan untuk Kolombia tahun 2019.</p>

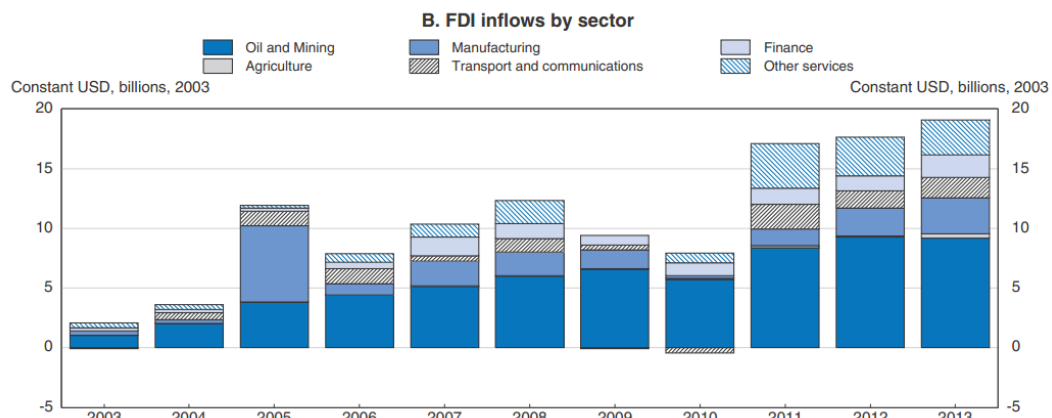
		<ul style="list-style-type: none"> - Penjelasan detail mengenai rencana dan strategi pemerintah pada pengembangan sektor tambang serta adanya integrasi kebijakan tambang baik dari level regional, nasional dan internasional
2010-2018	Juan Manuel Santos	<ul style="list-style-type: none"> - Larangan aktivitas tambang di kawasan ekosistem Paramo yang tertuang dalam RPJMN 2010-2014 dan 2014-2018, dikeluarkan melalui UU 1540 dan 1753. - Penggambaran seluruh kawasan ekosistem Paramo yang ada di Kolombia (36 kawasan). - Restrukturisasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan.

5.3.2 Perubahan Kondisi Ekonomi

Perubahan kondisi ekonomi di Negara Kolombia juga menjadi salah satu hal yang menyebabkan mengapa Negara Kolombia tidak patuh terhadap CCOFTA yang telah disepakati. Perubahan kondisi ekonomi bisa dilihat pada poin investasi di bidang

tambang serta perdagangan. Pada poin investasi di bidang tambang, penulis tidak menemukan adanya penurunan FDI dimana dalam kurun waktu 2010-2013, berdasarkan data yang dikeluarkan oleh OECD pada tahun 2015 menunjukkan bahwa FDI bidang tambang masih mengalami peningkatan.⁹⁸ Hal ini bisa dilihat pada grafik di halaman selanjutnya:

Grafik 2 FDI Kolombia 2003-2013.⁹⁹



Sumber: OECD

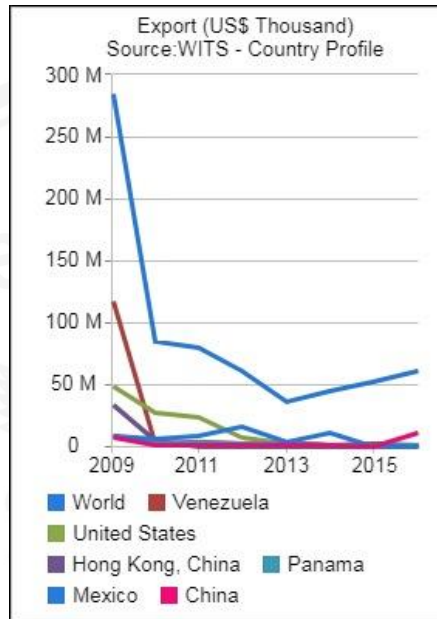
Jika dilihat pada grafik di halaman sebelumnya, FDI pada sektor minyak dan tambang dalam 10 tahun (2003-2013) mengalami peningkatan yang stabil. Sebaliknya, pada poin perdagangan terjadi penurunan. Emas dan perak yang merupakan komoditi ekspor cukup besar bagi Negara Kolombia. Tercatat bahwa komoditi emas dan perak menduduki peringkat ke 5 terbesar atau sekitar 4,2 % dari total ekspor Negara

⁹⁸OECD, *OECD Economic Surveys Colombia January 2015 Overview*, Page 11, https://www.oecd.org/eco/surveys/Overview_Colombia_ENG.pdf, Diakses Pada 02 Agustus 2018 Pada Pukul 17.27 WIB.

⁹⁹ *Ibid.*

Kolombia di tahun 2016.¹⁰⁰ Dengan masuknya komoditi emas dan perak ke dalam 5 teratas komoditi ekspor Negara Kolombia, tentunya hal ini menunjukkan bahwa sektor tambang cukup berkontribusi terhadap perekonomian Negara Kolombia.

Grafik 3 Ekspor Mineral Kolombia Tahun 2009-2016.¹⁰¹



Sumber: World Bank

Di tahun 2010, Negara Kolombia harus mengalami penurunan ekspor pada sektor mineral.¹⁰² Jika kita lihat pada grafik di halaman sebelumnya, pada tahun 2010 terjadi penurunan ekspor di mana di tahun sebelumnya total nilai ekspor mencapai \$284 juta yang kemudian mengalami penurunan di tahun 2010 sebesar \$85 juta.¹⁰³ Hal ini

¹⁰⁰ OEC, *Colombia*, <https://atlas.media.mit.edu/en/profile/country/col/>, Diakses Pada 05 Juli 2018 Pada Pukul 21.05 WIB.

¹⁰¹ World Bank, *Colombia Minerals Export US \$ Thousand by Country and Region 2009-2016*, https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/COL/StartYear/2009/EndYear/2016/TradeFlow/Export/Indicator/XPRT-TRD-VL/Partner/ALL/Product/25-26_Minerals#, Diakses Pada 05 Juli 2018 Pada Pukul 21.37 WIB.

¹⁰² *Ibid.*

¹⁰³ *Ibid.*

kemudian mengalami penurunan terus menerus hingga di tahun 2013 yaitu menyentuh angka \$36 juta.¹⁰⁴ Perlahan tapi pasti, ekspor mineral Negara Kolombia mengalami peningkatan namun tidak terlalu signifikan.¹⁰⁵ Tercatat hingga di tahun 2016, ekspor mineral Negara Kolombia hanya mencapai \$60 juta.¹⁰⁶ Tentunya hal ini cukup jauh jika dibandingkan dengan ekspor di tahun 2009 yang mampu mencapai angka \$284 juta.

Dengan menurunnya ekspor mineral Negara Kolombia juga termasuk di dalamnya penurunan ekspor komoditi emas di tahun 2011.¹⁰⁷ Salah satu penyebab terjadi penurunan ekspor dikarenakan adanya hubungan dengan Negara mitra dagang Kolombia, yaitu Venezuela sempat renggang.¹⁰⁸ Negara Venezuela sendiri menjadi mitra dagang, khususnya pada sektor mineral yang menduduki peringkat pertama.¹⁰⁹ Sehingga dengan renggangnya hubungan antara Negara Kolombia dan Negara Venezuela berimplikasi pada ekspor yang ada.

Tidak dapat dipungkiri bahwa kondisi perekonomian suatu Negara menjadi salah satu penyebab mengapa Negara tidak patuh terhadap suatu perjanjian yang telah disepakati. Ketika kondisi perekonomian suatu Negara mengalami masalah maka hal ini bisa menjadi dorongan Negara untuk tidak patuh, seperti yang dilakukan oleh Negara Kolombia. Mengingat bahwa komoditi emas yang masuk ke dalam 5 terbesar

¹⁰⁴ *Ibid.*

¹⁰⁵ *Ibid.*

¹⁰⁶ *Ibid.*

¹⁰⁷ Mauricio Hernández Monsalve, *Economic Watch: Colombia*, Page 1, https://www.bbvaresearch.com/KETD/fbin/mult/120713_EcoWatch_Colombia_Markets_tcm348-341966.pdf, Diakses Pada 05 Mei 2018 Pada Pukul 09.27 WIB.

¹⁰⁸ *Ibid.*

¹⁰⁹ World Bank, *Loc. Cit.*

ekspor Negara Kolombia yang juga berkontribusi terhadap pertumbuhan GDP Negara Kolombia harus mengalami penurunan ekspor, maka mendorong Negara Kolombia melakukan pengambilalihan tidak langsung terhadap Proyek Angostura yang notabene berfokus pada tambang emas.

5.3.3 Perubahan Kondisi Sosial

Adanya perubahan kondisi sosial di Negara Kolombia menjadi salah satu hal yang penyebab mengapa Negara Kolombia tidak patuh terhadap CCOFTA yang telah disepakati. Perubahan kondisi sosial ditunjukkan dengan besarnya tuntutan dari masyarakat untuk menghentikan aktivitas tambang di kawasan ekosistem Paramo yang kemudian pada akhirnya membuat Negara Kolombia mengeluarkan serangkaian peraturan yang melarang adanya aktivitas tambang di kawasan ekosistem Paramo, yang kemudian puncaknya pada 18 Februari 2016 Konstitusi Kolombia mengeluarkan keputusan bahwa menghapus pengecualian larangan aktivitas tambang yang berlaku sesuai Resolusi no. 2090 dan UU 1753.¹¹⁰

Kawasan ekosistem Paramo sendiri merupakan sumber mata air dari masyarakat yang mensupply setidaknya 70% dari kebutuhan air masyarakat.¹¹¹ Oleh sebab itu masyarakat khawatir jika tambang akan merusak kawasan ekosistem Paramo yang berdampak pada ketersediaan air bersih yang menjadi konsumsi mereka sehari-hari.

¹¹⁰ ICSID, *Loc. Cit*, Page 24-26.

¹¹¹ Anna-Katarina Gravgaard, *Gold or Water?*, <https://pulitzercenter.org/reporting/gold-or-water>, Diakses Pada 23 Mei 2018 Pada Pukul 17.20 WIB.

Selain itu kawasan ekosistem Paramo juga menjadi tempat hidup bagi spesies tanaman maupun hewan yang hanya hidup di kawasan ekosistem Paramo.¹¹²

Besarnya tuntutan dari masyarakat dapat dilihat dari tindakan yang dilakukan oleh masyarakat untuk melindungi kawasan ekosistem Paramo melalui berbagai cara. Mulai dari adanya dibentuknya *Comité para la defensa del Agua y del Páramo de Santurbán* atau Komite Perlindungan Air dan Kawasan Ekosistem Paramo dan berbagai gerakan seperti audiensi, dibuatnya forum, hingga aksi turun ke jalan atau demonstrasi.¹¹³ Komite Perlindungan Air dan Kawasan Ekosistem Paramo merupakan Komite yang terbentuk dari berbagai elemen dan kalangan seperti koalisi sosial, aktivis lingkungan, pelajar serta setidaknya 40 organisasi yang berlokasi di ibu kota Kolombia, Bucaramanga.¹¹⁴ Komite Perlindungan Air dan Kawasan Ekosistem Paramo dibentuk sebagai respon terhadap adanya proyek tambang emas di kawasan ekosistem Paramo yang memiliki tugas untuk mempromosikan gerakan sosial untuk melindungi kawasan ekosistem Paramo.¹¹⁵ Hal ini dilakukan mengingat kawasan ekosistem Paramo merupakan sumber mata air bagi setidaknya dua juta penduduk Kolombia.¹¹⁶

¹¹² Semana Sostenible, *Loc.Cit.*

¹¹³ Adela Parra-Romero dan Leda Gitahy, *Movimiento social como actor-red: ensamblando el Comité para la defensa del Agua y del Páramo de Santurbán*, Page 8-10, <http://www.scielo.org.co/pdf/unih/n84/0120-4807-unih-84-00113.pdf>, Diakses Pada 03 Agustus 2018 Pada Pukul 05.16 WIB.

¹¹⁴ Ombudsman, *Complaint Presented to the Office of the Compliance Advisor-International Financial Corporation Project No. 27961 in Colombia*, Page 4-5, http://www.cao-ombudsman.org/cases/document-links/documents/EcoOroComplaint_ENG.pdf, Diakses Pada 15 Mei 2018 Pada Pukul 08.34 WIB.

¹¹⁵ *Ibid.*

¹¹⁶ *Ibid.*

Aksi yang pertama adalah audiensi, dimana audiensi pertama dilaksanakan pada 21 November 2010 yang diadakan di California, Departemen Santander, Kolombia.¹¹⁷

Audiensi dibuat atas dasar dorongan permintaan dari Komite Perlindungan Air dan Kawasan Ekosistem Paramo terhadap Kementerian Lingkungan, Perumahan dan Pengembangan Wilayah untuk dibuat audiensi yang membahas studi dampak lingkungan dari proyek tambang emas yang ada.¹¹⁸

Audiensi menghadirkan berbagai kalangan, mulai dari Perusahaan Eco Oro sebagai investor, pemerintah yaitu Kementerian yang terkait (Kementerian Lingkungan, Perumahan dan Pengembangan Wilayah) serta masyarakat.¹¹⁹ Dalam kesempatan itu Perusahaan Eco Oro menjanjikan beberapa penawaran seperti perbaikan jalan di California jika mereka tetap bisa beraktivitas.¹²⁰ Infrastruktur jalan di California sendiri cukup buruk dimana terjadi kerusakan yang jika hujan turun maka sulit untuk dilewati.¹²¹ Namun audiensi tidak bisa berjalan maksimal dikarenakan sedikit masyarakat yang dapat hadir dalam audiensi sebagai akibat akses jalan menuju lokasi audiensi rusak.¹²²

Oleh sebab itu Gubernur Departemen Santander dan beberapa organisasi menyelenggarakan kembali audiensi kedua yang kemudian hal ini disetujui oleh Kementerian Lingkungan, Perumahan dan Pengembangan Wilayah.¹²³ Audiensi kedua

¹¹⁷ Aída Sofía Rivera Sotelo, *Op.Cit*, Page 127-128.

¹¹⁸ Adela Parra-Romero dan Leda Gitahy, *Loc.Cit*, Page 8-10.

¹¹⁹ Ombudsman, *Loc.Cit*, Page 4-5.

¹²⁰ *Ibid.*

¹²¹ *Ibid.*

¹²² Adela Parra-Romero dan Leda Gitahy, *Loc.Cit*, Page 8-10.

¹²³ *Ibid.*

dilaksanakan pada 25 Februari 2011 yang dilaksanakan di Kota Bucaramanga.¹²⁴ Pada audiensi kedua dihadiri oleh berbagai kalangan mulai dari pelajar, aktivis lingkungan serta politisi.¹²⁵ Namun pada audiensi kedua harus dihentikan dikarenakan para peserta audiensi yang tidak bersikap kooperatif selama jalannya audiensi, yaitu saat perwakilan Perusahaan Eco Oro selaku investor memberikan pernyataan dan penjelasan yang kemudian disambut dengan ejekan dari para peserta audiensi.¹²⁶ Kementerian Lingkungan, Perumahan dan Pengembangan Wilayah kemudian menjadwalkan audiensi kembali satu minggu kemudian, tepatnya pada 11 Maret 2011.¹²⁷ Audiensi dilaksanakan di gedung CENFER pusat perdagangan yang terletak di Kota Bucaramanga yang kemudian dihadiri sekitar 4000 orang.¹²⁸

Kemudian aksi yang kedua adalah demonstrasi dan turun ke jalan dimana hal ini pertama kali dilaksanakan pada 05 Juni 2010 yang melibatkan sekitar 150 orang pada aksi ini.¹²⁹ Kemudian demonstrasi yang kedua pada 5 Oktober 2010 yang melibatkan 5000 orang pada aksi ini.¹³⁰ Hal ini berlanjut pada demonstrasi yang ke tiga yang dilaksanakan pada 18 November 2010 melibatkan 8000 peserta.¹³¹ Puncak dari demostrasi terjadi pada 25 Februari 2011 yang diselenggarakan oleh FENALCO.¹³² FENALCO (*Federación Nacional de Comerciantes*) sendiri adalah Federasi Pedagang

¹²⁴ Aída Sofía Rivera Sotelo, *Op.Cit*, Page 130.

¹²⁵ *Ibid.*

¹²⁶ *Ibid.*

¹²⁷ *Ibid.*

¹²⁸ Adela Parra-Romero dan Leda Gitahy, *Loc.Cit*, Page 8-10.

¹²⁹ Ombudsman, *Loc.Cit*, Page 5.

¹³⁰ *Ibid*

¹³¹ *Ibid.*

¹³² *Ibid.*

Nasional Kolombia.¹³³ Setidaknya tercatat sekitar 50.000 orang turun ke jalan dengan keinginan yang sama yaitu untuk melindungi kawasan ekosistem Paramo dari tambang.¹³⁴

Demonstrasi ke empat merupakan yang terbesar jika dibandingkan dengan demonstrasi sebelum-sebelumnya, yang mana hal ini bisa dilihat dari banyaknya partisipan pada aksi tersebut. Hal ini berlanjut pada demonstrasi yang kelima pada 16 Maret 2012 yang diselenggarakan oleh Komite Perlindungan Air dan Kawasan Ekosistem Paramo untuk menentang aktivitas tambang di kawasan ekosistem Paramo.¹³⁵ Demonstrasi ini diikuti setidaknya 30.000 orang.¹³⁶ Kemudian demonstrasi terakhir yang diselenggarakan pada 15 November 2013 dan diikuti lebih dari 12.000 orang.¹³⁷ Dengan menggunakan slogan “*water yes, gold no*” para pendemonstran menyuarakan aspirasinya untuk melindungi kawasan ekosistem Paramo.¹³⁸ Demonstrasi ini diikuti oleh berbagai kalangan mulai dari para generasi muda, NGO, serikat buruh hingga mantan Menteri Kesehatan Kolombia Antonio Navarro Wolf.¹³⁹

Kemudian aksi yang ketiga adalah dibuatnya *Pliego Verde* atau semacam petisi yaitu dengan mengumpulkan tanda tangan yang diinisiasi oleh Komite Perlindungan

¹³³ FENALCO, *Federación Nacional de Comerciante*, <http://www.fenalco.com.co/federacionnacional>, Diakses Pada 10 Agustus 2018 Pada Pukul 16.32 WIB.

¹³⁴ *Ibid.*

¹³⁵ Ombudsman, *Loc.Cit*, Page 5.

¹³⁶ *Ibid.*

¹³⁷ Caracol Radio, *Más de 12.000 personas marcharon en defensa del páramo de Santurbán*, http://caracol.com.co/radio/2013/11/15/regional/1384539660_016953.html, Diakses Pada 03 Agustus 2018 Pada Pukul 03.22 WIB.

¹³⁸ *Ibid.*

¹³⁹ *Ibid.*

Air dan Kawasan Ekosistem Paramo yang dimulai di tahun 2010 hingga Maret 2011.¹⁴⁰ Total tanda tangan yang terkumpul sebanyak 75.000 yang kemudian diserahkan kepada Kementerian Lingkungan, Perumahan dan Pengembangan Wilayah.¹⁴¹ Isi dari petisi tersebut menolak adanya aktivitas tambang di kawasan ekosistem Paramo dan menuntut agar kawasan ekosistem Paramo dilindungi.¹⁴²

Secara keseluruhan, tidak sedikit usaha yang dilakukan oleh masyarakat dan Komite Perlindungan Air dan Kawasan Ekosistem Paramo untuk terus menerus mengkampanyekan dan menyuarakan tuntutan mereka, yaitu melarang aktivitas tambang di kawasan ekosistem Paramo dan melindungi kawasan ekosistem Paramo. Dengan masifnya tuntutan masyarakat tersebut, mulai dari audiensi, petisi hingga aksi turun ke jalan atau demonstrasi tentunya hal ini pada akhirnya membuat pemerintah mengeluarkan keputusan untuk melarang aktivitas tambang di kawasan ekosistem Paramo. Pemerintah melalui Konstitusi Kolombia mengeluarkan keputusan untuk menghapus pengecualian larangan aktivitas tambang di kawasan ekosistem Paramo, yang mana sebelumnya mengacu pada UU 1753 para investor yang telah mengantongi konsesi kontrak dan izin lingkungan yang dikeluarkan sebelum 09 Februari 2010 dapat tetap melakukan aktivitas tambang.¹⁴³ Dengan dikeluarkannya keputusan tersebut maka secara otomatis keseluruhan aktivitas tambang di kawasan ekosistem Paramo

¹⁴⁰ Ombudsman, *Loc.Cit*, Page 5.

¹⁴¹ *Ibid.*

¹⁴² *Ibid.*

¹⁴³ ICSID, *Loc.Cit*, Page 24-26.

berhenti total dan tentunya tidak akan ada aktivitas tambang lainnya di kemudian hari di kawasan ekosistem Paramo.

Ketika tuntutan dari masyarakat yang cukup besar untuk menghentikan aktivitas tambang di kawasan ekosistem Paramo, maka pemerintah Kolombia tidak dapat berbuat banyak selain mengikuti keinginan masyarakat yaitu melarang adanya aktivitas tambang di kawasan ekosistem Paramo. Tentunya pemerintah Kolombia sadar bahwa dengan mereka mengeluarkan larangan melakukan aktivitas tambang di kawasan ekosistem Paramo, secara tidak langsung mereka melakukan pengambilalihan tidak langsung terhadap Proyek Angostura yang merupakan investasi dari Perusahaan Eco Oro. Dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah Kolombia tentunya melanggar pasal 805 dan 811 dari CCOFTA yang telah disepakati oleh kedua Negara.

5.4 Hasil Analisis

Dari pembahasan yang sudah dijelaskan oleh penulis berkaitan dengan ketidakpatuhan Kolombia terhadap CCOFTA dengan mengambilalih Proyek Angostura dengan menggunakan konsep ketidakpatuhan dari Chayes dan Chayes, penulis menambahkan hasil analisis. Penulis memilih indikator yang paling dominan dari ketidakpatuhan yang dilakukan oleh Kolombia. Dari ke 7 indikator yang sudah dijelaskan oleh penulis, penulis memilih 3 indikator yang menurut penulis paling dominan diantara indikator-indikator lainnya.

Indikator pertama adalah adanya keterbatasan birokrasi yang dihadapi oleh Negara Kolombia. Birokrasi memiliki peranan penting dalam implementasi suatu

perjanjian. Ketika birokrasi sendiri bermasalah maka sudah dipastikan bahwa hal ini akan berdampak ketidakpatuhan Negara terhadap suatu perjanjian. Dalam kasus yang dihadapi oleh Perusahaan Eco Oro, birokrasi dari Negara Kolombia khususnya yang berkaitan dengan sektor tambang sendiri bermasalah. Ketika masing-masing institusi yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan dan Kementerian Pertambangan dan Energi masing-masing memiliki regulasi mengenai tambang yang berbeda maka hal ini yang kemudian menjadi masalah. Masing-masing Kementerian tetap bersikukuh bahwa meyakini regulasi yang telah mereka keluarkan benar yang kemudian antara satu dengan lainnya tidak memiliki kesinambungan dalam regulasi.

Ketika Kementerian Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan serta Kementerian Pertambangan dan Energi dari awal dalam regulasi mengenai zonasi tidak berkesinambungan antara satu dengan lainnya, maka tentunya akan menjadi masalah di kemudian hari yang tentunya akan merugikan investor selaku pemegang konsesi kontrak. Pada akhirnya investor akan bingung, di satu sisi mereka tidak salah karena mereka mendapatkan konsesi kontrak secara legal dari Kementerian Pertambangan dan Energi. Tetapi di sisi lain aktivitas mereka yang dilakukan di kawasan terlarang dan terbatas salah karena tidak sesuai dengan regulasi zonasi yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan.

Apalagi pertimbangan pemberian konsesi kontrak berdasarkan zonasi lingkungan tidak diberikan mulai pada fase awal, yaitu eksplorasi namun diberikan pada fase selanjutnya yaitu fase eksploitasi. Padahal fase eksplorasi sendiri pada

dasarnya dalam penggunaan lahannya sudah merusak lingkungan. Tujuan dasar dibentuknya zonasi adalah agar wilayah yang tergolong wilayah terlarang atau terbatas mereka tidak mengalami kerusakan lingkungan, dimana ekosistem Paramo termasuk ke dalam wilayah yang terlarang mengingat wilayah tersebut merupakan sumber mata air bagi masyarakat sekitar. Ketika Kementerian Pertambangan dan Energi memberikan konsesi kontrak berdasarkan zonasi lingkungan pada fase eksploitasi tentunya bisa dikatakan cukup terlambat dan tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan.

Jika kita lihat maka yang pada dasarnya bersalah adalah Pemerintah Kolombia bukannya investor yaitu perusahaan Eco Oro karena keterbatasan birokrasi yang dimiliki oleh Negara Kolombia berasal dari domestik Negara Kolombia sendiri bukan karena investor. Investor hanya mengajukan izin tambang kepada Kementerian Pertambangan dan Energi sesuai dengan mekanisme yang ada. Selebihnya keputusan ada pada Kementerian Pertambangan dan Energi melalui Badan Pertambangan yang memiliki otoritas untuk mengeluarkan konsesi kontrak. Oleh sebab itu penulis memilih keterbatasan birokrasi sebagai salah satu indikator yang paling dominan karena penulis menilai bahwa dari sisi birokrasi Negara Kolombia khususnya yang berkaitan dengan sektor tambang sendiri memiliki kelemahan yaitu dengan regulasi yang tidak berkesinambungan antara satu institusi dengan lainnya.

Indikator kedua adalah perubahan kondisi politik, dimana penulis menilai bahwa dengan adanya perubahan pergantian kepemimpinan Presiden yang kemudian fokus dari masing-masing Presiden memiliki perbedaan. Dimulai dari investasi yang

dilakukan oleh Perusahaan Eco Oro hingga kasus ini dimulai berada dibawah kepemimpinan ke tiga Presiden Terakhir Negara Kolombia. Masing-masing ada yang memiliki kesamaan dan perbedaan fokus kebijakan khususnya dalam sektor tambang.

Dimulai dari Presiden Andrés Pastrana Arango periode kepemimpinan 1998-2002 yang mana di bawah kepemimpinannya Negara Kolombia mulai menunjukkan keseriusan di bidang sektor tambang yaitu dengan memodernisasi *mining code* tahun 2001. Dengan modernisasi *mining code* tahun 2001 memberikan berbagai penawaran menarik bagi para investor tambang, mulai dari jaminan konsesi kontrak berlaku hingga 20 tahun dan menjamin untuk bisa memperpanjang hingga 30 tahun jika kontrak berakhir yang mana hal ini juga didapatkan oleh Perusahaan Eco Oro sebagai investor. Yaitu mendapatkan konsesi kontrak dengan jangka waktu 20 tahun dan bisa memperbaharui kontrak dengan jangka waktu 30 tahun jika masa berlaku konsesi kontrak habis.

Kemudian berlanjut pada era kepemimpinan Presiden Álvaro Uribe Vélez yang juga memiliki fokus yang sama dengan Presiden Andrés Pastrana Arango, yaitu untuk mengembangkan sektor tambang Negara Kolombia. Berbagai cara dilakukan, mulai dari dengan mengeluarkan kebijakan DSD yang bertujuan untuk menciptakan kestabilan keamanan dalam negeri mengingat kondisi dalam negeri Kolombia saat itu tidak stabil yang kemudian pada akhirnya kebijakan ini berhasil menimbulkan kepercayaan investor bahwa Negara Kolombia aman sebagai tempat investasi sehingga para investor mau melakukan investasi di Negara Kolombia. Hal ini ditunjukkan

dengan peningkatan FDI di bidang tambang yang cukup signifikan di masa pemerintahan Presiden Álvaro Uribe Vélez.

Tidak hanya itu, Presiden Álvaro Uribe Vélez juga menginisiasi dibentuknya Kebijakan Rencana Nasional untuk Pengembangan Sektor Tambang dan Lingkungan untuk Kolombia tahun 2019. Dengan dibentuknya Kebijakan Rencana Nasional tersebut merupakan kerangka besar bagi pengembangan sektor tambang di Negara Kolombia. Secara jelas dalam rencana nasional tersebut membahas berbagai hal mengenai pengembangan sektor tambang, mulai dari informasi pemetaan potensi tambang setiap departemen hingga kemudian strategi pengembangan sektor tambang pada setiap departemen yang secara jelas melibatkan birokrasi pemerintah mana saja. Tentunya dengan kerangka besar yang detail ini mencakup berbagai hal yang kemudian menjadi bukti nyata bahwa Presiden Álvaro Uribe Vélez memiliki fokus dan keinginan yang sangat besar terhadap pengembangan sektor tambang, yang bahkan memiliki keinginan dan target jika di tahun 2019 Negara Kolombia menjadi salah satu Negara dengan industri tambang terbesar di kawasan Amerika Latin.

Namun, fokus pengembangan sektor tambang harus berhenti, dimana pada kepemimpinan Presiden selanjutnya, yaitu Presiden Juan Manuel Santos yang memiliki fokus kebijakan yang berbeda yaitu lebih mengarah pada sektor lingkungan. Hal ini mulai tercermin dalam RPJMN pada 2 periode kepemimpinannya yang melarang adanya aktivitas tambang di kawasan ekosistem paramo dan mengusung pertumbuhan ekonomi hijau. Dengan dikeluarkannya kedua RPJMN tersebut berimplikasi terhadap para investor bidang tambang yang telah mengantongi konsesi kontrak yang kemudian

tidak bisa beraktivitas dimana Perusahaan Eco Oro menjadi salah satu yang terkena dampaknya.

Kasus sengketa investasi yang dialami oleh Perusahaan Eco Oro dimulai di bawah masa kepemimpinan Presiden Juan Manuel Santos sebagai akibat fokus dan RPJMN yang dikeluarkannya yang lebih mengarah pada isu lingkungan yang melarang aktivitas tambang di kawasan ekosistem Paramo. Tercatat untuk pertama kalinya Pada masa kepemimpinan Presiden Juan Manuel Santos, Negara Kolombia mendapatkan sengketa investasi dimana 2 dari 3 kasus yang ada berkaitan dengan kebijakan larangan aktivitas tambang di kawasan ekosistem Paramo yang dikeluarkan oleh Presiden Juan Manuel Santos.¹⁴⁴

Jika kita bandingkan dua kepemimpinan Presiden sebelum Presiden Juan Manuel Santos memiliki fokus sama pada sektor tambang sehingga kemudian berdampak pada investasi yang dilakukan oleh Perusahaan Eco Oro tidak memiliki masalah. Namun hal ini berubah ketika Presiden Juan Manuel Santos menjabat menjadi Presiden Kolombia yang kemudian mengalami perubahan fokus dari kedua Presiden sebelumnya, dimana Presiden Juan Manuel Santos memiliki fokus pada sektor lingkungan yang kemudian berdampak pada investasi yang dilakukan oleh Perusahaan Eco Oro dan perusahaan-perusahaan tambang lainnya yang kemudian bermasalah.

Pada dasarnya dengan adanya pergantian kepemimpinan Presiden yang kemudian berganti pula fokus kebijakan maupun isu yang menjadi prioritas berdampak

¹⁴⁴ UNCTAD, *Loc.Cit.*

sangat besar terhadap kelangsungan investasi yang ada, walaupun para investor telah mendapatkan jaminan dalam menjalankan investasi dibawah kontrak dan perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani. Oleh sebab itu penulis menilai bahwa indikator perubahan kondisi politik menjadi salah satu yang dominan penyebab Negara Kolombia tidak patuh terhadap CCOFTA yang telah disepakati.

Indikator ketiga adalah perubahan kondisi sosial dimana penulis menilai bahwa dengan besarnya tuntutan dari masyarakat untuk menghentikan aktivitas tambang di kawasan ekosistem Paramo pada akhirnya mendorong pemerintah untuk mengeluarkan larangan aktivitas tambang di kawasan ekosistem Paramo. Melihat bahwa esensi dasar pemerintah yang bekerja untuk rakyat, yang kemudian dengan tuntutan dari rakyat yang sangat besar pemerintah tidak memiliki pilhan lain selain mengeluarkan larangan aktivitas tambang di kawasan ekosistem Paramo, walaupun secara sadar pemerintah tahu bahwa apa yang mereka lakukan secara tidak langsung mengambilalih Proyek Angostura yang kemudian hal ini melanggar pasal 805 dan 811 CCOFTA yang telah disepakati.

Hal ini kemudian berimplikasi merugikan para investor tambang yang sebelumnya telah mengantongi konsesi kontrak tambang yang pada akhirnya tidak dapat melakukan aktivitas investasi pada umumnya, termasuk perusahaan Eco Oro salah satunya. Otomatis dengan besarnya tuntutan masyarakat kepada Pemerintah Kolombia, para investor termasuk perusahaan Eco Oro tidak bisa berbuat apa-apa selain memberikan penjelasan mengenai bahwa apa yang mereka lakukan legal di mata hukum mengingat telah mengantongi konsesi kontrak dan menjelaskan

kontribusi yang telah mereka lakukan terhadap pembangunan wilayah yang menjadi lokasi investasi mereka.



BAB VI

KESIMPULAN

6.1 Kesimpulan

Dari penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa penyebab ketidakpatuhan Negara Kolombia terhadap CCOFTA dengan melakukan pengambilalihan tidak langsung Proyek Angostura disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama adalah bahasa yang digunakan pada pasal 805 dan 811 tidak menjelaskan dengan detail dan jelas mengenai makna perlakuan adil dan pengecualian diperbolehkannya melakukan pengambilalihan tidak langsung untuk kepentingan masyarakat. Selain dari sisi bahasa, adanya ketidaksesuaian konteks dari klausa dalam perjanjian dimana tidak dapat dipungkiri perubahan-perubahan yang mendorong klausa dalam perjanjian khususnya pasal 805 dan 811 CCOFTA tidak sesuai dengan konteks saat ini.

Kemudian yang kedua adalah adanya keterbatasan birokrasi dimana hal ini terlihat adanya ketidaksinambungan antar institusi yaitu Kementerian Pertambangan dan Energi serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan berkaitan dengan regulasi zonasi aktivitas tambang. Selain itu adanya keterbatasan finansial dimana tidak ditemukannya biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun bantuan yang di dapatkan oleh Pemerintah Kolombia dalam pelaksanaan implementasi CCOFTA.

Kemudian yang ketiga adalah adanya perubahan kondisi politik dimana terjadi pergantian kepemimpinan yang juga berganti fokus kebijakan, dimana jika dibandingkan dengan kepemimpinan tiga Presiden terakhir Negara Kolombia yaitu dimulai dari Andrés Pastrana Arango yang mulai membawa Negara Kolombia untuk mengembangkan sektor tambang yang kemudian dilanjutkan dengan kepemimpinan Presiden Álvaro Uribe Vélez yang juga memiliki fokus yang sama dengan pendahulunya. Namun hal ini tampak berbeda dengan fokus Presiden selanjutnya yaitu Presiden Juan Manuel Santos yang fokus mengarah pada isu lingkungan yang kemudian mengeluarkan larangan melakukan tambang di kawasan ekosistem Paramo dan berdampak pada investasi yang dilakukan oleh Perusahaan Eco Oro yang harus terhenti.

Selain itu adanya perubahan kondisi finansial dimana ekspor komoditi emas sempat mengalami penurunan, dimana ekspor komoditi emas masuk ke dalam 5 besar penyumbang GDP Negara Kolombia. Yang terakhir adalah perubahan sosial dimana besarnya tuntutan masyarakat terhadap untuk menghentikan aktivitas tambang di kawasan ekosistem Paramo sehingga pada akhirnya pemerintah Kolombia mengeluarkan larangan aktivitas di kawasan ekosistem Paramo.

Kemudian dari ke tujuh indikator yang ada, terdapat 3 indikator yang dominan. Yang pertama adalah adanya keterbatasan birokrasi yang muncul sebagai akibat ketidaksinambungannya regulasi antar institusi mengenai zonasi tambang. Kemudian yang kedua adalah indikator perubahan kondisi politik dimana dengan adanya pergantian kepemimpinan berdampak pada perubahan fokus isu yaitu Presiden Juan

Manuel Santos yang lebih fokus pada isu lingkungan yang berbeda dengan para pemimpin sebelumnya. Yang terakhir adalah indikator perubahan kondisi sosial dimana dengan besarnya tuntutan masyarakat untuk melarang aktivitas tambang di kawasan ekosistem Paramo pada akhirnya mendorong pemerintah Kolombia mengeluarkan larangan aktivitas tambang di kawasan ekosistem Paramo.

6.2 Saran

Dari penelitian di atas, maka penulis dapat memberikan saran untuk mengambil topik penelitian lainnya berkaitan dengan aktivitas tambang ilegal yang kemudian hasilnya membiayai aktivitas kelompok-kelompok pemberontak FARC dan ELN, dimana hal ini berkaitan dengan mata kuliah TOC. Selain itu, topik sengketa investasi juga bisa dikembangkan lagi khususnya sengketa investasi di negara-negara Amerika Latin lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abram Chayes, A. H. (1995). *The New Sovereignty: Compliance with International Regulatory Agreements*. London: Harvard University Press.

JURNAL

A, L. E. (2007). Are the Characteristics of the New Colombian Mining Code Sufficiently Competitive in Attracting Investment to the Mineral Sector? *Minerals & Energy - Raw Materials Report*, 2.

Alvarez, J. D. (2013). Big Industry Small Rules. The Mining Industry in Colombia. 2.

Billon, F. M. (2013). Gold Mining in Colombia, Post-War Crime and the Peace Agreement with the FARC. 4-5.

Marks, T. A. (2006). Columbia Military Support for 'Democratic Security', Small Wars & Insurgencies, Vol. 17, No. 2. *Small Wars & Insurgencies, Vol. 17, No. 2*, 8-9.

Montoya, D. O. (2010). Neoliberal Transformation in Colombia's Goldfields: Development Strategy or Capitalist Imperialism? *LABOUR, Capital and Society*, 8.

Sankey, K. (2018). Extractive Capital, Imperialism, and the Colombian State. *Latin America Perspectives*, 12.

Tallberg, J. (2002). Paths to Compliance: Enforcement, Management, and the European Union. *International Organization Volume 56 Issue 3*, 6.

Villar D, P.-M. J. (2017). Mining as the "Locomotive of the Colombian Economy: it's Real Cost. 1.

WEBSITE

- Bank, W. (2008). *Free Trade Agreement between Canada and The Republic of Colombia*,. Retrieved from World Bank: <https://wits.worldbank.org/GPTAD/PDF/archive/canada-columbia.pdf>
- Bank, W. (n.d.). *Colombia Minerals Export US \$ Thousand by Country and Region 2009-2016*. Retrieved from World Integrated Trade Solutions: https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/COL/StartYear/2009/EndYear/2016/TradeFlow/Export/Indicator/XPRT-TRD-VL/Partner/ALL/Product/25-26_Minerals#,
- Colombia, E. o. (2012, May 15). *Annual Report Pursuant to the Agreement concerning Annual Reports on Human Rights and Free Trade between Canada and the Republic of Canada for the Period January 1, 2012 - December 31 2012*. Retrieved from Embassy of Canada to Colombia: http://www.canadainternational.gc.ca/colombia-colombie/bilateral_relations_bilaterales/rep-hrft-co_2012-dple-rapp.aspx?lang=eng
- Colombia, E. o. (2016, May 17). *Annual Report Pursuant to the Agreement concerning Annual Reports on Human Rights and Free Trade between Canada and the Republic of Canada for the Period January 1, 2016 - December 31, 2016*. Retrieved from Embassy of Canada to Colombia: http://www.canadainternational.gc.ca/colombia-colombie/bilateral_relations_bilaterales/rep-hrft-co_2016-dple-rapp.aspx?lang=eng
- Colombia, P. (2011, November). *Colombia*. Retrieved from Peace Brigades: https://www.peacebrigades.org/fileadmin/user_files/projects/colombia/files/colompBla/111203_mining_in_colombia_web.pdf
- Cooper, D. J. (2013, January 14). *El Dorado: the Truth Behind the Myth*. Retrieved from BBC: <https://www.bbc.com/news/magazine-20964114>
- Corp, E. O. (2017, March 31). *Management's Discussion and Analysis*. Retrieved from The CSE: <http://thecse.com/sites/default/files/investorx/EOM/1705151710164995.pdf>
- Desk, R. (n.d.). *Ministry of Environment and Sustainable Development (Colombia)*, . Retrieved from The REDD Desk:

- <https://theredddesk.org/countries/actors/ministry-environment-and-sustainable-development-colombia>
- FENALCO. (n.d.). *Federación Nacional de Comerciante*. Retrieved from Fenalco: <http://www.fenalco.com.co/federacionnacional>
- Gitahy, A. P.-R. (2017). *Movimiento social como actor-red: ensamblando el Comité para la defensa del Agua y del Páramo de Santurbán*. Retrieved from Scielo: <http://www.scielo.org.co/pdf/unih/n84/0120-4807-unih-84-00113.pdf>
- Grandkoski, D. (2011). *Defiance and Compliance: Australia and the United Nations Convention Relating to the Status of Refugees*. Retrieved from Victoria University of Wellington: <http://researcharchive.vuw.ac.nz/xmlui/bitstream/handle/10063/2325/thesis.pdf?sequence=2>
- Gravgaard, A.-K. (2011, May 13). *Gold or Water?* Retrieved from Pulitzer Center: <https://pulitzercenter.org/reporting/gold-or-water>
- ICSID. (2016, December 08). *Eco Oro Minerals Corp (Claimant) v The Republic of Colombia (Respondent)*. Retrieved from Italaw: <https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/italaw9443.pdf>
- ICSID. (2017, November 30). *Procedural Order No. 1*. Retrieved from Italaw: <https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/italaw9380.pdf>
- ICSID. (n.d.). *ICSID Caseload Statistics*. Retrieved from ICSID : <https://icsid.worldbank.org/en/Pages/resources/ICSID-Caseload-Statistics.aspx>
- Institute, N. R. (2015, June). *Country Strategy Note June 2015 Colombia*. Retrieved from Natural Resource Governance Institute: https://resourcegovernance.org/sites/default/files/documents/nrgi_colombia-strategy_20160629.pdf
- ITN. (2016, May 16). *Three Mining Disputes: The First Investment Disputes against Colombia Come to Light*. Retrieved from Investment Treaty News: [three-mining-disputes-the-first-investment-disputes-against-colombia-come-to-light/](http://www.itnnews.org/three-mining-disputes-the-first-investment-disputes-against-colombia-come-to-light/)
- Kolombia, K. (2011, June 16). *Ley 1450 De 2011, “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014.”*. Retrieved from Procuraduria Government Colombia:

- https://www.procuraduria.gov.co/portal/media/file/docs/ddr/CompiladoNormativo_Parte3.pdf
- Kolombia, K. (2015, June 9). *Por La Cual Se Expide El Plan Nacional De Desarrollo 2014-2018 "Todos Por Un Nuevo Pais"*. Retrieved from Agencia Nacional de Minería: https://www.anm.gov.co/sites/default/files/ley_1753_2015.pdf
- Krentz, A. (2013, January 1). *Mining in Colombia*. Retrieved from Lehigh Preserve University: <https://preserve.lehigh.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1004&context=perspectives-v31>
- Mineria, A. N. (2017, May 17). *Colombia "the Answer" for Mining Investment Opportunities*. Retrieved from Agencia Nacional de Minería: <https://www.anm.gov.co/sites/default/files/DocumentosAnm/ladu2017presentation.pdf>
- Monde, C. E.-T. (n.d.). *Mining and Human Rights Violations in Colombia: The Case of Anglo Gold Ashanty vy the Afri-descendant Community of La Toma (Cauca)*. Retrieved from Centre Europe - Tiers Monde: http://www.cetim.ch/legacy/en/interventions_details_print.php?iid=387
- Monsalve, M. H. (2012, July). *Economic Watch: Colombia*. Retrieved from BBVA Research: https://www.bbvaresearch.com/KETD/fbin/mult/120713_EcoWatch_Colombia_Markets_tcm348-341966.pdf,
- News, C. (2008, November 21). *Canada Signs Free-Trade Agreement with Colombia*. Retrieved from CTV News: <https://www.ctvnews.ca/canada-signs-free-trade-agreement-with-colombia-1.344878>
- Nikièma, S. H. (2012, March). *Best Practices Indirect Expropriation*. Retrieved from IISD: https://www.iisd.org/sites/default/files/publications/best_practice_indirect_expropriation.pdf
- OECD. (n.d.). *Colombia*. Retrieved from <https://atlas.media.mit.edu/en/profile/country/col/>
- OECD. (2015, January). *OECD Economic Surveys Colombia January 2015 Overview*. Retrieved from OECD: https://www.oecd.org/eco/surveys/Overview_Colombia_ENG.pdf

- Ombudsman. (2012, June 13). *Complaint Presented to the Office of the Compliance Advisor-International Financial Corporation Project No. 27961 in Colombia*. Retrieved from Cao Ombudsman: http://www.cao-ombudsman.org/cases/document-links/documents/EcoOroComplaint_ENG.pdf
- Palmer, C. &. (2011). *International Trade Update: Canada-Colombia Free Trade Agreement Implementation*. Retrieved from Cox and Palmer Law: https://www.coxandpalmerlaw.com/site/media/coxandpalmer/Trade_Newsletter.pdf
- Radio, C. (2013, November 15). *Más de 12.000 personas marcharon en defensa del páramo de Santurbán*. Retrieved from Caracol Radio: http://caracol.com.co/radio/2013/11/15/regional/1384539660_016953.html
- Rathbone, J. P. (2010, July 7). *Interview Transcript: Juan Manuel Santos*. Retrieved from Financial Times: <https://www.ft.com/content/40912456-89c6-11df-9ea6-00144feab49a>
- Richard, F. (2017, September 18). *Trade and Investments Series 2016 - Canadian Trade and Investment Activity: Canada-Colombia*. Retrieved from Parliament of Canada: <https://lop.parl.ca/Content/LOP/ResearchPublications/2017-574-e.html#show/hide>
- Sanchez, D. I. (2017, May 06). *Illegal Gold Mining Fuels Violence in Colombia*. Retrieved from Al Jazeera: <https://www.aljazeera.com/indepth/inpictures/2016/10/illegal-gold-mining-fuels-violence-colombia-161005063014208.html>
- Sarmiento, C. H. (2015). *Sustainability and Environmental Regional Autonomous Corporations in Boyacá-Colombia*. Retrieved from Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia: <https://revistas.uptc.edu.co/index.php/cenes/article/download/4147/5084>
- SEMANA. (2010, August 7). *Discurso Completo de Posesión de Juan Manuel Santos*. Retrieved from Semana: <https://www.semana.com/international/print-edition/articulo/climate-change-and-colombia-santos-new-deal/238322-3>
- Service, T. C. (2018, May 23). *Trade Commissioner Service - Colombia*. Retrieved from The Canadian Trade Commissioner Service: <http://tradecommissioner.gc.ca/colombia-colombie/index.aspx?lang=eng>

- Sostenible, S. (2018, January 20). *Colombia Completa 30 Páramos Delimitados, de los 36 Existentes en el País*. Retrieved from Semana Sostenible: <http://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/delimitacion-de-paramos-santos-delimito-siete-ecosistemas-mas-en-cesar/39364>
- Sotelo, A. S. (2012, September). *Interrogating Sustainable Development: A Case Study of Large-Scale Mining in Colombia*. Retrieved from Queens University: https://qspace.library.queensu.ca/bitstream/handle/1974/7494/riverasotelo_aidasofia_201211_ma.docx.pdf?sequence=1
- System, S. F. (n.d.). *Canada-Colombia*. Retrieved from SICE OAS: http://www.sice.oas.org/TPD/AND_CAN/CAN_COL_e.ASP
- TeleSUR. (2016, February 09). *Constitutional Court Bans Mining in Colombian Andes*. Retrieved from TeleSUR: <https://www.telesurtv.net/english/news/Mining-in-Colombian-Paramo-Banned-by-Constitutional-Court-20160209-0002.html>
- TLC. (2016, May 10). *Pleitos a la vista con los Tratados de Libre Comercio*. Retrieved from Semana: <http://www.semana.com/economia/articulo/tlc-empresas-extranjeras-demandan-al-estado-colombiano-por-incumplimiento/496194>
- UNCTAD. (2012). *Fair and Equitable Treatment UNCTAD Series on Issues in International Investment Agreements II*. Retrieved from UNCTAD: http://unctad.org/en/Docs/unctaddiaeia2011d5_en.pdf
- UNCTAD. (n.d.). *Breaches of IIA Provisions Alleged and Found*. Retrieved from UNCTAD: <http://investmentpolicyhub.unctad.org/ISDS/FilterByBreaches>
- UNCTAD. (n.d.). *Cases-Advanced Search Results*. Retrieved from UNCTAD : <http://investmentpolicyhub.unctad.org/ISDS/AdvancedSearchResults>
- UPME. (2006, July). *Colombia País Minero Plan Nacional Para El Desarrollo Minero 2019*. Retrieved from UPME: http://www1.upme.gov.co/simco/PlaneacionSector/Documents/PNDM_2019_Final.pdf
- Wharton, K. a. (2011, May 4). *Former Colombia President Álvaro Uribe on Latin America's Journey to Political and Economic Security*. Retrieved from Knowledge at Wharton: <http://knowledge.wharton.upenn.edu/article/former-colombia-president-alvaro-uribe-on-latin-americas-journey-to-political-and-economic-security/>

